



LAPORAN KINERJA 2024

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta kesehatan sehingga Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 dapat tersusun. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dilaporkan secara bertahap. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 ini disertai dengan data dukung capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja Tahun 2024.

Semoga Laporan Kinerja PPS Cilacap ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap untuk dapat memacu kinerja yang lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka pengembangan perikanan berbasis kinerja.

Cilacap, 17 Januari 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap,



Ditandatangani
Secara Elektronik

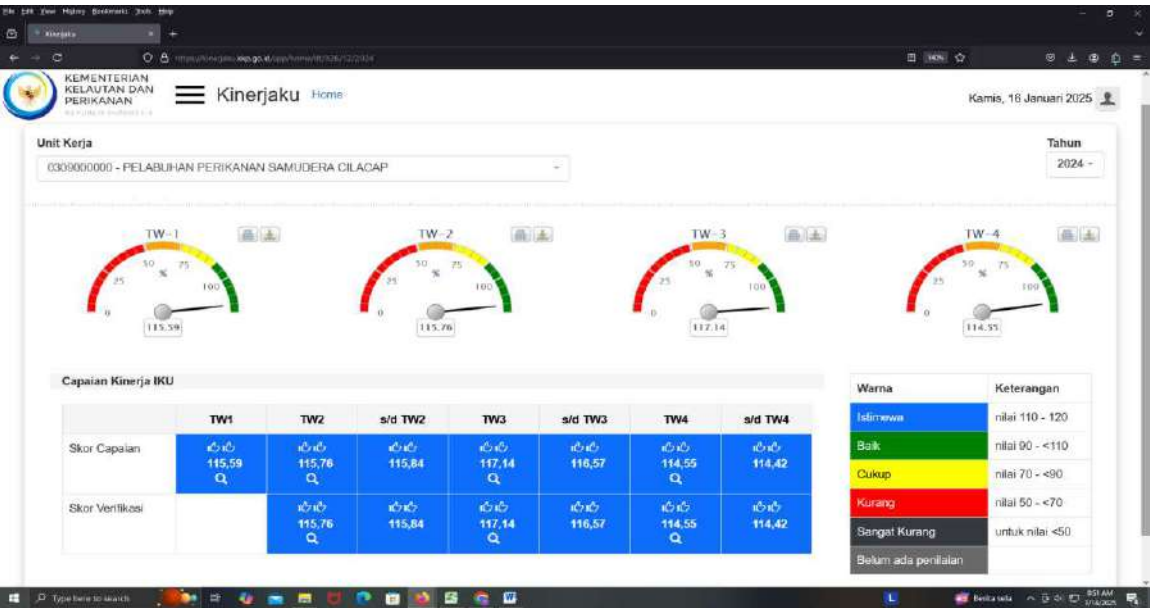
Imas Masriah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan informasi tertulis yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun Anggaran 2024 dengan rincian yakni PAGU total sebesar Rp. 23.537.844.000,-, PAGU blokir sebesar Rp. 868.154.000,-, sehingga PAGU efektif sebesar Rp. 22.669.690.000,-. Dari PAGU efektif tersebut, sampai dengan akhir Tahun 2024 capaian pelaksanaan anggaran adalah sebesar Rp. 22.522.669.505,- atau sebesar 99,35% dari total PAGU efektif Tahun Anggaran 2024.

Secara kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mendapatkan total Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) pada Triwulan IV sebesar 114,55% sehingga capaian NPSS sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah sebesar 114,42% sebagaimana *dashboard* di bawah ini:



Gambar 1. Dashboard Kinerja PPS Cilacap Tahun 2024

Capaian NPSS tersebut didukung oleh 18 (delapan belas) indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja dengan periode pengukuran triwulanan, 2 (dua) indikator kinerja semesteran, dan 9 (sembilan) indikator kinerja dengan periode perhitungan tahunan.

Pada akhir Tahun 2024 ini seluruh IKU Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai lebih dari 100%, sebagai berikut:

1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta);
2. Volume produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap (Ton);
3. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (persen);
4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai);
5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPS Cilacap (persen);
6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen);
7. Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai);
8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal);
9. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen);
10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai);
11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen);
12. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai);
13. IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks);
14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen);
15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen);
16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai);
17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera

Cilacap (nilai);

18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai).

Berikut adalah progress capaian indikator kinerja utama Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap terhadap target Tahun 2024:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN (%)
1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	3.153,73	5.909,13	187,37
2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	26.652	39.970,13	149,97
3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	100	100	100
4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84	93,67	111,51
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	85	95,66	112,54
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	33	36	109,09
7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	30,10	94	312,29
8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	650	1.034	159,08
9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	11	11,87	107,91
10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan	80	86,59	108,24

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN (%)
	Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)			
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	80	100	125
12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	94	99,04	105,36
13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	84	92,88	110,57
14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	80	96,29	120,36
15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	80	90	112,50
16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	93,76	97,82	104,33
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	71	90	126,76
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,30	91,94	104,12

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	2
1.3. Kedudukan	4
1.4. Tugas dan Fungsi	4
1.5. Aspek Strategis	12
1.6. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis PPS Cilacap 2020-2024	15
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	16
2.3. Target Kinerja dan Anggaran	17
2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
3.1.1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	27
IKU 1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Rp.Juta)	27
3.1.2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	31
IKU 2. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	31
3.1.3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berdaya saing	33
IKU 3. Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (persen)	33
IKU 4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	36
IKU 5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	40
3.1.4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas di PPS Cilacap yang optimal	43
IKU 6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen) Terukur (Unit)	43
IKU7.Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	45

3.1.5. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	
IKU 8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	47
3.1.6. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	50
IKU 9. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	50
3.1.7. Tata kelola Pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	52
IKU 10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (nilai)	52
IKU 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	55
IKU 12. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	57
IKU 13. IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (indeks)	60
IKU 14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	63
IKU 15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	66
IKU 16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (nilai)	68
IKU 17. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (nilai)	72
IKU 18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	73
3.2. Akuntabilitas Keuangan	76
3.3. Penggunaan Sumber Daya berdasarkan Sasaran Kegiatan	76
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	78
4.2. Saran	78
4.3. Tindak Lanjut atas Saran di LKj Triulan I Tahun 2024	78

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Enam kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) pengelolaan sumberdaya ikan, (2) pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, (3) pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil, (5) pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan, dan (6) peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang.

1.2. Gambaran Umum

Pembangunan perikanan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Prasarana pelabuhan perikanan mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan perikanan tangkap.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap diawali dari gagasan Direktorat Jenderal Perikanan pada tahun 1980-an untuk mengembangkan PPI Sentolokawat, namun dengan memperhatikan aspek keamanan pelayaran kapal-kapal tanker pengangkut minyak pertamina, lokasi pengembangan tersebut dipindahkan di Teluk Penyu. Pelaksanaan pembangunan fisik Pelabuhan Perikanan Cilacap dimulai pada tahun 1990 dan selesai tahun 1994, selanjutnya dilakukan uji coba operasional selama 1 (satu) tahun, yaitu mulai tanggal 20 Mei 1994 sampai dengan 24 Mei 1995.

Pelabuhan Perikanan Cilacap awalnya ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan type B (Nusantara) sesuai dengan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 16 Agustus 1995. Pada tanggal 18 Nopember 1996 Pelabuhan Perikanan Cilacap diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, dan dalam perkembangan selanjutnya Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan type A (Samudera) sesuai Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 86/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001. Seiring dengan penetapan status Pelabuhan Perikanan type A (Eselon II b), maka sesuai dengan amanat Inpres No. 7 Tahun 1999 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap setiap tahun wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis dan Rencana Kinerja yang ditetapkan.

1.3. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah sesuai pasal 1 (1) dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain :

1. Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 85 Tahun 2023 tentang Jenis & Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan Perikanan;
4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER. 08/PERMEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 5 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
2. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
3. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
4. pelaksanaan pemeriksaan *logbook* penangkapan ikan;
5. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
6. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
7. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan dan pemasaran serta distribusi hasil perikanan;
10. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
11. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
12. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat CPIB;
13. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;

14. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
15. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sebagai pelaksanaan amanat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah dibentuk susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap melalui Surat Tugas Kepala Pelabuhan Nomor B.94/PPSC/KP.440/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Susunan Keanggotaan Tim Kerja lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Berikut adalah susunan Tim Kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap:

1. Subbagian Umum

Tim Kerja Dukungan Manajerial bertanggung jawab atas 9 IKU dukungan manajemen yakni:

- ❖ Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (yang telah dinilai WBK) (nilai)
- ❖ Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (persen)
- ❖ Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (nilai)
- ❖ Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (indeks)
- ❖ Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)
- ❖ Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (persen)
- ❖ Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (nilai)

- ❖ Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (nilai)
- ❖ Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (Indeks)

Uraian Fungsi:

- Menyiapkan bahan penilaian Pembangunan ZI WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (nilai)
- Melakukan penyusunan bahan konsep penyelesaian tindak lanjut temuan aparaturnya pemeriksa (BPK, Itjen) di unit kerja lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rekonsiliasi kinerja lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan bahan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja teknis terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan perencanaan dan penganggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pengelolaan kinerja lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

- Melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia aparatur lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan penyiapan bahan terkait organisasi dan tata laksana di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Sekretariat terkait proses pengadaan barang/jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pengelolaan persuratan dan kearsipan lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan urusan kerumahtanggaan lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

2. Tim Kerja Operasional Pelabuhan

Tim Kerja Operasional Pelabuhan bertanggung jawab atas 2 IKU yakni:

- ❖ Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (Ton)
- ❖ Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (nilai)

Uraian Fungsi:

- Penyiapan data dan statistik Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

- Melakukan evaluasi terkait kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan data mutu perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan Kegiatan pembinaan dan pemeriksaan terhadap mutu ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan Kegiatan pengujian mutu hasil perikanan dan melaporkan hasil pengujian mutu yang telah dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan dan mempublikasikan data dalam bentuk visual dan nonvisual terkait perkembangan operasional di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan pengelolaan aplikasi PIPP

3. Tim Kerja Kesyahbandaran

Tim Kerja Kesyahbandaran bertanggung jawab atas 3 IKU yakni:

- ❖ Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)
- ❖ Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)
- ❖ Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (nilai)

Uraian Fungsi:

- Melaksanakan pelayanan perizinan kapal perikanan izin daerah di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pemeriksaan Log Book di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan bimbingan teknis kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan pengaturan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan penyaluran bahan perbekalan kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

- Menyiapkan pemeriksaan perencanaan pelayaran dengan selamat sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

4. Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana

Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana memiliki tanggung jawab atas 2 IKU yakni:

- ❖ Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (persen)
- ❖ Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (nilai)

Uraian Fungsi:

- Menyiapkan data/informasi yang terkait dengan bahan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan bahan usulan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

- Menyiapkan bahan penyusunan laporan pengawasan penggunaan/ pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan oleh pelabuhan perikanan sendiri ataupun oleh pihak swasta;
- Menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Melaksanakan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

5. Tim Kerja Pelayanan Usaha

Tim Kerja Pelayanan Usaha bertanggung jawab atas 2 IKU yakni:

- ❖ Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (Rp. Juta)
- ❖ Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (persen)

Uraian Fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait permohonan pengusahaan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

- Melaksanakan analisis atas rencana kerja perusahaan (investasi) di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan publik terkait pelayanan usaha di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan pelayanan usaha di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan pelayanan usaha di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan tagihan pemanfaatan jasa/layanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

1.5. Aspek Strategis

Aspek strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dalam mendukung kebijakan pembangunan perikanan tangkap Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan Renstra DJPT adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan nelayan meningkat;
2. Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan;
3. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap sesuai ketentuan;
4. Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab;
5. Produksi perikanan tangkap meningkat;
6. Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik.

1.6. Sistematika Penyajian

Penyusunan LKj Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap selama kurun waktu Tahun 2024. Adapun kaitan dari sistematika penyajian LKj Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang LKj yang menjadi tanggungjawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja selama kurun waktu triwulan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan secara singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan pembahasan IKU sesuai *Balanced Scorecard* (BSC). Memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, yang diuraikan secara sistematis serta membandingkan data kinerja secara, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan juga akuntabilitas keuangan yang menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 2020-2024

Sesuai dengan visi pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni untuk mewujudkan Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera yang tertuang dalam Renstra DJPT Tahun 2020-2024, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran strategis yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, yaitu:

Visi

Dengan mempertimbangkan dan merupakan penjabaran visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka Visi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2020-2024 adalah **"Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan terpadu"**

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan serta peluang perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, maka Misi yang diemban Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah:

1. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat pertumbuhan usaha perikanan;
2. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha;

4. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mencakup berbagai aspek, baik yang langsung dikelola oleh pelabuhan sendiri maupun dikelola oleh institusi/lembaga lain yang beraktfitas di dalam pelabuhan, sehingga penetapan visi tersebut dengan tujuan/harapan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan dalam memberikan pelayanan yang bermutu, menuju sasaran yang ingin dicapai dan menjadi acuan serta memberikan inspirasi dan motivasi kerja bagi organisasi. Dengan mengacu pada tujuan pembangunan perikanan tangkap, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan;
2. Meningkatnya kesejahteraan nelayan.

Sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dalam rangka peningkatan operasional pelabuhan, melalui pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terutama pembangunan sarana prasarana serta didukung dengan peningkatan kualitas aparatur Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tahun 2024.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal perikanan Tangkap Nomor 15 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, berikut adalah Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat;
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berdaya saing;
4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal;
5. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
6. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
7. Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan (Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap).

2.3. Target Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mendukung pembangunan perikanan tangkap secara terukur, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah menetapkan target-target Indikator Kinerja Utama yang merujuk pada Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Target indikator kinerja tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 15 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan rincian terdapat 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	3.153,73
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	26.652
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	85
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	33
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	30,10
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	650
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	11
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan (Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	80
		12 Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	94
		13 Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	84
		14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	80
		15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	80
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	93,76
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	71
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,30

Indikator Kinerja tersebut didukung oleh anggaran pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dengan PAGU efektif sebesar Rp. 23.537.844.000,- dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2024

NO	KEGIATAN	PAGU
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	40.500.000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	4.309.605.000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	8.000.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	128.215.000
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	19.051.524.000
TOTAL		23.537.844.000

2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator *output* dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya-upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi penetapan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai berikut.

Tabel 3. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN
1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	1 Pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan
2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	2 Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur

NO	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN
3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (persen)	3 Pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan
4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	4 Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan
		5 Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan
		6 Pelaksanaan tata kelola dan operasional SPDN di pelabuhan perikanan
		7 Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan
		8 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
		9 Pengadaan sarana perkantoran
		10 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	11 Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan
		12 Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)
		13 Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	14 Pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di UPT Pusat untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur
		15 Pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di PP Perintis untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur
		16 Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran
		17 Pengadaan Sarana penunjang operasional pelabuhan perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN
7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	18 Pelaksanaan pengembangan Pelabuhan Perikanan Terluar dan/atau berwawasan lingkungan
8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	19 Penyusunan norma/standar/prosedur/kriteria bidang kapal perikanan. (Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan/Pengukuran/Pengujian/Inspeksi Kapal Perikanan)
9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	20 Pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan. (Bimbingan Teknis untuk peningkatan kompetensi awak kapal perikanan/Nelayan)
		21 Fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan
10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	22 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	-
12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	23 Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		24 Gaji dan Tunjangan
		25 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap
		26 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
13	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (indeks)	27 Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai
14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	-
15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	-

NO	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN
16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	28 Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (nilai)	-
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	-

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pelaksanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dalam mendukung pembangunan perikanan diukur melalui 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan Indikator Kinerja tersebut, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap memperoleh rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 114,55% dan NPSS Tahun 2024 adalah sebesar 114,42%.

Adapun rincian tabulasi capaian kinerja masing-masing Sasaran Kegiatan dan indikator keberhasilannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	3.153,73	5.909,13	187,37
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	26.652	39.970,13	149,97
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (persen)	100	100	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	berdaya saing	4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84	93,42	111,21
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	85	95,66	112,54
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	33	36	109,09
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	30,10	94	312,29
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	650	1.034	159,08
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	11	11,87	107,91

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan (Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	80	86,59	108,24
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	80	100	125
		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	94	99,04	105,36
		13	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	84	92,88	110,57
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	80	96,29	120,36
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	80	90	112,50
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	93,76	97,82	104,33

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	71	90	126,76
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,30	91,94	104,12

Berdasarkan tabel diatas, seluruh IKU PPS Cilacap telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Berikut adalah analisa capaian indikator kinerja utama tersebut.

3.1.1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

IKU 1. Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Cilacap

Indikator Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang mulai berlaku pada tanggal 18 September 2021 serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan.

Kegiatan pelayanan jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah sebagai berikut:

- ❖ Pelayanan Jasa Tambat Labuh;
- ❖ Pelayanan Jasa Air;
- ❖ Pelayanan Jasa Cold Room dan Freezer;
- ❖ Pelayanan Jasa Kendaraan (Crane, Truck Refrigerator, Dump Truck dll);
- ❖ Pelayanan Jasa Alat (Gerobak, Penghancur Es, dll);
- ❖ Pelayanan Jasa Penggunaan Tanah dan/atau bangunan;
- ❖ Pelayanan Jasa Penumpukan Barang/Penjemuran jaring/ikan;
- ❖ Pelayanan Jasa Pas Masuk;
- ❖ Pelayanan Jasa Kebersihan Pelabuhan;
- ❖ Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana;
- ❖ Pelayanan Jasa Listrik;
- ❖ Pelayanan Jasa Dock.

Target dan realisasi Tahun 2024

Tabel 5. Target dan Realisasi IKU Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Cilacap terhadap target Tahun 2024

Nama IKU	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Cilacap (Rp.Juta)	3.153,73	5.909,13	187,37

Perbandingan dengan Tahun 2023

Tabel 6. Perbandingan Realisasi IKU Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Rp.Juta)	6.444,69	5.909,13	(8,31)

Perbandingan dengan Target Renstra

Tabel 7. Perbandingan Realisasi IKU Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Cilacap dengan target renstra

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Rp.Juta)	5.909,13	2.230	264,98

Perbandingan dengan unit kerja yang setara (PPS Kendari)

Tabel 8. Perbandingan Realisasi IKU Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Cilacap dengan PPS Kendari

Nama IKU	Realisasi PPS Cilacap	Realisasi PPS Kendari	Persentase Perbandingan (%)
Penerimaan PNBP Non SDA (Rp.Juta)	5.909,13	7.187,85	(17,79)

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau

pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Target Penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.153,73 Juta. IKU ini memiliki metode pengukuran tahunan. Pada Tahun 2024 ini, realisasi PNBPN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebesar Rp. 5.909,13 Juta.

Penerimaan PNBPN Non SDA PPS Cilacap terbesar masih berasal dari penerimaan tambat sebesar Rp. 3.316.925.559,- dan penerimaan terbesar kedua berasal dari Penerimaan Penggunaan Tanah dalam rangka tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan sesuai klaster yaitu sebesar Rp. 805.999.300,-.

Apabila dibandingkan dengan penerimaan PNBPN Tahun 2023, penerimaan PNBPN di Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,31%. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai PNBPN dari sektor penggunaan tanah dan bangunan dikarenakan pembayaran yang dilakukan dimuka sesuai jangka waktu perjanjian. Penurunan juga dikarenakan penggunaan tanah untuk pada penumpukan barang atau penjemuran jaring yang berkurang serta adanya perubahan mekanisme penggunaan unit pendingin kapasitas 100 ton berubah menjadi mekanisme pemanfaatan.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Tabel 9. Kegiatan yang menunjang capaian IKU

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian (%)
Pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan	372.251.000	350.596.291	94

3.1.2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat

IKU 2. Volume produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap

Indikator ini menunjukkan jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut yang didaratkan di PPS Cilacap dalam bentuk basah di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. IKU ini memiliki periode pengukuran triwulanan. Produksi perikanan tangkap dari Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dilaporkan secara berkala setiap bulan maupun secara harian.

Target dan realisasi Tahun 2024

Capaian realisasi volume produksi sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 39.970,13 ton dari target sebesar 26.652 ton, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Nama IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian (%)
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	26.652	39.970,13	149,97

Perbandingan dengan Tahun 2023

Tabel 11. Perbandingan Realisasi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	25.879,65	39.970,13	54,45

Perbandingan dengan target Renstra

Tabel 12. Perbandingan Realisasi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan target renstra

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	39.970,13	16.500	242,24

Realisasi indikator Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada Tahun 2024 mencapai 242,24% terhadap target yang ditetapkan pada Renstra PPS Cilacap.

Perbandingan dengan unit kerja yang setara (PPS Kendari)

Tabel 13. Perbandingan Realisasi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap PPS Cilacap dengan PPS Kendari

Nama IKU	Realisasi PPS Cilacap	Realisasi PPS Kendari	Persentase Perbandingan (%)
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan (ton)	39.970,13	16.812,73	137,74

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Volume produksi didapat dari jenis ikan dominan yakni tuna, cakalang, cumi. Pada triwulan IV Tahun 2024, terjadi peningkatan volume pendaratan ikan perkapal.

Jika dibandingkan dengan volume produksi pada Tahun 2023, terjadi peningkatan volume produksi yang sangat signifikan. Hal tersebut karena adanya penambahan jumlah armada baru sekitar 100 unit yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPS Ciacap karena daerah penangkapannya lebih dekat dengan PPS Cilacap.

 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Tabel 14. Kegiatan yang menunjang capaian IKU

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian (%)
Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur	83.340.000	77.599.875	93

3.1.3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berdaya saing

IKU 3. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan. Fungsi perusahaan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar pungutan perikanan di Pelabuhan Perikanan, bahwa prosedur jasa penggunaan tanah dan bangunan diantaranya penerimaan penggunaan tanah dan/atau bangunan, Petugas Jasa Penggunaan Tanah dan Bangunan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian pengajuan permohonan, kelengkapan persyaratan administrasi dan analisa proposal yang diajukan oleh pemohon serta mempertimbangkan ketersediaan tanah dan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.

Target dan realisasi Tahun 2024

Capaian realisasi Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi sebesar 100% sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi

Nama IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian (%)
Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (persen)	100	100	100

Perbandingan dengan Tahun 2023

Tabel 16. Perbandingan Realisasi IKU Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turunan (%)
Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (persen)	100	100	-

Perbandingan dengan target Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra.

Perbandingan dengan unit kerja yang setara (PPS Kendari)

Tabel 17. Perbandingan Realisasi IKU Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi PPS Cilacap dengan PPS Kendari

Nama IKU	Realisasi PPS Cilacap	Realisasi PPS Kendari	Persentase Perbandingan (%)
Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (persen)	100	100	0

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Setiap Permohonan penggunaan tanah dan bangunan di pelabuhan perikanan, akan diverifikasi terhadap kesesuaian pengajuan permohonan, kelengkapan persyaratan administrasi dan analisa kelayakan usaha serta mempertimbangkan ketersediaan tanah dan kesesuaian dengan rencana induk Pelabuhan perikanan.

Permohonan ini terdiri dari permohonan 2 skema pengelolaan Barang Milik Negara, yaitu penggunaan tanah dan/atau bangunan dan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. Permohonan ini tinggi dikarenakan skema penggunaan tanah dan/atau bangunan ada beberapa lokasi yang memang hanya diberikan masa berlaku penggunaannya 1 tahun sehingga setiap tahun harus dilakukan permohonan kembali jika masih berminat untuk menggunakannya kembali. Untuk skema pemanfaatan tanah dan atau bangunan baru mulai diberlakukan sesuai surat edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 29 Juli 2024 “Penerapan Pemanfaatan BMN Cara Sewa Terhadap Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Gedung Bangunan di Pelabuhan Perikanan”.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Tabel 18. Kegiatan yang menunjang capaian IKU

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian (%)
Rekomendasi dan atau Evaluasi Penggunaan Tanah dan Bangunan	25.740.000	25.685.000	100

IKU 4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Indikator kinerja ini merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

Target dan realisasi Tahun 2024

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84	93,42	111,21

Perbandingan dengan Tahun 2023

Tabel 20. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	89,06	93,42	4,90

Perbandingan dengan target Renstra

Tabel 21. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan target renstra

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	93,42	84	111,21

Realisasi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra sudah mencapai 111,21 %.

Perbandingan dengan unit kerja yang setara (PPS Kendari)

Tabel 22. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kinerja PPS Cilacap dengan PPS Kendari

Nama IKU	Realisasi PPS Cilacap	Realisasi PPS Kendari	Persentase Perbandingan (%)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (Nilai)	93,42	96,58	(3,16)

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian Indikator Tingkat Kinerja Pelabuhan pada Triwulan IV tercapai sebesar 93,42 atau katagori kinerja sangat baik. Indikator Tingkat Operasional Pelabuhan diperoleh dari perolehan nilai EVKIN dimana terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) komponen penilaian. Capaian nilai tersebut dipengaruhi oleh optimalnya komponen penilaian yang terdiri dari frekuensi kunjungan kapal, volume produksi, layanan tambat labuh dan penambahan jumlah investor.

Namun demikian, masih terdapat komponen yang belum maksimal yakni kriteria STBLK Kedatangan, kegiatan sosialisasi dan bimtek, fasilitasi penyuluhan, serta penyerapan tenaga kerja.

Jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2023, capaian pada Triwulan IV Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,90 %.Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya frekuensi kunjungan kapal, volume produksi, layanan tambat labuh dan penambahan jumlah investor.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Tabel 23. Kegiatan yang menunjang capaian IKU

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian (%)
Pengelolaan Dan Operasional Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Dan Inspeksi Pembongkaran Ikan Di Pelabuhan Perikanan	41,000,000	40,390,948	99
PELAKSANAAN PELAYANAN SCPIB	26,520,000	26,455,000	100
Gerakan Bersih Pantai	58,700,000	58,656,900	100
OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN	446,153,000	445,675,767	100
Pelatihan Pemadaman Kebakaran Bagi Tim Internal PPS Cilacap	20,445,000	17,035,650	83
OPERASIONAL TPI HIGIENIS	11,970,000	11,787,500	98
Pelaksanaan Tata Kelola Lingkungan Di Pelabuhan Perikanan	36,000,000	35,712,829	99
Koordinasi Pembahasan Status Aset BMN	29,000,000	29,000,000	100
Rapat Evaluasi Dalam Rangka Implementasi EPIT Dan PNBP Pasca Produksi	36,505,000	34,445,000	94
Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Rangka Mendukung Implementasi EPIT Dan PNBP Pasca Produksi	335,077,000	335,061,100	100
Sosialisasi/Peningkatan Kualitas Terkait Penerapan Budaya Pelayanan Prima Bagi Petugas PTSA	9,735,000	9,735,000	100
Pelaksanaan K5 Di Pelabuhan Perikanan CIKIDANG	64,921,000	59,808,763	92
Pelaksanaan Pengamanan Terpadu Dalam Rangka Mendukung K5 Di PP Cikidang	23,100,000	21,000,000	91
Sosialisasi Tata Kelola BBM Industri Dan PSO Dalam Rangka Mendukung Kebijakan PIT	31,625,000	31,610,000	100

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian (%)
Pelaksanaan ISO 9001:2015 Dan ISO14001:2015	40,000,000	38,300,000	96
Pelaksanaan Pengamanan Terpadu PNBP Pascaproduksi Di PPS Cilacap	60,300,000	60,300,000	100
Peningkatan Kapasitas SDM PP Cikidang Dalam Rangka Mendukung Implementasi EPIT Dan PNBP Pasca Produksi	38,148,000	38,143,500	100
Gerakan Bersih Pantai Di Cikidang	15,200,000	13,980,000	92
PEMBINAAN OPERATOR PIPP BAGI PP BINAAN	13,099,000	13,098,502	100
Video Profil Pelabuhan	70,000,000	69,800,000	100
Penyusunan Laporan Tahunan Operasional Pelabuhan Perikanan	10,000,000	9,960,000	100
Pameran/Promosi Pelabuhan Perikanan/Publikasi	22,400,000	22,250,000	99
Pelaksanaan Tata Kelola Dan Operasional PIPP Di Pelabuhan Perikanan Cikidang	40,637,000	36,977,731	91
DUKUNGAN PENGELOLAAN PUSAT INFORMASI PELABUHAN PERIKANAN	176,800,000	170,591,794	96
Koordinasi Lintas Sektor Monitoring Dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Atap	5,849,000	5,849,000	100
EVALUASI PEMBINAAN PELABUHAN PERIKANAN BINAAN	10,001,000	9,600,000	96
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	3,806,234,000	3,772,159,939	99
Langganan Daya Dan Jasa	1,303,522,000	1,303,484,910	100
Pemeliharaan Kantor	1,197,099,000	1,186,676,300	99
Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	164,970,000	164,970,000	100
Pengadaan Sarana Penunjang Perkantoran	321,014,000	316,624,800	99
Pengadaan Peralatan Pengolah Data Dan Komunikasi	393,996,000	390,978,000	99

IKU 5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang menunjukkan jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan, jumlah Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) yang diterbitkan dan jumlah Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Target dan realisasi Tahun 2024

Tabel 24. Target dan Realisasi IKU Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	85	95,66	112,54

Capaian Indikator ini dipengaruhi oleh adanya penambahan jumlah kapal yang beraktifitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada tahun 2023, sehingga meningkatkan jumlah penerbitan Persetujuan Berlayar, Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) dan juga Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).

Perbandingan dengan Tahun 2023

Tabel 25. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPS Cilacap (persen)	93,11	95,66	2,74

Perbandingan dengan target Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra

Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari)

Tabel 26. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPS Cilacap dengan PPS Kendari

Nama IKU	Realisasi PPS Cilacap	Realisasi PPS Kendari	Persentase Perbandingan (%)
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera (persen)	95,66	87,64	9,15

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian kinerja Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sudah Optimal bahkan cenderung melebihi target yang telah di tetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja organisasi. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dapat optimal khususnya Lembar Awal (LA) karena peningkatan kepatuhan kapal dengan skema Pasca produksi.

Pelaksanaan pelayanan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan akan dilakukan peningkatan dengan melakukan penerbitkan SHTI Lembar Turunan yang tentu akan mendorong (melakukan sosialisasi dan asistensi) UPI di sekitar PPSC agar dapat secara langsung melakukan kegiatan Ekspor ke EU dan/atau Negara ketiga.

 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Tabel 27. Kegiatan yang menunjang capaian IKU

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian (%)
Pengelolaan dan Operasional Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan	16,000,000	15,872,900	99
Pelaksanaan Fasilitasi Pendanaan Usaha Nelayan melalui Pojok Pendanaan Nelayan	6,000,000	6,000,000	100
Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran	22,250,000	22,247,873	100
Operasional Kesyahbandaran di wilayah Binaan	14,600,000	14,597,203	100
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PNPB Pasca Produksi	29,172,000	28,485,140	98
Kesyahbandaran dalam rangka penanganan kebakaran, keselamatan dan keamanan kapal di Pelabuhan Perikanan	35,685,000	35,620,750	100
Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran PP CIKIDANG Guna Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi	42,250,000	41,806,822	99
Operasional Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sesuai SK.Dirjen di PP CIKIDANG Guna Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi	15,730,000	12,190,000	77

3.1.4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal

IKU 6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan demikian, indikator ini diukur dengan menunjukkan presentase perbandingan antara pengembangan fasilitas dengan masterplan pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 28. Target dan Realisasi Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	33	36	109,09

Perbandingan dengan Tahun 2023

Tabel 29. Perbandingan Realisasi IKU Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	36	36	-

Perbandingan dengan Target Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra

Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari)

Tabel 30. Perbandingan Realisasi IKU Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPS Cilacap dengan PPS Kendari

Nama IKU	Realisasi PPS Cilacap	Realisasi PPS Kendari	Persentase Perbandingan (%)
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera (persen)	36	93	(61,29)

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Realisasi hasil penilaian presentase pengendalian pembangunan sebesar 36% dari target 33% dengan tingkat capaian 109,09%, hasil tersebut dipengaruhi oleh hasil penyusunan target yang realistis berdasarkan analisis data yang akurat dengan mempertimbangkan sesuai arah kebijakan pemerintah.

 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Tabel 31. Kegiatan yang menunjang capaian IKU

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian (%)
Dukungan Pelaksanaan Proyek Eco Fishing Port (Lender AFD) di PPS Cilacap	75,600,000	75,600,000	100
Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Permanen (kantor lama)	213,790,000	210,954,000	99
Review Masterplan PPS Cilacap	95,880,000	95,515,000	100
TANPA SUB KOMPONEN	570,500,000	570,500,000	100
Pengadaan Sarana Penunjang Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	622,239,000	610,500,000	98
Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Pelayanan untuk Kelompok Rentan)	200,000,000	198,502,000	99

IKU 7. Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.

Dalam mendukung hal tersebut, dilakukan melalui penggunaan aplikasi SELARASKAN. Aplikasi tersebut merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan

perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di *update* berkala dan dicantumkan dalam bentuk score Pelabuhan.

 Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 32. Target dan Realisasi Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	30,10	94	312,29

Realisasi penilaian selaraskan sampai akhir tahun 2024 adalah 94 dengan katagori sangat baik.

 Perbandingan dengan Tahun 2023

Tabel 33. Perbandingan Realisasi IKU Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	65,95	94	42,53

 Perbandingan dengan Target Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra

Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari)

Tabel 34. Perbandingan Realisasi IKU Nilai pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap dengan PPS Kendari

Nama IKU	Realisasi PPS Cilacap	Realisasi PPS Kendari	Persentase Perbandingan (%)
Nilai pengendalian Lingkungan di PPS (persen)	94	93,78	0,23

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Realisasi penilaian selaraskan pada Tahun 2024 tercapai sebesar 312,29 dengan katagori SANGAT BAIK karena sebagian besar dokumen dan evidance dapat dilengkapi serta memenuhi kriteria.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Tabel 35. Kegiatan yang menunjang capaian IKU

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian (%)
Sosialisasi Pelaksanaan Proyek Eco Fishing Port di PPS Cilacap	67,400,000	64,883,689	96
Pemantauan RKL dan RPL	94,600,000	93,600,000	99

3.1.5. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

IKU 8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Perhitungan IKU ini dilakukan dengan menghitung jumlah dokumen kapal perikanan diantaranya surat ukur kapal perikanan dan/atau SKKP yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 36. Target dan Realisasi IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	650	1.034	159,08

Jumlah SKKP yang dikeluarkan oleh PPS Cilacap sesuai dengan permohonan dari pelaku usaha penangkapan ikan melalui mekanisme penerbitan dan pembaharuan berdasarkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.578/MEN-KPA/VII/2022 tentang Penerbitan & Pembaharuan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (Masa Transisi).

Pelaksanaan penerbitan Surat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa setiap kapal perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan.

Perbandingan dengan Tahun 2023

Tabel 37. Perbandingan Realisasi IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turunan (%)
Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	600	1.034	72,33

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023, jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap naik sebesar 72,33%.

Perbandingan dengan Target Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari)

Tabel 38. Perbandingan Realisasi IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan di PPS Cilacap dengan PPS Kendari

Nama IKU	Realisasi PPS Cilacap	Realisasi PPS Kendari	Persentase Perbandingan (%)
Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	1.034	2.283	(54,71)

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Jumlah SKKP yang diterbitkan oleh PPSC sesuai dengan permohonan dari pelaku usaha penangkapan ikan dalam kurun waktu bulan Januari s/d Desember 2024 berjumlah 434 sertifikat dimana pada tahun 2023 telah diterbitkan 600 sertifikat sehingga jumlah total penerbitan menjadi 1.034 sertifikat. Pelaksanaan kegiatan dimaksud merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa setiap kapal perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan.

Capaian kinerja pelaksanaan Penerbitan SKKP pada kapal Ijin Daerah sudah optimal dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan melakukan identifikasi SKKP kapal Ijin Daerah yang akan berahir di akhir tahun 2024.

 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Tabel 39. Kegiatan yang menunjang capaian IKU

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian (%)
Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan/Pengukuran/Pengujian/Inspeksi Kapal Perikanan	22,000,000	21,686,727	99

3.1.6. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

IKU 9. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan persentase kapal perikanan yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal perikanan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan.

 Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 40. Target dan Realisasi Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	11	11,87	107,91

Perbandingan dengan Tahun 2023

Tabel 41. Perbandingan Realisasi IKU Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	10,98	11,87	8,11

Perbandingan dengan Target Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra

Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari)

Tabel 42. Perbandingan Realisasi IKU Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan PPS Cilacap dengan PPS Kendari

Nama IKU	Realisasi PPS Cilacap	Realisasi PPS Kendari	Persentase Perbandingan (%)
Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	11,87	76,40	(84,46)

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian kinerja Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan telah melampaui target. Telah dilakukan koordinasi dengan BPPSDMKP (Puslat KP) untuk melaksanakan percepatan dan/atau pelayanan dokumen/sertifikat kompetensi/keahlian AKP

yang dilakukan dengan cara jemput bola ke sentra/Pelabuhan Perikanan dimana tempat beraktifitasnya sebagian besar Nelayan/AKP serta melakukan percepatan pelayanan Buku Pelaut Perikanan (BPP).

 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Tabel 43. Kegiatan yang menunjang capaian IKU

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian (%)
Bimbingan Teknis untuk peningkatan kompetensi awak kapal perikanan/Nelayan	13,000,000	12,986,000	100

3.1.7. Tata kelola Pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

IKU 10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan percepatan pencapaian sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka saat ini capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK menjadi salah satu indikator kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024. Indikator ini dinilai berdasarkan hasil penjumlahan nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada komponen pengungkit dan komponen hasil yang dihitung secara tahunan dan dilakukan secara mandiri.

Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 44. Target dan Realisasi Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (nilai)	80	86,59	108,24

Capaian IKU Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap diperoleh dari hasil Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Tim Penilai internal PPS Cilacap dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 45. Hasil Perhitungan Penilaian Mandiri Pembangunan ZI PPS Cilacap

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS TAHUN 2024 WBK

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Nilai Minimum
A. PENGUNGKIT		60,00					
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,11	4,42	7,53	94,18%	OK
	2. PENATAAN TATALAKSANA	7,00	2,68	2,34	5,02	71,67%	OK
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	4,26	4,25	8,51	85,06%	OK
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	3,74	5,00	8,74	87,35%	OK
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	4,78	6,88	11,66	77,70%	OK
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	4,70	3,51	8,21	82,08%	OK
TOTAL PENGUNGKIT					49,66	82,76%	OK
B. HASIL		40,00					
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22,50			21,06	93,58%	OK
	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal :	17,50			16,06	91,75%	OK
	b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja	5,00			5,00	100,00%	OK
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17,50			15,88	90,75%	
	- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal :	17,50			15,88	90,75%	OK
TOTAL HASIL					36,94	92,34%	
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS					86,59		OK

Perbandingan dengan Tahun 2023

Tabel 46. Perbandingan Realisasi IKU Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (nilai)	86,09	86,59	0,58

Perbandingan dengan Target Renstra

Tabel 47. Perbandingan Realisasi IKU Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan target renstra

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (nilai)	86,59	75	115,45

Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari)

Tabel 48. Perbandingan Realisasi IKU IKU Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan PPS Kendari

Nama IKU	Realisasi PPS Cilacap	Realisasi PPS Kendari	Persentase Perbandingan (%)
Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera (nilai)	86,59	83,37	3,86

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian Tahun 2024, PPSCilacap mendapatkan realiasi nilai 86,59 atau capaian 108,24% dari target tahun 2024 dikarenakan di tahun 2024 PPS diusulkan lagi oleh Inspektorat 5 untuk mengikuti Penilaian Nasional (Menpan RB) sehingga pendampingan dilakukan secara intensif oleh tim pendamping internal. Pada tahun 2024 ini, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tingkat Nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang penganugerahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2024 di Jakarta.

Adapun Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU yaitu terdapat beberapa penilaian yang mengharuskan inovasi dan pengembangannya sehingga membutuhkan lebih banyak lagi inovasi dalam pencapaiannya. Saran dan masukan untuk perbaikan ke depan adalah

melaksanakan peningkatan kompetensi dan integritas pada setiap pegawai serta meninisiasi beberapa inovasi yang menunjang kemudahan dalam pelayanan publik.

 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Tabel 49. Kegiatan yang menunjang capaian IKU

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian (%)
Forum Konsultasi Publik dan KPI	32,310,000	28,045,170	87

IKU 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)

Indikator ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

 Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 50. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	80	100	125

Perbandingan dengan Tahun 2023

Tabel 51. Perbandingan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	100	100	-

Perbandingan dengan Target Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra

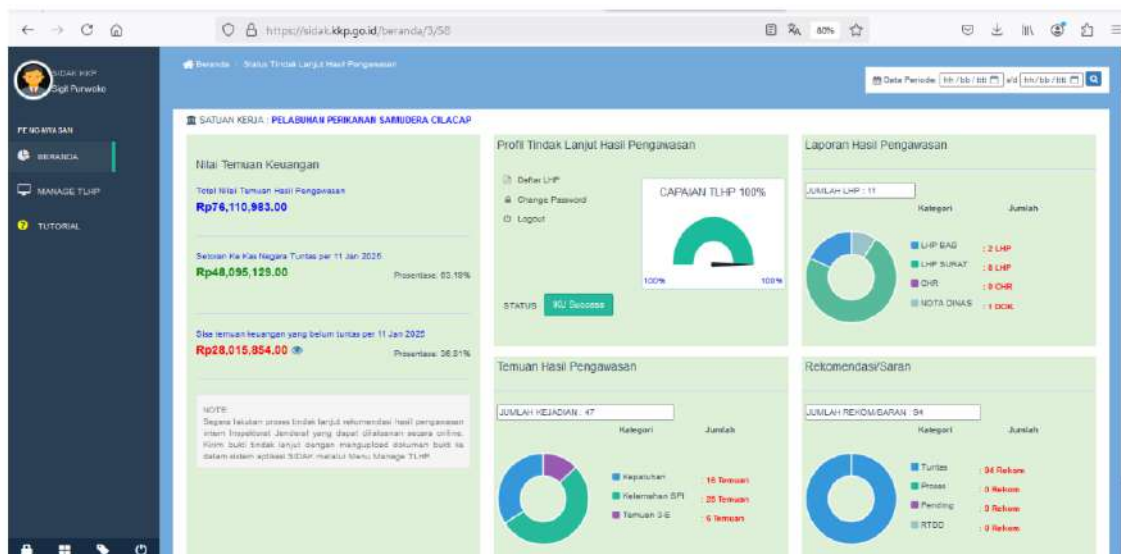
Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari)

Tabel 52. Perbandingan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan PPS Kendari

Nama IKU	Realisasi PPS Cilacap	Realisasi PPS Kendari	Persentase Perbandingan (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (persen)	100	100	0

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebesar 100%. Seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP, seluruhnya telah ditindaklanjuti berdasarkan aplikasi SIDAK KKP sebagaimana pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Screenshot Aplikasi SIDAK

IKU 12. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Indikator ini diukur melalui Rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk Meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, Menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan Sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek Kepatuhan (Bobot 25%), Aspek Kesesuaian (Bobot 25%), Aspek Ketercapaian (Bobot 30%), dan Aspek Ketepatan (20%).

Perhitungan indikator ini dilakukan berdasarkan hasil penilaian atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator tahunan dengan kegiatan yang dilakukan oleh DJPT sebagai berikut:

Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 53. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	94	99,04	105,36

Capaian nilai rekonsiliasi kinerja ini terdiri dari beberapa aspek yakni aspek kepatuhan dengan nilai 100, aspek kesesuaian 100, aspek ketercapaian sebesar 116,16, dan aspek ketepatan sebesar 100.

Perbandingan dengan Tahun 2023

Tabel 54. Perbandingan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	96,70	99,04	2,42

Perbandingan dengan Target Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra

Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari)

Tabel 55. Perbandingan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan PPS Kendari

Nama IKU	Realisasi PPS Cilacap	Realisasi PPS Kendari	Persentase Perbandingan (%)
Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (Nilai)	99,04	98,92	0,12

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian nilai rekonsiliasi kinerja ini telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor. B.5702/DJPT.1/RC.610/XI/2024 tanggal 29 ovember 2024 hal Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Kinerja Ligkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya, capaian indikator Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini mengalami kenaikan sebesar 2,42% dari pada capaian Tahun 2023.

Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dikarenakan dikarenakan 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek Kepatuhan (Bobot 25%), Aspek Kesesuaian (Bobot 25%), Aspek Ketercapaian (Bobot 30%), dan Aspek Ketepatan (20%) terpenuhi dengan baik.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Tabel 56. Kegiatan yang menunjang capaian IKU

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian (%)
Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	16,000,000	14,707,663	91,92
Pembayaran gaji dan tunjangan	8,355,539,000	8,355,332,831	99,99

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian (%)
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PPPK	2,537,270,000	2,536,074,150	99,95
Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	68,025,000	67,768,784	99,62
Laporan Program dan Kegiatan	39,200,000	39,169,898	99,92

IKU 13. IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (indeks)

Indikator kinerja indeks profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap merupakan indikator untuk mengukur kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : (1) Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3; (2) Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara; (3) Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja; (4) Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
- b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
- c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);

- d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
- e. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Angka capaian indikator kinerja ini diperoleh dan diukur oleh Biro SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dihitung secara tahunan.

Data IP ASN dapat diambil di dashboard pengukuran IP ASN KKP pada laman :

<http://www.ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/dashboard>.

Target dan realisasi Tahun 2024

Tabel 57. Target dan Realisasi IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (indeks)	84	92,88	110,57

Perbandingan dengan Tahun 2023

Tabel 58. Perbandingan Realisasi IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (indeks)	90,19	92,88	2,98

Perbandingan dengan target Renstra

Tabel 59. Perbandingan Realisasi IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan target renstra

Nama IKU	Realisasi 2024	Target Renstra	Persentase Perbandingan (%)
IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (indeks)	92,88	78	119,08

Realisasi indikator IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada Tahun 2024 mencapai 119,08% terhadap target yang ditetapkan pada Renstra PPS Cilacap.

 Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari)

Tabel 60. Perbandingan Realisasi IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan PPS Kendari

Nama IKU	Realisasi PPS Cilacap	Realisasi PPS Kendari	Persentase Perbandingan (%)
IP ASN PPS Cilacap (indeks)	92,88	90,78	2,31

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian IP ASN PPS Cilacap terjadi karena terpenuhinya dimensi dalam penghitungan IP ASN tersebut. Dimensi Kualifikasi, PPS Cilacap mendorong para pegawai untuk melanjutkan peningkatan jenjang pendidikan, sampai saat ini terdapat 2 orang yang sudah menyelesaikan pendidikan S2 dan 3 (tiga) pegawai diusulkan untuk tugas belajar baik jenjang S2 dan S1. Dimensi Kompetensi dilaksanakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya baik teknis, manajerial dan sosial kultural dengan bekerjasama dengan Balai Diklat Aparatur Sukamandi maupun lembaga dan Instansi lain. Dalam dimensi kompetensi ini telah semua pegawai memperoleh hasil maksimal dalam pengembangan kompetensinya. Dimensi Kinerja telah mendorong para pegawai agar mempunyai Sasaran Kerja Pegawai yang sejalan dengan Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan dan rata rata mendapatkan nilai Baik dan Sangat Baik. Dimensi Kedisiplinan pegawai dilaksanakan sosialisasi, pengawasan, penanaman integritas terkait kode etik pegawai dan kedisiplinan dan di akhir tahun mendapatkan penilaian maksimal. Disamping itu juga dikarekanakan mulai timbulnya kesadaran dalam mendapatkan kewajiban 20 JP serta seminar dalam setiap Tahun.

Anggaran. Selain itu pimpinan satker memberikan contoh dalam antusiasme mendapatkan pengembangan kompetensi lalu mengawal capaian individu setiap periode. Adanya gap waktu pengunggahan di myasn/siasn dengan penarikan data oleh Biro SDM Aparatur sehingga sering ada keterlambatan update nilainya. Kesalahan dalam penginputan kategori diklat, terkadang masih ada pencantuman kategori diklat yang belum tepat, webinar erinput sebagai bimbingan teknis. Saran dan perbaikan kedepan yaitu perlunya ilakukan sosialisasi lagi dalam cara penginputan di myasn/siasn serta koordinasi dengan pemangku aplikasi kepegawaian sehingga tidak ada kesalahan dan data yg ada di MyASN bisa ditarik sempurna oleh Biro SDMAO KKP. Selain itu juga perlu koordinasi dengan Eselon I untuk dapat menghadirkan rangkaian diklat yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) setiap Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu hingga Jabatan Struktural.



Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Tabel 61. Kegiatan yang menunjang capaian IKU

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian (%)
Dukungan Pengembangan, pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional	30,000,000	29,996,000	99,98

IKU 14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sesuai ketentuan yang berlaku. Perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun dengan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Ketersediaan Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon I dengan mendapatkan nilai 10,00;
2. Perencanaan dan persiapan pengadaan dengan mendapatkan nilai 15,00;
3. Presentase pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE dengan mendapatkan nilai 10,00;
4. Keseuaian Tahap Pelaksanaan dengan mendapatkan nilai 41,29;
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ dengan mendapatkan nilai 5,00;
6. Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan Barang/Jasa lingkup Eselon I Triwulan I s/d Triwulan III Tahun 2024 dengan mendapatkan nilai 15,00.

Target dan realisasi Tahun 2024

Tabel 62. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Cilacap (persen)	80	96,29	120,36

Perbandingan dengan Tahun 2023

Tabel 63. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen) Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Cilacap (persen)	100	96,29	(3,71)

Perbandingan dengan target Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra

Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari)

Tabel 64. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Cilacap dengan PPS Kendari

Nama IKU	Realisasi PPS Cilacap	Realisasi PPS Kendari	Persentase Perbandingan (%)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Cilacap (persen)	96,29	96,29	0

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal, tingkat kepatuhan PBJ Inggup KKP mencapai nilai rata-rata sebesar 86,59% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%, namun pencapaian di Tahun 2024 lebih rendah dari pencapaian tahun 2023 dikarenakan ada beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian IKU dimaksud pada tahun sebelumnya diantaranya:

1. Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
2. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa paling lambat pada Triwulan I tahun berjalan;
3. Menyiapkan dokumen tender (KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak) pengadaan barang dan jasa dengan kontrak/Surat Perjanjian sejak periode akhir tahun anggaran sebelumnya (T-1) sehingga paket pengadaan barang dan jasa dapat segera dikontrakkan pada kesempatan pertama;
4. Menyelesaikan kontrak/surat perjanjian PBJ tepat waktu;
5. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan pengadaan barang/jasa.

IKU 15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup PPS Cilacap

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Satker PPS Cilacap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun dengan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021 (10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga Triwulan III tahun 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2018-2020 (20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2021 di dukung BAST/berita Acara Pemakaian (25%);
5. Penyusunan laporan BMN (semesteran & tahunan) secara tepat waktu (20%).

Target dan realisasi Tahun 2024

Tabel 65. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup PPS Cilacap

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup PPS Cilacap (persen)	80	90	112,50

Perbandingan dengan Tahun 2023

Tabel 66. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup PPS Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup PPS Cilacap (persen)	95	90	(5,26)

Perbandingan dengan target Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra

Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari)

Tabel 67. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup PPS Cilacap dengan PPS Kendari

Nama IKU	Realisasi PPS Cilacap	Realisasi PPS Kendari	Persentase Perbandingan (%)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN (persen)	90	90	0

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal, tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup KP mencapai mencapai nilai rata-rata sebesar 93,78%, namun pencapaian di Tahun 2024 lebih rendah dari pencapaian tahun 2023 dikarenakan ada beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian IKU dimaksud pada tahun sebelumnya diantaranya:

1. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;

2. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) pada Unit Eselon I lingkup KKP;
3. Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
4. Penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat pada Unit Eselon I lingkup KKP;
5. Tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian pada Unit Eselon I lingkup KKP;
6. Penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu pada Unit Eselon I lingkup KKP.

IKU 16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi Penyampaian SPM, Penyerpan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Pengembalian/Kesalahan SPM, dan Perencanaan Kas. IKU ini memiliki periode pengukuran semesteran.

Target dan realisasi Tahun 2024

Tabel 68. Target dan Realisasi IKU Nilai IKPA PPS Cilacap

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (nilai)	93,76	97,82	104,33

Perbandingan dengan Tahun 2023

Tabel 69. Perbandingan Realisasi IKU Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (nilai)	93,31	97,82	4,83

Perbandingan dengan target Renstra

Tabel 70. Perbandingan Realisasi IKU Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan target renstra

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (nilai)	97,82	90	108,69

Realisasi indikator Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada Tahun 2024 mencapai 108,69% terhadap target yang ditetapkan pada Renstra PPS Cilacap.

Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari)

Tabel 71. Perbandingan Realisasi IKU Nilai IKPA PPS Cilacap dengan PPS Kendari

Nama IKU	Realisasi PPS Cilacap	Realisasi PPS Kendari	Persentase Perbandingan (%)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (nilai)	97,82	96,19	1,69

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Sehubungan dengan ditetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 terjadi Reformasi Perhitungan Nilai IKPA berdasar PER-5/PB/2024, dimana terdapat perubahan tata cara perhitungan per indikatornya. Adapun perubahan masing-masing indikator antara lain Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output. Masing masing indikator tersebut diejawantahkan dan saling terkait dalam perolehan nilai IKPA Tahun 2024.

Capaian Tahun 2024, PPS Cilacap mendapatkan realiasi nilai 97,82 atau capaian 104,33 dari target tahun 2024 dikarenakan dari penilaian IKPA yang meliputi 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja, yaitu: Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 2 indikator: (1) Revisi IPA dan (2) Deviasi Halaman III DIPA dengan capaian nilai aspek sebesar 94,91; Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 5 indikator: (1) Penyerapan Anggaran, (2) Belanja Kontraktual, (3) Penyelesaian Tagihan, (4) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP); dan (5) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) dengan capaian nilai aspek sebesar 99,16; serta Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan 1 indikator: (1) Capaian Output dengan capaian nilai aspek sebesar 100.

Pada Tahun 2024 realisasi penyerapan adalah sebesar Rp. 22.522.669.505,- yang terdiri dari belanja pegawai (51) sebesar Rp. 10.891.405.399; belanja barang (52) dengan realisasi sebesar Rp. 9.309.524.413,- serta Belanja Modal (53) dengan realisasi sebesar Rp. 2.298.058.800,-. Indikator lainnya antara lain pengelolaan UP dan TUP dan indikator lainnya bisa mendapatkan nilai maksimal. Dari hasil penilaian IKPA masih terdapat Nilai indikator deviasi halaman III DIPA masih belum optimal yaitu sebesar 13.47 dari bobot sebesar 15, sehingga mempengaruhi nilai capaian Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran. Saran masukan untuk perbaikan ke depan adalah guna meningkatkan capaian Nilai IKPA ke depan masih perlu ditingkatkan melalui konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran sesuai dengan RPD yang ditetapkan sebagaimana pada halaman III DIPA serta melakukan pemutakhiran lembar III DIPA paling lambat hari ke sepuluh setiap triwulan berikutnya.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Tabel 72. Kegiatan yang menunjang capaian IKU

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian (%)
Laporan Keuangan dan BMN	35,550,000	35,174,779	99
Sosialisasi Ketentuan dan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan BMN	48,725,000	44,477,027	91

IKU 17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2023 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, PMK No. 62 Tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, KMK No. 466 Tahun 2023 Pedoman Teknis Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran dengan komponen penilaian :

1. Variabel Efektifitas yang Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Variabel Efisiensi dimana Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi: a. Penggunaan SBK; dan/atau b. Efisiensi SBK.

Target dan realisasi Tahun 2024

Tabel 73. Target dan Realisasi IKU Nilai NKPA PPS Cilacap

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Cilacap (nilai)	71	90	126,76

Perbandingan dengan Tahun 2023

Tidak dapat membandingkan dengan tahun sebelumnya karena IKU ini merupakan IKU baru.

Perbandingan dengan target Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra

Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari)

Tabel 74. Perbandingan Realisasi IKU Nilai NKPA PPS Cilacap dengan PPS Kendari

Nama IKU	Realisasi PPS Cilacap	Realisasi PPS Kendari	Persentase Perbandingan (%)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera (nilai)	90	90	0

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian Tahun 2024, PPS Cilacap mendapatkan realiasi nilai 90 atau capaian 126,76% didapati dari hasil Capaian Variabel Efektifitas indikator Capaian RO sebesar 100, dan Capaian Variabel Efisiensi atas Indikator Penggunaan SBK sebesar 100 dan Indikator Efisiensi SBK 33,35. Sehingga perlu ada Penetapan SBKK oleh Eselon 1 untuk tahun Anggaran 2025.

IKU 18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Target dan realisasi Tahun 2024

Tabel 75. Target dan Realisasi IKU Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,30	91,94	104,12

Perbandingan dengan Tahun 2023

Tabel 76. Perbandingan capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	92,29	91,94	(1,34)



Perbandingan dengan target Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra

Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari)

Tabel 77. Perbandingan Realisasi IKU Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Cilacap dengan PPS Kendari

Nama IKU	Realisasi PPS Cilacap	Realisasi PPS Kendari	Persentase Perbandingan (%)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera (Nilai)	91,94	89,10	3,19

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Hasil SKM pada Tahun 2024 ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebesar 91,94 (kriteria A) dengan kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK. Indeks tersebut diperoleh dari pengolahan data sebanyak 71 responden dan 13 jenis pelayanan. Realisasi nilai SKM PPS Cilacap Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,34%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan terkait dengan mekanisme penggunaan tanah bangunan yang berubah menjadi pemanfaatan tanah/bangunan.

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa:

1. Seluruh unsur layanan mendapatkan nilai dengan mutu pelayanan kategori A (SANGAT BAIK);
2. Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah diantaranya adalah persyaratan layanan dan kesesuaian biaya mendapatkan nilai terendah meski masih dalam kategori SANGAT BAIK;
3. Unsur kemudahan fitur/kemampuan petugas menempati nilai tertinggi yaitu 3,69;
4. Jenis layanan dengan IKM paling tinggi yakni Pelayanan Penggunaan Transportasi dan Pelayanan Unit Pendingin.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Upaya yang dilakukan dalam menunjang tercapainya indikator ini adalah dengan membentuk Tim SKM melalui Surat Tugas yang ditetapkan oleh Kepala Pelabuhan Nomor B.5/PPSC/KP.440/I/2024 tentang Penunjukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap. Hal ini dilakukan untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SKM dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun Anggaran 2024 dengan PAGU efektif sebesar Rp. 22.669.690.000, yang terbagi dalam 5 (lima) kegiatan utama sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 22.522.669.505,- atau sebesar 99,35%.

3.3. Penggunaan Sumber Daya berdasarkan Sasaran Kegiatan

Target anggaran yang telah ditetapkan, direncanakan untuk menghasilkan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 78. Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) berdasarkan Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Target Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Capaian realisasi (%)	NPSS (%)	Efisiensi (%)
Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	372.251.000	350.596.291	94	120	26
Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	83.340.000	77.599.875	93	120	27

Sasaran Kegiatan	Target Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Capaian realisasi (%)	NPSS (%)	Efisiensi (%)
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berdaya saing	9.067.447.000	8.982.624.621	99	107,46	8,4
Pengembangan dan peningkatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal	1.940.009.000	1.920.054.689	98,97	113,45	14,48
Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	22.000.000	21.686.727	98,57	120	21
Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	13.000.000	12.986.000	99,89	107,91	8,02
Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	11.171.643.000	11.157.121.302	99,87	112,11	12,24

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum target Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 dapat terealisasi dengan rata-rata tingkat capaian sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebesar 114,42% dimana seluruh indikator kinerja dapat tercapai 100%.

Di dalam Laporan Kinerja Tahunan ini, juga menyajikan perbandingan Indikator Kinerja Utama Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Dalam perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa dari 18 IKU yang sama, PPS Cilacap berhasil unggul 8 IKU, lebih rendah 5 IKU dan memiliki capaian IKU sama besar pada 5 IKU.

4.2. Saran

Dengan tercapainya seluruh Indikator Kinerja Utama Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada Tahun 2024 ini, strategi pencapaian kinerja harus tetap dilakukan untuk tetap mempertahankan dan bahkan meningkatkan capaian kinerja. Strategi tersebut untuk mengantisipasi faktor-faktor baik internal maupun eksternal dalam upaya pencapaian indikator kinerja utama Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

4.3. Tindak Lanjut atas Saran di LKj Triwulan III Tahun 2024

1. Evaluasi rencana aksi yang dilakukan setiap Triwulan telah disepakati untuk memuat hal-hal yang lebih komprehensif mengenai kendala serta tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama;
2. Sosialisasi terus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai untuk dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian indikator kinerja utama. Selain itu juga dilakukan kuis yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pemahaman pegawai.

LAMPIRAN DATA DUKUNG

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

MEMORANDUM
NOMOR 32/PPSC/PI.310/I/2025

Yth : Kepala Pelabuhan
Dari : Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan
Hal : Data dukung capaian kinerja TW IV Tahun 2024
Lampiran : Dua Berkas
Tanggal : 10 Januari 2024

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024, terlampir kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan di Tim Kerja Operasional Pelabuhan dengan periode pengukuran triwulanan sebagai berikut:

1. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)
 - Merupakan indikator Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	26.652	39.970,13	149,97

Volume produksi didapat dari jenis ikan dominan yakni tuna, cakalang, cumi. Pada triwulan IV tahun 2024, terjadi peningkatan volume pendaratan ikan per kapal.

- Perbandingan dengan capaian pada Triwulan IV Tahun 2023:

IKU	REALISASI TW IV 2023	REALISASI TW IV 2024	NAIK/ TURUN (%)
Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	9.144.574	10.090.712	10,35

Jika dibandingkan dengan volume produksi pada TW IV tahun 2023, terjadi peningkatan volume produksi yang sangat signifikan. Hal tersebut karena adanya penambahan jumlah armada baru sekitar 100 unit yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPS Ciacap karena daerah penangkapannya lebih dekat dengan PPS Cilacap.

2. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

- Merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84	93,42	111,21

Capaian Indikator Tingkat Operasional Pelabuhan pada Triwulan IV tercapai sebesar 93,42 atau katagori kinerja sangat baik. Indikator Tingkat Operasional Pelabuhan diperoleh dari perolehan nilai EVKIN dimana terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) komponen penilaian. Capaian nilai tersebut dipengaruhi oleh optimalnya komponen penilaian yang terdiri dari frekuensi kunjungan kapal, volume produksi, layanan tambat labuh dan penambahan jumlah investor. Namun demikian, masih terdapat komponen yang belum maksimal yakni kriteria STBLK Kedatangan, kegiatan sosialisasi dan bimtek, fasilitasi penyuluhan, serta penyerapan tenaga kerja.

- Perbandingan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2023

NO	IKU	REALISASI TW IV 2023	REALISASI TW IV 2024	NAIK/ TURUN (%)
1	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	89,06	93,42	4,90

Jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2023, capaian pada Triwulan IV Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,90 %. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya frekuensi kunjungan kapal, volume produksi, layanan tambat labuh dan penambahan jumlah investor.

Terkait dengan capain IKU di atas, terlampir kami sampaikan data dukung kedua IKU tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih dan mohon arahan lebih lanjut.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yatim Kurniadi



**DATA DUKUNG IKU 2
VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI PELABUHAN
PERIKANAN SAMUDERA CILACAP (TRIWULAN IV)
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap antara pihak pertama, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan Pihak kedua, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 10 Januari 2024, sesuai dengan permen KP No.68/PERMEN-KP/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan hal tersebut maka untuk Tim Kerja Operasional Pelabuhan akan menyampaikan :

- a. Sasaran Program : Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- b. IKU 2 : Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton);
- c. Deskripsi : Merupakan indikator volume produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut dan produksi perikanan tangkap yang berasal dari perairan pedalaman yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- d. Formula perhitungan : Penjumlahan volume produksi perikanan di laut dan di perairan pedalaman yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- e. Data Dukung berupa : Rekapitulasi data jumlah produksi di PPS Cilacap.
- f. Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap terdiri dari ikan yang didaratkan dari kapal-kapal yang bongkar di PPS Cilacap maupun ikan yang berasal dari luar Cilacap yang diangkut ke PPS Cilacap dengan angkutan darat untuk dipasarkan ke konsumen di Cilacap.

2. Lokasi

Lokasi pendataan terkait data produksi adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

B. METODE KERJA DAN ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Metode Kerja

Pelaksanaan kegiatan pengambilan data produksi di lakukan dengan metode Sampling dan Sensus.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peralatan

Jumlah SDM yang ada dalam kegiatan pendataan produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap sebanyak 10 orang, untuk pendataan kapal > 5 GT sebanyak 8 orang dan untuk pendataan kapal < 5 GT sebanyak 1 orang. Dalam Kegiatan pendataan produksi, form yang digunakan sebagai alat bantu untuk pendataan di lapangan adalah form SL3;

3. HASIL KEGIATAN

Hasil Kegiatan Pendataan ini dilakukan proses pengolahan data, kemudian dituangkan dalam laporan harian, berupa laporan produksi harian, yang akan dibuat sebagai dasar laporan mingguan dan bulanan, dapat kita lihat data volume produksi sampai dengan triwulan IV, Sampai dengan bulan Desember 2024 yang didaratkan di Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap :

No	Bulan	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
1	Januari	3.159,61	52.613.525.000
2	Februari	2.098,38	37.456.810.000
3	Maret	1.998,14	36.469.275.000
4	April	2.173,25	37.442.789.000
5	Mei	2.396,56	43.106.840.000
6	Juni	6.209,10	108.083.211.000
7	Juli	3.195,30	61.659.394.000
8	Agustus	4.495,09	91.366.307.000
9	September	4.153,99	82.905.810.000
10	Oktober	4.548,52	107.100.364.000
11	November	3.241,40	76.204.535.000
12	Desember	2.300,79	53.994.138.000
	Jumlah	39.970,13	788.402.998.000

Perbandingan Volume dan Nilai Produksi hasil tangkapan ikan yang didaratkan antara tahun 2024 dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah. Dari tabel dapat dilihat bahwa untuk volume dan nilai produksi pada periode Triwulan IV tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari volume produksi

pada Triwulan IV tahun 2023. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan jumlah armada sekitar 100 armada baru yang mendaratkan hasil tangkapannya ke PPS Cilacap karena daerah penangkapannya lebih dekat dengan PPS Cilacap.

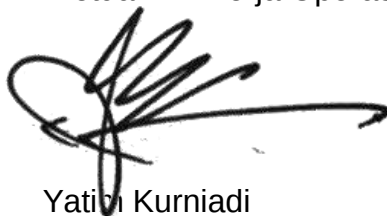
BULAN	VOLUME(Kg)		NILAI PRODUKSI (Rp)	
	2023	2024	2023	2024
OKTOBER	3.493.878	4.548.523	70.583.419.000	107.100.364.000
NOVEMBER	3.009.837	3.241.396	62.092.868.000	76.204.535.000
DESEMBER	2.640.859	2.300.793	46.468.539.000	53.994.138.000
JUMLAH	9.144.574	10.090.712	179.144.826.000	237.299.037.000

4. Jenis Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap antara lain adalah :

Cumi karet, cakalang, Tk. mata besar, lemadang, layur, madidihang, mata besar, albakora, meka, gindara, cucut selendang, setuhuk hitam, cucut lanjaman, cucut pahitan, cumi karet, kuwe, kakap merah, manyung, tumbuk, casper, cucut cakilan, selar dan cucut tikusan.

Demikian laporan data produksi dan nilai produksi yang dapat kami laporkan dan sebagai bahan kepentingan lebih lanjut.

An. Kepala Pelabuhan
Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan



Yati Kurniadi

NO	PELABUHAN PERIKANAN	TAHUN		TON
		2023	2024	
		VOLUME (Kg)	VOLUME (Kg)	
4	PPS CILACAP	25.879.653,50	39.970.134,00	39.970,13
JANUARI		790.413,00	3.159.614,00	3.159,61
FEBRUARI		535.412,00	2.098.375,00	2.098,38
MARET		1.083.653,00	1.998.137,00	1.998,14
APRIL		1.724.610,00	2.173.253,00	2.173,25
MEI		898.106,00	2.396.563,00	2.396,56
JUNI		2.839.634,00	6.209.098,00	6.209,10
JULI		2.699.410,00	3.195.304,00	3.195,30
AGUSTUS		2.902.602,50	4.495.091,00	4.495,09
SEPTEMBER		3.261.239,00	4.153.987,00	4.153,99
OKTOBER		3.493.878,00	4.548.523,00	4.548,52
NOPEMBER		3.009.837,00	3.241.396,00	3.241,40
DESEMBER		2.640.859,00	2.300.793,00	2.300,79
				-

NO	PELABUHAN PERIKANAN	TAHUN		Milyar
		2023	2024	
		NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	
4	PPS CILACAP	596.907.616.000	788.402.998.000	788,40
JANUARI		20.367.801.000	52.613.525.000	52,61
FEBRUARI		14.230.065.000	37.456.810.000	37,46
MARET		30.036.796.000	36.469.275.000	36,47
APRIL		47.593.924.000	37.442.789.000	37,44
MEI		22.852.666.000	43.106.840.000	43,11
JUNI		75.739.565.000	108.083.211.000	108,08
JULI		69.169.760.000	61.659.394.000	61,66
AGUSTUS		71.536.043.000	91.366.307.000	91,37
SEPTEMBER		66.236.170.000	82.905.810.000	82,91
OKTOBER		70.583.419.000	107.100.364.000	107,10
NOPEMBER		62.092.868.000	76.204.535.000	76,20
DESEMBER		46.468.539.000	53.994.138.000	53,99

DATA BULAN JANUARI 2024

Jenis Ikan	Volume	Nilai	Harga
Albakor	2.777,00	83.310.000	30.000
B. Hitam	184,00	7.360.000	40.000
B. Putih	40,00	7.200.000	180.000
Belo/selanget	10.285,00	30.855.000	3.000
Bilis	14.460,00	43.380.000	3.000
C. Cakilan	397,00	5.128.000	12.917
C. Depok	212,00	1.484.000	7.000
C. Lanjaman	2.343,00	33.567.000	14.327
C. Pahitan	2.635,00	31.942.000	12.122
C. Slendang	15.972,00	129.255.000	8.093
C. Tikusan	92,00	1.196.000	13.000
Cakalang	1.295.314,00	23.846.123.000	18.410
Casper	1.394,00	28.284.000	20.290
Cumi Karet	1.182.339,00	15.354.252.000	12.986
Gindara	6.138,00	122.977.000	20.035
Gogokan	75,00	2.100.000	28.000
Gulamah	15.324,00	229.860.000	15.000
Kembung	191,00	5.730.000	30.000
Kenyar	186,00	2.790.000	15.000
Kerong	1.961,00	58.830.000	30.000
Kuniran/ biji Nangka	204,00	2.448.000	12.000
Layang	2.157,00	29.948.000	13.884
Layaran	1.740,00	39.352.000	22.616
Layur	7.864,00	243.052.000	30.907
Lemadang	175.790,00	2.865.332.000	16.300
Lendra/lidah	1.923,00	48.075.000	25.000
Lidah	400,00	10.000.000	25.000
Lisong	38.014,00	278.748.000	7.333
Madidihang	48.918,00	1.476.921.000	30.192
Manyung	9.069,00	128.249.000	14.141
Mata Besar	47.877,00	1.318.550.000	27.540
Meka	12.067,00	439.535.000	36.425
Nomei	978,00	7.824.000	8.000
Opah	1.162,00	12.595.000	10.839
P. Plampangan	78,00	780.000	10.000
P. Tunggul	28,00	280.000	10.000
Pari Plampangan	65,00	650.000	10.000
Pihi	75,00	2.100.000	28.000

Rajungan	216,00	9.720.000	45.000
Setuhuk Hitam	2.043,00	67.410.000	32.996
Setuhuk Putih	333,00	9.990.000	30.000
Sunglir	1.345,00	21.210.000	15.770
Tenggiri	774,00	23.220.000	30.000
Teri	845,00	15.210.000	18.000
Tetengkek	372,00	5.208.000	14.000
Tigawaja	3.130,00	78.250.000	25.000
Tk. Madidihang	34.024,00	658.738.000	19.361
Tk. Mata Besar	215.617,00	4.237.749.000	19.654
Udang Barat	651,00	22.785.000	35.000
Udang Dogol	1.273,00	76.380.000	60.000
Udang Jerbung	2.120,00	445.200.000	210.000
Udang Krosok	5.110,00	178.850.000	35.000
Udang Rebon	3.757,00	75.140.000	20.000
	3.172.338,00	52.855.122.000	

DATA BULAN PEBRUARI 2024

Jenis Ikan	Volume	Nilai	Harga
Albakor	315	9.450.000	30.000
Alu Alu	5	75.000	15.000
B. Putih	384	69120000	180.000
Belo/selanget	2.357	7.071.000	3.000
Bilis	11.464	34.392.000	3.000
C. Cakilan	135	1.620.000	12.000
C. Lanjaman	549	7.406.000	13.490
C. Patilan	2.025	14.175.000	7.000
C. Slendang	5.571	44.568.000	8.000
Cakalang	1.313.703	23.658.092.000	18.009
Casper	19	380.000	20.000
Cumi Karet	273.914	3.511.370.000	12.819
Gindara	12.425	248.500.000	20.000
Gogokan	195	5.460.000	28.000
Gulamah	7.607	114.105.000	15.000
Kakap Hitam	65	1.625.000	25.000
Kakap Merah	75	3.375.000	45.000
Kembung	241	7.230.000,00	30.000
Kerong	573	17.190.000,00	30.000
Kuniran/ biji Nangka	354	4.248.000	12.000
Layang	40	560.000	14.000
Layaran	245	5.390.000	22.000
Layur	6.990	221.470.000	31.684
Lemadang	136.578	2.183.628.000	15.988
Lendra/lidah	3.119	77.975.000	25.000
Lidah	268	6.700.000	25.000
Lisong	32.904	230.328.000	7.000
Madidihang	106.017	3.074.493.000	29.000
Manyung	6.252	80.540.000	12.882
Mata Besar	11.803	311.058.000	26.354
Meka	833	28.894.000	34.687
Nomei	3.011	24.088.000	8.000
Opah	115	1.150.000	10.000
P. Gitar	120	840.000	7.000
P. Plampangan	325	3.250.000	10.000
P. Tunggul	140	1.400.000	10.000
Rajungan	981	53.955.000	55.000
Remang	65	1.300.000	20.000
Set. Hitam	55	1.760.000	32.000
Setuhuk Hitam	991	31.440.000	31.726

Setuhuk Putih	123	3690000	30.000
Sunglir	45	720.000	16.000
Tenggiri	847	25.410.000	30.000
Tigawaja	3.460	86.500.000	25.000
Tk. Madidihang	26.878	510.682.000	19.000
Tk. Mata Besar	111.698	2.122.262.000	19.000
Udang Barat	108	3.780.000	35.000
Udang Dogol	493	29.580.000	60.000
Udang Jerbung	1.257	263.970.000	210.000
Udang Krosok	6.519	228.165.000	35.000
Udang Rebon	4.119	82.380.000	20.000
	2.098.375	37.456.810.000	

DATA BULAN MARET 2024

Jenis Ikan	Volume	Nilai	Harga
Albakor	3.674	110.220.000	30.000
Alu Alu	4	80.000	20.000
Belo/selanget	5795	17385000	3.000
Bilis	7.363	22.089.000	3.000
C. Cakilan	1.408	19.600.000	13.920
C. Lanjaman	1.078	15.386.000	14.273
C. Pahitan	1.079	12.948.000	12.000
C. Slendang	690	5.762.000	8.351
C. Tikusan	462	5.544.000	12.000
Cakalang	1.337.141	23.339.636.000	17.455
Casper	25	500.000	20.000
Cumi Karet	181.776	2.434.388.000	13.392
Gabus Laut	43	516.000	12.000
Gindara	330	6.706.000	20.321
Gulamah	8.444	126.660.000	15.000
Kakatua	385	3.850.000	10.000
Kembung	145	4.350.000,00	30.000
Kerapu	60	3.000.000,00	50.000
Kerong	1.245	37.350.000	30.000
Kuniran/ biji Nangka	90	1.620.000	18.000
Kurisi	675	10.530.000	15.600
Layang	5.690	100.140.000	17.599
Layaran	559	12.298.000	22.000
Layur	10.883	346.920.000	31.877
Lemadang	99.499	1.591.984.000	16.000
Lendra/lidah	2420	60500000	25.000
Lidah	80	2.000.000	25.000
Lisong	1.660	12.025.000	7.244
Madidihang	135.375	3.908.586.000	28.872
Manyung	4.636	61.274.000	13.217
Mata Besar	32.482	846.209.000	26.052
Meka	3.508	112.122.000	31.962
Nomei	1.616	12.928.000	8.000
Opah	59	590.000	10.000
P. Plampangan	678	6.780.000	10.000
Rajungan	277	11.410.000	41.191
Remang	35	700.000	20.000
Selar	160	3.200.000	20.000
Setuhuk Hitam	3.154	99.526.000	31.555
Setuhuk Putih	173	4.980.000	28.786

Sunglir	175	3.060.000	17.486
Tenggiri	1.879	56.370.000	30.000
Tigawaja	3.046	76.150.000	25.000
Tk. Madidihang	41.772	793.668.000	19.000
Tk. Mata Besar	85.710	1.627.125.000	18.984
Udang Barat	316	11.060.000	35.000
Udang Dogol	705	42.300.000	60.000
Udang Jerbung	1.253	263.130.000	210.000
Udang Krosok	3.708	129.780.000	35.000
Udang Rebon	4.717	94.340.000	20.000
	1.998.137	36.469.275.000	

DATA BULAN APRIL 2024

Jenis Ikan	Volume	Nilai	Harga
Albakor	246	7.380.000	30.000
Alu Alu	89	1.820.000	20.449
B. Putih	124	22.320.000	180.000
Belo/selanget	1.090	3.270.000	3.000
Bilis	10.939	32.817.000	3.000
C. Buas	59	708.000	12.000
C. Cakilan	886	11.072.000	12.497
C. Cakilan Air	52	728.000	14.000
C. Koboï	37	444.000	12.000
C. Lanjaman	3.143	45.238.000	14.393
C. Pahitan	2.400	29.376.000	12.240
C. Slendang	1.716	15.780.000	9.196
C. Tikusan	2.477	29.724.000	12.000
Cakalang	1.258.825	21.392.253.000	16.994
Cumi Karet	324.265	4.746.419.000	14.637
Gindara	1.821	37.648.000	20.674
Gulamah	5.580	83.700.000	15.000
Kembung	268	8.040.000	30.000
Kenyar	2.227	44.540.000	20.000
Kerong	293	8.790.000	30.000
Kuniran/ biji Nangka	80	1.440.000	18.000
Layang	92.250	1.293.536.000	14.022
Layaran	3.335	81.040.000	24.300
Layur	1.082	32.460.000	30.000
Lemadang	126.469	2.042.314.000	16.149
Lemadang	720	11.520.000	16.000
Lendra/lidah	2.643	66.075.000	25.000
Lisong	30.616	245.064.000	8.004
Lurik	411	4.110.000	10.000
Madidihang	74.153	2.132.561.000	28.759
Manyung	3.011	43.065.000	14.303
Mata Besar	23.592	606.081.000	25.690
Meka	9.122	291.904.000	32.000
Meka	817	26.144.000	32.000
Nomei	2.718	21.744.000	8.000
P. Plampangan	65	650.000	10.000
Rajungan	687	37.785.000	55.000
SBT	792	22.968.000	29.000
Selar	290	5.800.000	20.000
Setuhuk Hitam	4.639	146.786.000	31.642

Setuhuk Putih	515	15.450.000	30.000
Sunglir	327	5.886.000	18.000
Tenggiri	1.560	46.770.000	29.981
Tigawaja	3.685	92.125.000	25.000
Tk. Madidihang	33.138	629.622.000	19.000
Tk. Mata Besar	130.820	2.506.227.000	19.158
Udang Dogol	642	38.520.000	60.000
Udang Jerbung	1.351	283.710.000	210.000
Udang Krosok	3.043	106.505.000	35.000
Udang Rebon	4.143	82.860.000	20.000
	2.173.253,00	37.442.789.000	

DATA BULAN MEI 2024

Jenis Ikan	Volume	Nilai	Harga
Albakor	7.879	236.266.000	29.987
Alu Alu	234	4.720.000	20.171
B. Putih	916	166200000	181.441
B.Hitam	366	13.210.000	36.093
Belo/selanget	6.692	20.076.000	3.000
Bilis	8.806	26.418.000	3.000
C. Buas	966	11.592.000	12.000
C. Cakilan	1.575	18.966.000	12.042
C. Cakilan Air	68	816.000	12.000
C. Lanjaman	3.487	48.818.000	14.000
C. Martil	149	1.788.000	12.000
C. Pahitan	3.233	38.796.000	12.000
C. Slendang	2.363	18.904.000	8.000
C. Tikusan	5.282	63.384.000	12.000
Cakalang	926.020	15.409.218.000	16.640
Casper	3	60.000	20.000
Cumi Karet	606.120	9.856.584.000	16.262
Gindara	315	6.615.000,00	21.000
Gulamah	8378	125.670.000,00	15.000
Kakap Merah	1.437	71.850.000	50.000
Kenyar	814	14.366.000	17.649
Kerapu	551	24.795.000	45.000
Kerong	1.921	57.630.000	30.000
Kuniran	85	1.020.000	12.000
Kurisi	456	11.400.000	25.000
Layang	142.418	1.863.752.000	13.086
Layaran	3295	72490000	22.000
Layur	80.514	2.424.190.000	30.109
Lemadang	59.400	950.400.000	16.000
Lendra/lidah	3.041	76.025.000	25.000
Lidah	150	3.750.000	25.000
Lisong	1.839	14.712.000	8.000
Lisong	70.161	561.288.000	8.000
Madidihang	125.762	3.646.186.000	28.993
Manyung	6.154	90.242.000	14.664
Mata Besar	43.465	1.130.090.000	26.000
Meka	7.948	254.336.000	32.000
Nomei	549	4.392.000	8.000
Opah	294	3.528.000	12.000
P. Depok	161	1.610.000	10.000

P. Plampangan	541	6.038.000	11.161
Rajungan	146	8.030.000	55.000
Remang	1.115	22.300.000	20.000
Setuhuk Hitam	7.031	224.596.000	31.944
Setuhuk Putih	1.126	31.528.000	28.000
Sunglir	1.764	31.752.000	18.000
Tenggiri	4.681	140.430.000	30.000
Tigawaja	3.664	91.600.000	25.000
Tk. Madidihang	35.497	674.443.000	19.000
Tk. Mata Besar	190.116	3.612.204.000	19.000
Tumbuk	123	2.091.000	17.000
Udang Dogol	961	57.660.000	60.000
Udang Jerbung	2.521	529.410.000	210.000
Udang Krosok	3.227	112.945.000	35.000
Udang Rebon	10.783	215.660.000	20.000
	2.396.563	43.106.840.000	

DATA BULAN JUNI 2024

Jenis Ikan	Volume	Nilai	Harga
Albakor	8.779	263.370.000	30.000
Alu Alu	1.328	26.072.000	19.633
Alu-alu	165	3.300.000	20.000
B. Hitam	120	4.200.000	35.000
B. Putih	42	7.560.000	180.000
Belo/selanget	1.053	3.159.000	3.000
Bilis	11.445	34.335.000	3.000
C. Buas	974	11.688.000	12.000
C. Cakilan	1.777	22.178.000	12.481
C. Cakilan Air	569	7.148.000	12.562
C. Koboi	22	220.000	10.000
C. Lanjaman	5.451	76.456.000	14.026
C. Mako	27	324.000	12.000
C. Martil	199	2.388.000	12.000
C. Pahitan	6.228	74.736.000	12.000
C. Patilan	130	910.000	7.000
C. Slendang	5.790	53.190.000	9.187
C. Tikusan	12.925	155.404.000	12.024
Cakalang	2.375.914	38.124.016.000	16.046
Casper	9	180.000	20.000
Cumi Karet	2.568.035	38.611.945.000	15.036
Gindara	1.161	24.381.000	21.000
Gulamah	5.688	85.320.000	15.000
kambing-kambing	42	336.000	8.000
Kenyar	2.677	47.736.000	17.832
Kerapu	9	405.000	45.000
Kerong	349	10.470.000	30.000
Layang	34.615	415.380.000	12.000
Layaran	3.556	77.672.000	21.843
Layaran	4.425	97.350.000	22.000
Layur	60.403	1.808.954.000	29.948
Lemadang	101.432	1.620.319.000	15.974
Lendra/lidah	1.408	35.200.000	25.000
Lidah	988	24.700.000	25.000
Lisong	27.922	223.376.000	8.000
Madidihang	526.351	15.946.792.000	30.297
Manyung	3.099	43.155.000	13.925
Marlin	98	3.136.000	32.000
Mata Besar	128.383	3.606.067.000	28.088
Meka	28.308	905.670.000	31.993

Nomei	1.031	8.248.000	8.000
Opah	36	432.000	12.000
P. Plampangan	1.145	11.962.000	10.447
Remang	216	4.278.000	19.806
SBT	110	3.190.000	29.000
Setuhuk Hitam	13.459	429.498.000	31.912
Setuhuk Putih	1.588	43.552.000	27.426
Siro	3.676	44.112.000	12.000
Sunglir	667	11.566.000	17.340
Tenggiri	3.101	93.030.000	30.000
Tigawaja	2.908	72.700.000	25.000
Tk. Madidihang	56.377	1.071.163.000	19.000
Tk. Mata Besar	181.899	3.478.591.000	19.124
Tl. Madidihang	1.616	30.704.000	19.000
Tongkol Lisong	250	3.000.000	12.000
Tumbuk	106	1.802.000	17.000
Udang Dogol	128	7.680.000	60.000
Udang Jerbung	516	108.360.000	210.000
Udang Krosok	2.179	76.265.000	35.000
Udang Rebon	6.194	123.880.000	20.000
	6.209.098,00	108.083.211.000,00	

DATA BULAN JULI 2024

Jenis Ikan	Volume	Nilai	Harga
Albakor	3.002,00	90.060.000,00	30.000
Alu Alu	806,00	16.120.000,00	20.000
B. Hitam	436,00	14.290.000,00	32.775
Belo/selanget	5.982,00	17.946.000,00	3.000
Bilis	20.059,00	60.177.000,00	3.000
C. Buas	543,00	6.516.000,00	12.000
C. Cakilan	2.863,00	34.480.000,00	12.043
C. Cakilan Air	170,00	2.040.000,00	12.000
C. Lanjaman	4.718,00	66.052.000,00	14.000
C. Manisan	810,00	9.720.000,00	12.000
C. Pahitan	6.067,00	72.804.000,00	12.000
C. Paitan	514,00	6.168.000,00	12.000
C. Slendang	5.089,00	47.312.000,00	9.297
C. Tikusan	7.151,00	85.812.000,00	12.000
Cakalang	1.136.073,00	18.203.688.000,00	16.023
Casper	34,00	680.000,00	20.000
Cumi	3.299,00	52.784.000,00	16.000
Cumi Karet	871.379,00	13.919.229.000,00	15.974
Gepeng	27,00	756.000,00	28.000
Gindara	1.748,00	36.708.000,00	21.000
Gulamah	2.332,00	36.030.000,00	15.450
Kenyar	2.843,00	51.174.000,00	18.000
Kerapu	859,00	38.655.000,00	45.000
Kerong	2.144,00	64.320.000,00	30.000
Layang	66.630,00	817.364.000,00	12.267
Layaran	3.397,00	74.734.000,00	22.000
Layaran	343,00	7.546.000,00	22.000
Layur	61.020,00	1.825.350.000,00	29.914
Lemadang	39.054,00	624.864.000,00	16.000
Lendra/lidah	1.466,00	36.650.000,00	25.000
Lisong	90.068,00	814.904.000,00	9.048
Madidihang	516.669,00	17.565.096.000,00	33.997
Manyung	4.178,00	62.670.000,00	15.000
Marlin	573,00	18.336.000,00	32.000
Mata Besar	53.730,00	1.719.452.000,00	32.002
Meka	17.605,00	563.360.000,00	32.000
Nomei	855,00	4.275.000,00	5.000
P. Plampangan	1.248,00	13.612.000,00	10.907
Setuhuk Hitam	10.340,00	330.520.000,00	31.965
Setuhuk Putih	2.227,00	61.476.000,00	27.605

Siro	38.910,00	116.730.000,00	3.000
Sunglir	856,00	15.408.000,00	18.000
Tenggiri	3.845,00	117.241.000,00	30.492
Tigawaja	2.946,00	73.650.000,00	25.000
Tk. Madidihang	51.459,00	977.721.000,00	19.000
Tk. Mata Besar	133.132,00	2.520.577.000,00	18.933
Tk.Mata Besar	48,00	912.000,00	19.000
Udang Krosok	3.219,00	112.665.000,00	35.000
Udang Rebon	12.538,00	250.760.000,00	20.000
	3.195.304,00	61.659.394.000,00	

DATA BULAN AGUSTUS 2024

Jenis Ikan	Volume	Nilai	Harga
Albakor	2.718	81.540.000	30.000
Alu Alu	891	17.820.000	20.000
B. Hitam	96	2880000	30.000
Belo/selanget	7.064	21.192.000	3.000
Bilis	26.489	79.467.000	3.000
C. Botol	7	84.000	12.000
C. Buas	94	1.128.000	12.000
C. Cakilan	3.255	39.060.000	12.000
C. Cakilan Air	477	5.764.000	12.084
C. Lanjaman	5.618	78.652.000	14.000
C. Pahitan	9.788	117.456.000	12.000
C. Patilan	325	2.275.000	7.000
C. Slendang	3.605	31.160.000	8.644
C. Sorah	370	4.440.000	12.000
C. Tikusan	10.257	123.084.000	12.000
Cakalang	1.626.975	26.282.331.000	16.154
Casper	23	460.000	20.000
Cumi Karet	1282824	21.795.765.000,00	16.990
Gindara	7898	165.858.000,00	21.000
Gogokan	195	5.460.000	28.000
Gulamah	7.856	117.840.000	15.000
Kakap Merah	251	13.805.000	55.000
Kakatua	23	230.000	10.000
Kembung	560	16.800.000	30.000
Kerapu	78	3.510.000	45.000
Kerong	3.318	99.540.000	30.000
Layang	51394	616728000	12.000
Layaran	3.283	72.226.000	22.000
Layur	107.656	3.229.680.000	30.000
Lemadang	64.997	1.041.227.000	16.020
Lendra/lidah	1.516	37.900.000	25.000
Lidah	152	3.800.000	25.000
Lisong	88.135	756.425.000	8.583
Madidihang	776.499	26.393.194.000	33.990
Manyung	4.837	72.555.000	15.000
Mata Besar	100.637	3.226.812.000	32.064
Meka	15.364	491.648.000	32.000
Nomei	809	4.045.000	5.000
Opah	42	504.000	12.000
P. Burung	27	270.000	10.000

P. Depok	68	680.000	10.000
P. Plampangan	1.714	17.140.000	10.000
P. Tunggul	179	1.790.000	10.000
Pihi	130	3.250.000	25.000
Remang	65	1.430.000	22.000
SBT	99	3.366.000	34.000
Setuhuk Hitam	11.777	376.864.000	32.000
Setuhuk Putih	1.775	49.700.000,00	28.000
Siro	26.380,00	79.140.000,00	3.000
Sunglir	544	9.792.000	18.000
Tenggiri	4.188,00	150.619.000	35.964
Tigawaja	2.864	71.600.000	25.000
Tk. Madidihang	38.575	732.394.000	18.986
Tk. Mata Besar	159.026	3.020.367.000	18.993
Udang Dogol	1.744	105.765.000	60.645
Udang Jerbung	6.061	1.151.590.000	190.000
Udang Krosok	4.415	154.525.000	35.000
Udang Rebon	19.084	381.680.000	20.000
	4.495.091	91.366.307.000	

DATA BULAN SEPTEMBER 2024

Jenis Ikan	Volume	Nilai	Harga
Albakor	7.573	227.190.000	30.000
B. Hitam	358	16.110.000	45.000
Banyar	420	10500000	25.000
Belo/selanget	5.050	15.150.000	3.000
Bilis	17.413	52.239.000	3.000
C. Buas	93	930.000	10.000
C. Cakilan	5.923	71.076.000	12.000
C. Cakilan Air	278	3.336.000	12.000
C. Lanjaman	4.070	56.460.000	13.872
C. Pahitan	7.534	90.408.000	12.000
C. Slendang	4.742	38.054.000	8.025
C. Tikusan	3.440	41.280.000	12.000
Cakalang	1.106.635	17.706.160.000	16.000
Cumi Karet	1.989.067	36.147.404.000	18.173
Gindara	2.085	43.785.000	21.000
Gulamah	13.301	199.515.000	15.000
Kembung	5.118	127.950.000	25.000
Kerong	1672	50.160.000,00	30.000
Layang	47794	573.528.000,00	12.000
Layaran	1.212	26.664.000	22.000
Layur	207.666	6.107.235.000	29.409
Lemadang	47.494	768.497.000	16.181
Lendra/lidah	825	20.625.000	25.000
Lidah	809	20.225.000	25.000
Lisong	24.444	231.392.000	9.466
Madidihang	289.411	9.883.286.000	34.150
Manyung	5219	78285000	15.000
Mata Besar	84.186	2.693.760.000	31.998
Meka	18.325	583.786.000	31.857
Nomei	210	1.470.000	7.000
P. Gitar	404	2.828.000	7.000
P. Plampangan	1.046	10.460.000	10.000
SBT	347	11.798.000	34.000
Setuhuk Hitam	8.504	273.940.000	32.213
Setuhuk Putih	2.210	61.880.000	28.000
Siro	950	2.850.000	3.000
Sunglir	474	8.532.000	18.000
Tenggiri	1.614	48.420.000	30.000
Tigawaja	1.378	34.450.000	25.000
Tk. Madidihang	32.099	609.881.000	19.000

Tk. Mata Besar	170.739	3.244.041.000	19.000
Udang Dogol	3.983	238.980.000	60.000
Udang Jerbung	10788	2049720000	190.000
Udang Krosok	5326	186410000	35.000
Udang Rebon	11758	235160000	20.000
	4.153.987,00	82.905.810.000	

DATA BULAN OKTOBER 2024

Jenis Ikan	Volume	Nilai	Harga
Albakor	7.08	212.37	30
B. Hitam	0.43	19.26	45
Belo/selanget	2.70	8.10	3
Bilis	10.40	31.21	3
C. Buas	0.23	2.74	12
C. Cakil Air	0.11	1.30	12
C. Cakilan	1.65	18.91	11
C. Cakilan Air	0.37	4.39	12
C. Isabela	0.04	0.30	8
C. Lanjaman	0.88	12.91	15
C. Pahitan	2.61	31.36	12
C. Patilan	0.07	0.49	7
C. Slendang	5.41	46.99	9
C. Tikusan	1.09	13.68	13
C. Tunggul	0.12	1.19	10
Cakalang	794.73	12,745.50	16
Cumi Karet	2,833.60	69,168.42	24
Gindara	12.60	264.68	21
Gulamah	9.75	146.21	15
Kembung	2.99	74.75	25
Kerapu	0.52	23.22	45
Kerong	1.59	47.61	30
Layang	19.96	243.40	12
Layaran	5.98	131.49	22
Layur	101.92	2,982.23	29
Lemadang	39.88	640.99	16
Lendra/lidah	0.23	5.65	25
Lidah	1.10	27.53	25
Lisong	28.80	232.15	8
Madidihang	258.95	8,803.70	34
Manyung	5.76	83.34	14
Mata Besar	170.08	5,433.20	32
Meka	34.02	1,002.06	29
Nomei	1.01	7.04	7
P. Burung	0.05	0.56	11
P. Depok	0.04	0.37	10
P. Plampangan	0.35	3.89	11
Pihi	0.04	0.98	28
Remang	0.05	0.90	20
Setuhuk Hitam	7.55	241.63	32

Setuhuk Putih	1.16	32.51	28
Sunglir	0.70	12.55	18
Tenggiri	1.40	42.03	30
Tenggiri	0.97	29.16	30
Tigawaja	0.87	21.63	25
Tk. Madidihang	59.28	1,116.92	19
Tk. Mata Besar	100.03	1,909.30	19
Tongkol Lisong	0.63	9.38	15
Udang Dogol	2.92	175.26	60
Udang Jerbung	3.75	712.69	190
Udang krosok	5.33	186.55	35
Udang Rebon	6.79	135.72	20
	4,548.52	107,100.36	

DATA BULAN NOVEMBER 2024

Jenis Ikan	Volume	Nilai	Harga
Albakor	2,064	61,920,000	30,000
B. Hitam	467	21,015,000	45,000
B. Putih	429	64,350,000	150,000
Belo/selanget	4,671	14,013,000	3,000
Bilis	14,926	44,778,000	3,000
C. Cakilan	1,648	19,776,000	12,000
C. Cakilan Air	205	2,460,000	12,000
C. Lanjaman	504	7,056,000	14,000
C. Pahitan	2,308	27,696,000	12,000
C. Slendang	1,772	16,888,000	9,530
C. Tikusan	209	2,508,000	12,000
Cakalang	673,356	10,884,289,000	16,164
Cumi Karet	1,774,144	44,340,344,000	24,993
Gindara	139	2,919,000	21,000
Gogokan	254	5,080,000	20,000
Gulamah	7,683	115,245,000	15,000
Kakap Merah	1,548	85,140,000	55,000
Kembung	708	17,700,000	25,000
Kerapu	569	25,605,000	45,000
Kerong	1,140	34,200,000	30,000
Layang	53,181	744,534,000	14,000
Layaran	2,141	45,442,000	21,225
Layur	20,729	610,620,000	29,457
Lemadang	31,964	511,424,000	16,000
Lidah	644	16,100,000	25,000
Lisong	90,839	907,682,000	9,992
Madidihang	321,804	10,941,336,000	34,000
Manyung	3,685	55,275,000	15,000
Mata Besar	90,162	2,885,184,000	32,000
Meka	24,560	735,882,000	29,963
Nomei	1,162	8,134,000	7,000
P. Depok	80	800,000	10,000
P. Plampangan	681	8,172,000	12,000
Remang	261	4,698,000	18,000
Setuhuk Hitam	6,477	207,264,000	32,000
Setuhuk Putih	1,528	42,784,000	28,000
Sunglir	117	2,106,000	18,000
Tenggiri	1,888	56,640,000	30,000
Tigawaja	695	17,375,000	25,000
Tk. Madidihang	40,356	766,764,000	19,000

Tk. Mata Besar	39,615	752,412,000	18,993
Tongkol Lisong	350	5,250,000	15,000
Udang Barat	1,940	67,900,000	35,000
Udang Dogol	3,385	203,100,000	60,000
Udang Jerbung	2,706.00	514,140,000.00	190,000
Udang Kerosok	4,433	155,155,000	35,000
Udang Rebon	7,269	145,380,000	20,000
	3,241,396	76,204,535,000	

DATA BULAN DESEMBER 2024

Jenis Ikan	Volume	Nilai	Harga
Albakor	6188	185640000	30,000
Alu-alu	13	312000	24,000
B. Hitam	104	4680000	45,000
B. Putih	1562	277500000	177,657
Belo/selanget	6767	20301000	3,000
Bentongan	1851	27765000	15,000
Bilis	14929	44787000	3,000
C. Cakilan	1044	12528000	12,000
C. Cakilan Air	115	1380000	12,000
C. Lanjam	21	294000	14,000
C. Lanjaman	431	5994000	13,907
C. Martil	166	1992000	12,000
C. Pahitan	2569	30828000	12,000
C. Patilan	101	909000	9,000
C. Slendang	5084	46139000	9,075
C. Tikusan	40	480000	12,000
Cakalang	353310	5652960000	16,000
Casper	10	148000	14,800
Cumi Karet	1341609	31252618000	23,295
Gabus Laut	31	620000	20,000
Gindara	2668	56028000	21,000
Gulamah	4303	64545000	15,000
Kakap Merah	1681	75645000	45,000
Kembung	2136	35540000	16,639
Kerapu	227	7945000	35,000
Kerong	2357	70710000	30,000
Layang	18615	260714000	14,006
Layaran	2038	44836000	22,000
Layur	3086	92580000	30,000
Lemadang	42300	678560000	16,042
Lendra/lidah	319	7975000	25,000
Lisong	28007	280070000	10,000
Lurik	265	3180000	12,000
Madidihang	260295	8847424000	33,990
Manyung	2151	32265000	15,000
Mata Besar	94080	3013816000	32,035
Meka	33075	984462000	29,765
P. Plampangan	212	2544000	12,000
SBT	230	7820000	34,000
Selar Bentong	124	3100000	25,000

Setuhuk Hitam	6622	209018000	31,564
Setuhuk Putih	1628	45664000	28,049
Sunglir	422	7596000	18,000
Tenggiri	2435	72906000	29,941
Tigawaja	1779	44475000	25,000
Tk. Madidihang	10476	199044000	19,000
Tk. Mata Besar	26119	496261000	19,000
Udang Barat	1525	53375000	35,000
Udang Dogol	2784	167040000	60,000
Udang Jerbung	1425	270750000	190,000
Udang Krosok	4073	142555000	35,000
Udang Rebon	7391	147820000	20,000
	2,300,793	53,994,138,000	



DATA DUKUNG IKU 4
TINGKAT OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
EVKIN (PERSEN)) TRIWULAN IV (OKTOBER sd DESEMBER)
TAHUN 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2024

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap antara pihak pertama, kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan pihak kedua, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 10 Januari tahun 2024, sesuai dengan permen KP No.68/PERMEN-KP/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan hal tersebut maka untuk Tim Kerja Operasional Pelabuhan akan menyampaikan :

- a. Sasaran Program : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berdaya saing dan berkelanjutan ;
- b. IKU 4 : Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen);
- c. Deskripsi : Tingkat capaian Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ;
- d. Formula perhitungan : Prosentase rata rata capaian Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap melalui Aplikasi Evaluasi Kinerja (EVKIN) ;
- e. Data Dukung berupa : Laporan Evkin .

2. Lokasi

Lokasi pendataan terkait data produksi adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

B. METODE KERJA DAN ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Metode Kerja

Melakukan entri data kedalam Aplikasi PIPP.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peralatan

Jumlah SDM yang ada dalam kegiatan Tingkat Operasional Pelabuhan (EVKIN) terdiri dari 4 orang yaitu pengimputan PIPP untuk kapal < 5 GT dan

penginputan dalam aplikasi PIPP untuk kapal > 5 GT alat bantu untuk pendataan di lapangan adalah form SL 3.

3. Hasil Kegiatan

Hasil Kegiatan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen) pada triwulan III sampai dengan bulan September 2024

No	Bulan	Nilai EVKIN (%)	Keterangan
1.	Oktober	94,75	Sangat Baik
2.	November	92,75	Sangat Baik
3.	Desember	92,75	Sangat Baik
	Jumlah rata-rata sampai dengan bulan Desember 2024	93.42	Sangat Baik

Capaian indikator tingkat operasional pelabuhan tercapai sebesar 93.42 atau dengan kategori **Sangat Baik**. Indikator tingkat operasional pelabuhan diperoleh dari 27 (Dua Puluh Tujuh) komponen penilaian. Capaian pada Tri Wulan IV ini dipengaruhi oleh bertambahnya frekuensi kunjungan kapal, volume produksi, pelayanan tambat labuh dan penambahan jumlah investor.

Demikian laporan data dukung IKU 4, Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebesar 93,42 % (Kategori : Sangat Baik).

An. Kepala Pelabuhan
Ketua Tim Kerja Operasional
Pelabuhan



Yutim Kurniadi

Evaluasi Kinerja (Evkin)
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Bulan : Oktober 2024

No.	Kriteria	Satuan	Oktober		
			94,75 = SANGAT BAIK		
			Realisasi	Nilai	Ket.
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	30	5	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	118,7	4	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	191,81	4	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	16.388,00	4	Diatas 6000 GT
9	Panjang Dermaga	m	1.726,00	4	Diatas 300m
10	Kedalaman Kolam	cm	300	4	Diatas 3 m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	30,7	4	Diatas 20 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	576	5	Lebih dari 60 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	135,99	5	Lebih dari 50 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	1.503,00	5	Lebih dari 14 unit
17	STBLKK	%	27,81	1,25	Kapal yang masuk kurang dari 50%

18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	2	2	Antara 2 - 2 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	6	4	Diatas 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100	5	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	70	4	Diatas 30 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	91,97	3	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	1.820,34	1,5	Antara 1000 - 2000 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	7 (148)	4	---
Jumlah				94.75	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

Evaluasi Kinerja (Evkin)
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Bulan : November 2024

-			November		
No.	Kriteria	Satuan	92,73 = SANGAT BAIK		
			Realisasi	Nilai	Ket.
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	29	5	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	151,53	4	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	147,1	4	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	14.003,00	4	Diatas 6000 GT
9	Panjang Dermaga	m	1.726,00	4	Diatas 300m
10	Kedalaman Kolam	cm	300	4	Diatas 3 m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	30,7	4	Diatas 20 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	475	5	Lebih dari 60 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	105,53	5	Lebih dari 50 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	1.292,00	5	Lebih dari 14 unit

17	STBLKK	%	23,45	1,25	Kapal yang masuk kurang dari 50%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	5	4	Diatas 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaa Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	2	2	Antara 1 - 2 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100	5	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	73	4	Diatas 30 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	91,97	3	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	1.831,96	1,5	Antara 1000 - 2000 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	1 (149)	2	---
Jumlah				92.75	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

Evaluasi Kinerja (Evkin)
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Bulan : Desember 2024

No.	Kriteria	Satuan	Desember		
			S L T S - SANGAT BAK		
			Realisasi	Nilai	Ket.
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	30	5	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	67,63	3	Antara 50 - 75%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	162,12	4	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	14.658,00	4	Diatas 6000 GT
9	Panjang Dermaga	m	1.726,00	4	Diatas 300m
10	Kedalaman Kolam	cm	300	4	Diatas 3 m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	30,7	4	Diatas 20 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	656	5	Lebih dari 60 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	70,89	5	Lebih dari 50 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	1.418,00	5	Lebih dari 14 unit
17	STBLKK	%	22,77	1,25	Kapal yang masuk kurang dari 50%

18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	5	4	Diatas 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	3	3	Antara 3 - 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100	5	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	73	4	Diatas 30 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	91,97	3	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	1.863,34	1,5	Antara 1000 - 2000 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	2 (149)	2	---
Jumlah				92.75	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

F716

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

MEMORANDUM

NOMOR 30 /PPSC/PI.310/I/2025

Yth : Kepala Pelabuhan
Dari : Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha
Hal : Data dukung capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024
Lampiran : -
Tanggal : 10 Januari 2025

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 telah berakhir, terlampir kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melekat pada Tim Kerja Pelayanan Usaha dengan periode pengukuran triwulanan sebagai berikut:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Rp.Juta)
 - Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non SDA di PPS Cilacap adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan dengan target dan capaian Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Nilai PNBP Non SDA di PPS Cilacap (Rp. Juta)	3.153,729	5.909,13	187,37

Penerimaan PNBP PPS Cilacap terbesar masih berasal dari penerimaan tambat sebesar Rp. 3.316.925.559,- dan penerimaan terbesar kedua berasal dari Penerimaan Penggunaan Tanah dalam rangka tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan sesuai klaster yaitu sebesar Rp. 805.999.300,-.

- Perbandingan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2023:

IKU	REALISASI TW IV Tahun 2023	REALISASI TW IV Tahun 2024	NAIK/TURUN (%)
Nilai PNBP Non SDA di PPS Cilacap (Rp. Juta)	6.444,69	5.909,13	(8,31)

- Apabila dibandingkan dengan penerimaan PNBP Triwulan IV Tahun 2023, penerimaan PNBP di Triwulan IV Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,31%. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai PNBP dari sektor penggunaan tanah dan bangunan dikarenakan pembayaran yang dilakukan dimuka sesuai jangka waktu perjanjian. Penurunan juga dikarenakan penggunaan tanah untuk pada penumpukan barang atau penjemuran jaring yang berkurang serta adanya perubahan mekanisme penggunaan unit pendingin kapasitas 100 ton berubah menjadi mekanisme pemanfaatan.

2. Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (persen)

- Setiap Permohonan penggunaan tanah dan bangunan di pelabuhan perikanan, akan diverifikasi terhadap kesesuaian pengajuan permohonan, kelengkapan persyaratan administrasi dan analisa kelayakan usaha serta mempertimbangkan ketersediaan tanah dan kesesuaian dengan rencana induk Pelabuhan perikanan. Untuk target dan capaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (persen)	100	100	100

- Permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

IKU	Jumlah permohonan	Terevaluasi	CAPAIAN (%)
Permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi	166	166	100

Permohonan ini terdiri dari permohonan 2 skema pengelolaan Barang Milik Negara, yaitu penggunaan tanah dan/atau bangunan dan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. Permohonan ini tinggi dikarenakan skema penggunaan tanah dan/atau bangunan ada beberapa lokasi yang memang hanya diberikan

masa berlaku penggunaannya 1 tahun sehingga setiap tahun harus dilakukan permohonan kembali jika masih berminat untuk menggunakannya kembali. Untuk skema pemanfaatan tanah dan atau bangunan baru mulai diberlakukan sesuai surat edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 29 Juli 2024 "Penerapan Pemanfaatan BMN Cara Sewa Terhadap Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Gedung Bangunan di Pelabuhan Perikanan".

- Perbandingan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2023
IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2023 dikarenakan ini merupakan IKU baru.
3. Terkait dengan capaian IKU di atas, data dukung dapat diunduh pada tautan sebagai berikut : https://bit.ly/Dakung_TimjaPU.

Terkait dengan capaian IKU di atas, terlampir kami sampaikan data dukungnya. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih dan mohon arahan lebih lanjut.



Daniel Wahyu Setyawan

LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

KEMENTERIAN/LEMBAGA

SATUAN KERJA

PROVINSI

TGL. DAN NO. SK PENGANGKATAN SEBAGAI

BENDAHARAWAN PENERIMA

TANGGAL

: KELAUTAN DAN PERIKANAN

: Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

: JAWA TENGAH

: 47/KPA.PPSC/KU.110/ I/ 2024

: 2 Januari 2024

BULAN

TAHUN ANGGARAN

: DESEMBER DASAR PUNGUTAN :

: 2024

PP. NOMOR :

85 TAHUN 2021

No.	Uraian Penerimaan	KODE AKUN	Target TA.2024	Penerimaan			Penyetoran ke Rekening Kas Negara pada Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan			Penjelasan
				s/d bulan lalu	Bulan ini (Rp)	Jumlah (Rp)	s/d bulan lalu	Bulan ini (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	PENERIMAAN FUNGSIONAL									
	A. PENDAPATAN PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA	425151	1.277.569.000							
	- Sewa Gedung Bangunan			202.519.500		202.519.500	202.519.500	-	202.519.500	
	- Sewa Lahan Pengembangan (Kluster 1)			805.999.300		805.999.300	805.999.300	-	805.999.300	
	- Sewa Lahan/Pemeliharaan			205.717.325		205.717.325	205.717.325	-	205.717.325	
	- Instalasi Tangki BBM dan Instalasinya			-		-	-	-	-	
	- Jasa Sewa Truck Crane			14.450.000		14.450.000	14.450.000	-	14.450.000	
	- Jasa sewa Wisma jetty /AC			-		-	-	-	-	
	- Jasa sewa R. Rapat/BPN/ AC			700.000		700.000	700.000	-	700.000	
	- Jasa sewa Mess/AC/Non AC			-		-	-	-	-	
	- Jasa sewa Truck Box Refrigerator (kendaraan berpendingin)			26.800.000	3.200.000	30.000.000	26.800.000	3.200.000	30.000.000	
	- Jasa sewa Fasilitas TPI			-		-	-	-	-	
	- Jasa T. Penumpukan Barang/			82.610.000		82.610.000	82.610.000	-	82.610.000	
	- Jasa T. Penjemuran Ikan/Jaring			-		-	-	-	-	
	- Jasa Sewa klos			-		-	-	-	-	
	- Jasa Sewa gerobak dorong			5.052.000	926.000	5.978.000	5.052.000	926.000	5.978.000	
	- Jasa sewa Dump Truck			-		-	-	-	-	
	- Jasa sewa Metborn separator			-		-	-	-	-	
	- Jasa sewa Miniplant/Cold Storage/ABF			134.640.482	11.800.135	146.440.617	134.640.482	11.800.135	146.440.617	
										1.494.414.742
	B... PENDAPATAN JASA PELABUHAN PERIKANAN	425621	1.876.157.000							
	- Pas Masuk Harian			257.840.000	25.137.000	282.977.000	257.840.000	25.137.000	282.977.000	
	- Pas Masuk Bulanan/Langganan			147.555.000	13.515.000	161.070.000	147.555.000	13.515.000	161.070.000	
	- Tambat Labuh/Relair/Max 30 Etmal			3.214.480.851	102.437.208	3.316.918.059	3.214.480.851	102.437.208	3.316.918.059	
	- Kebersihan Kawasan dan Kios/PKL			131.459.936		131.459.936	131.459.936	-	131.459.936	
	- Kebersihan Kolam Pelabuhan			229.818.800	6.795.400	236.614.200	229.818.800	6.795.400	236.614.200	
	- Kebersihan Bongkar Muat			-		-	-	-	-	
	- Jasa Pemakaian Air			3.257.990	321.280	3.579.270	3.257.990	321.280	3.579.270	
	- Jasa Pemakaian Listrik			198.198.892	18.021.342	216.220.234	198.198.892	18.021.342	216.220.234	
	- Jasa sewa Dock/Slipway			62.760.000	3.120.000	65.880.000	62.760.000	3.120.000	65.880.000	4.414.718.699
	JUMLAH :		3.153.726.000	5.723.860.076	185.273.365	5.909.133.441	5.723.860.076	185.273.365	5.909.133.441	187%

Kuasa Pengguna Anggaran
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
PELABUHAN
PERIKANAN SAMUDERA
CILACAP
Imas Masnah, S. Pi, M. Pi
NIP.197504142002122003

Cilacap, 31 Desember 2024

Bendahara Penerimaan,

Anggoro Hari Sapto
NIP. 197201071993031002

Catatan :

Pada LPJ PNBPN di Simponi terdapat selisih sebesar Rp. 187.932.554,- sedangkan upload data dari MPN Simponi sebesar sebesar Rp.412.436.074,- ada selisih penerimaan sebesar Rp.2.659,189,- dikarenakan adanya penyetoran sewa rumah Negara tanpa melalui bendahara penerimaan.

MATRIKS PERMOHONAN PENGUSAHAAN YANG DIEVALUASI
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TAHUN 2024

NO	TRIWULAN	PERMOHONAN MASUK	PERMOHONAN DIANALISIS
1	TW I	40	40
2	TW II	93	93
3	TW III	14	14
4	TW IV	19	19
	JUMLAH	166	166
	PRESENTASE	100%	

Katimja Pelayanan Usaha



Daniel Wahyu Setyawan

1773.

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP**

MEMORANDUM
NOMOR²⁶./PPSC/TU.140/I/2025

Yth : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama lingkup Tim Kerja
Kesyahbandaran Triwulan IV
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 9 Januari 2025

Sehubungan dengan penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan IV lingkup Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tahun 2024. Terlampir kami sampaikan matriks capaian IKU sebagaimana dimaksud. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran



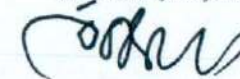
Abdul Iman

**CAPAIAN KINERJA UTAMA TIM KERJA KESYAHBANDARAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Unit Organisasi	Tim Kerja	Indikator Kinerja Utama Kesyahbandaran						Monev Capaian Kinerja Indikator Utama sd Triwulan IV				
		IKU Kalabuh	Satuan IKU	Target	Periode	RHK Katimja	IKI Katimja	Capaian	(%)	Analisa Penjelasan Capaian Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Rekomendasi Tindak Lanjut
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	2. Tim Kerja Kesyahbandaran	1. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	Kapal	650	Tahunan	Jumlah pelayanan perizinan kapal perikanan izin daerah di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Pelayanan perizinan kapal perikanan izin daerah di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang sesuai ketentuan	1039	159,85	Capaian kinerja pelaksanaan Penerbitan SKKP pada kapal Ijin Daerah sudah optimal dan melampaui target yang ditetapkan	Telah dilakukan identifikasi SKKP kapal Ijin Daerah yang akan berahir di akhir tahun 2024	Melakukan identifikasi SKKP kapal Ijin Daerah yang akan berahir tahun 2025 dan melakukan perhitungan capaian minimum dan optimum dengan melakukan pendataan kapal baru dengan Ijin daerah.
		2. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	Persen	11	Triwulan	Terlaksananya sosialisasi/bimbingan teknis/supervisi kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Sosialisasi/bimbingan teknis/supervisi dan asistensi pelayanan buku pelaut bagi awak kapal perikanan	14,18	128,91	Capaian kinerja Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan telah melampaui target	Telah dilakukan koordinasi dengan BRSDM KP (Pusat KP) untuk melaksanakan percepatan dan/atau pelayanan dokumen/sertifikat kompetensi/keahlian AKP yang dilakukan dengan cara jemput bola ke sentra/Pelabuhan Perikanan dimana tempat beraktifitasnya sebagian besar Nelayan/AKP serta melakukan percepatan pelayanan Buku Pelaut Perikanan (BPP)	Melakukan koordinasi dengan BRSDM KP (Pusat KP) untuk melaksanakan percepatan dan/atau pelayanan dokumen/sertifikat kompetensi/keahlian AKP di PPS Cilacap termasuk penerbitan BPP di TA 2025
		3. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera (nilai)	Persen	85	Tahunan	Tersedianya Dokumen STBLKK sesuai ketentuan	Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di PPelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	95,66	112,54	Capaian kinerja Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sudah Optimal bahkan cenderung melebihi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja organisasi	Pelaksanaan pelayanan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dapat optimal khususnya Lembar Awal (LA) karena peningkatan kepatuhan kapal dengan skema Pascaproduksi	Pelaksanaan pelayanan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan akan dilakukan peningkatan dengan melakukan penerbitan SHTI Lembar Turunan yang tentu akan mendorong (melakukan sosialisasi dan asistensi) UPI di sekitar PPSC agar dapat secara langsung melakukan kegiatan Ekspor ke EU dan/atau Negara ketiga
						Tersedianya Dokumen PB sesuai ketentuan	Penerbitan Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap					
						Tersedianya Dokumen SHTI sesuai ketentuan	Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap					

Cilacap, 3 Januari 2024

Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran



Abdul Iman

PERHITUNGAN NILAI KINERJA TINGKAT PELAYANAN KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

Periode : Triwulan IV

Bulan	Pelayanan Penerbitan Dokumen Kesyahbandaran											
	Persetujuan Berlayar (PB)				Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK)				Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)			
	Jumlah Diterbitkan	Jumlah Kapal Beraktifitas	Nilai Per Variabel (X1)	Bobot (40%)	Jumlah Diterbitkan	Jumlah Kapal Beraktifitas	Nilai Per Variabel (X2)	Bobot (40%)	Jumlah Diterbitkan	Jumlah Permohonan Verifikasi	Nilai Per Variabel (X2)	Bobot (20%)
Oktober	388	425	91	36,52	425	425	100	40,00	166	-	100	20,00
November	304	306	99	39,74	306	306	100	40,00	99	-	100	20,00
Desember	126	323	39	15,60	323	323	100	40,00	62		100	20,00
Nila Pelayanan (%)				30,62				40,00				20,00
Tingkat Pelayanan = X1+X2+X3 (%)												90,62

Sd.TWIV

95,66

A-

NO	BULAN	Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Bagi Awak Kapal Perikanan			Persentase (%)
		Pengesahan dokumen PKL	Awak Kapal Perikanan (AKP) yang Memiliki Kompetensi	Awak Kapal Perikanan (AKP) yang Mengikuti Kepesertaan Jaminan Sosial	(d/c)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
1	JANUARI	255	33	3,389	12.94
2	FEBRUARI	339	35	3,023	10.32
3	MARET	790	82	1,738	10.38
4	APRIL	1,742	157	3,570	9.01
5	MEI	1,388	147	3,147	10.59
6	JUNI	1,435	141	2,995	9.83
7	JULI	1,629	155	4,067	9.52
8	AGUSTUS	1,620	168	3,600	10.37
9	SEPTEMBER	1,384	134	3,389	9.68
10	OKTOBER	1,773	177	4,135	9.98
11	NOVEMBER	1,420	146	3,245	10.28
12	DESEMBER	731	75	1,519	10.26
JUMLAH		14,506	1,450		10.26
BPP			272		11.87

Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran



Abdul Iman

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KAPAL PERIKANAN IZIN DAERAH YANG MEMENUHI KETENTUAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

BULAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
JANUARI	70	37
FEBUARI	80	38
MARET	73	39
APRIL	73	46
MEI	92	41
JUNI	44	50
JULI	70	39
AGUSTUS	21	35
SEPTEMBER	28	37
OKTOBER	25	21
NOVEMBER	8	13
DESEMBER	16	38
JUMLAH	600	434
TOTAL	1.034	

Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran



Abdul Iman, S.St.Pi, M.Pi

**PENERBITAN SKKP DAERAH
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
BULAN : JANUARI 2024**

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKP	Jenis API
1	JAYA MULYA	BUDI YUNARTO	20	B.001/PPSC/PI.210/I/2024	02/01/2024	Hendriyanto, A.Md	Jaring Insang Hanyut
2	Melati indah iX	H. KARDI	22	B.002/PPSC/PI.210/I/2024	04/01/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Jaring Insang Hanyut
3	SUNGAI ROKAN	TJOEI TIE	30	B.003/PPSC/PI.210/I/2024	04/01/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Jaring Insang Hanyut
4	HINDIA	SIE LIONG	29	B.008/PPSC/PI.210/I/2024	08/01/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
5	LANCAR INDAH 1	H. NARI	17	B.006/PPSC/PI.210/I/2024	08/01/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
6	LITA AMELIA	ULAN	24	B.005/PPSC/PI.210/I/2024	08/01/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Jaring Insang Hanyut
7	MAKMUR JAYA BAHARI XII	BAHASAN	30	B.007/PPSC/PI.210/I/2024	08/01/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
8	Usaha Jaya	PAIMIN	18	B.004/PPSC/PI.210/I/2024	08/01/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Jaring Insang Hanyut
9	JEANNIE JAYA I	ELDY YULIYANTO	29	B.009/PPSC/PI.210/I/2024	09/01/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
10	WIJAYA SARI	HERY HENDRA	29	B.013/PPSC/PI.210/I/2024	11/01/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Rawai Tuna
11	ANITA JAYA - IV	OEY GIOK HWA	24	B.014/PPSC/PI.210/I/2024	11/01/2024	Iskandar	Pancing Ulur
12	DAYA MULIA	AWARUDIN	23	B.016/PPSC/PI.210/I/2024	11/01/2024	Hendriyanto, A.Md	Pancing Ulur
13	GEDE GEDE SUKSES	KIAM LIP	21	B.011/PPSC/PI.210/I/2024	11/01/2024	Lutfi Atikoh	Jaring Insang Hanyut
14	LAMPION ABADI II	SUMANTRI	30	B.012/PPSC/PI.210/I/2024	11/01/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
15	MUDAH JAYA 20	AI NGO	26	B.017/PPSC/PI.210/I/2024	11/01/2024	Hendriyanto, A.Md	Pancing Ulur
16	SUMBER HASIL 9	BUDI HARTA	30	B.015/PPSC/PI.210/I/2024	11/01/2024	Iskandar	Pancing Ulur
17	TIRTA SAMUDRA	TRIJATI	28	B.010/PPSC/PI.210/I/2024	11/01/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
18	GEDE GEDE SUKSES	KIAM LIP	21	B.011/PPSC/PI.210/I/2024	11/01/2024	Lutfi Atikoh	Jaring Insang Hanyut
19	LAMPION ABADI II	SUMANTRI	30	B.012/PPSC/PI.210/I/2024	11/01/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
20	WIJAYA SARI	HERY HENDRA	29	B.013/PPSC/PI.210/I/2024	11/01/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Rawai Tuna
21	ANUGERAH REJEKI	TRI HARTONO	30	B.018/PPSC/PI.210/I/2024	17/01/2024	Iskandar	Pancing Ulur
22	BINA HASIL 7	HADITYA SURONO	29	B.021/PPSC/PI.210/I/2024	22/01/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
23	BINA HASIL B	TUN TJAN	20	B.022/PPSC/PI.210/I/2024	22/01/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
24	MINA KARUNIA	LUSI	28	B.020/PPSC/PI.210/I/2024	22/01/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
25	TRI SAKTI III	YUWONO MINDARTO	29	B.019/PPSC/PI.210/I/2024	22/01/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Jaring Insang Hanyut
26	JEANNIE JAYA 3	ELDY YULIYANTO	30	B.023/PPSC/PI.210/I/2024	23/01/2024	Hendriyanto, A.Md	Pancing Ulur
27	JAYA PRIMA 3	MARIE	27	B.027/PPSC/PI.210/I/2024	24/01/2024	Iskandar	Pancing Ulur
28	AJAYA LESTARI	KASMAN	21	B.033/PPSC/PI.210/I/2024	25/01/2024	Iskandar	Pancing Ulur

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKP	Jenis API
29	SUMBER CIPTA	TUN TJAN	28	B.032/PPSC/PI.210/I/2024	25/01/2024	Iskandar	Rawai Tuna
30	SUMBER HASIL	BUDI HARTA	28	B.030/PPSC/PI.210/I/2024	25/01/2024	Iskandar	Rawai Tuna
31	ARDAN JAYA 7	SURATMI	10	B.040/PPSC/PI.210/I/2024	27/01/2024	Iskandar	Pancing Ulur
32	LANCAR BERKAH ABADI	KUN HOO	29	B.041/PPSC/PI.210/I/2024	27/01/2024	Iskandar	Pancing Ulur
33	SRI RAHAYU	HADITYA SURONO	24	B.039/PPSC/PI.210/I/2024	27/01/2024	Iskandar	Pancing Ulur
34	BINA HASIL 8	LILIANI	29	B.038/PPSC/PI.210/I/2024	27/01/2024	Iskandar	Pancing Ulur
35	BINA HASIL 88	HADITYA SURONO	29	B.037/PPSC/PI.210/I/2024	29/01/2024	Iskandar	Pancing Ulur
36	HIDUP SENTOSA 2	BUDI HARTA	23	B.042/PPSC/PI.210/I/2024	31/01/2024	Iskandar	Jaring Insang Hanyut
37	ULI JAYA	BAHASAN	27	B.043/PPSC/PI.210/I/2024	31/01/2024	Iskandar	Pancing Ulur

**PENERBITAN SKKP DAERAH
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
BULAN : FEBRUARI 2024**

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKP	Jenis API
1	MUDAH JAYA 11	AI NGO	29	B.044/PPSC/PI.210/II/2024	01/02/2024	Narsun, A.Pi., M.Tr.Pi	Rawa Tuna
2	FAJAR	TAN TIONG LIE	29	B.060/PPSC/PI.210/II/2024	10/02/2024	Iskandar	Rawa Tuna
3	FAJAR 5	TAN TIONG LIE	26	B.061/PPSC/PI.210/II/2024	10/02/2024	Iskandar	Pancing Ulur
4	KENDEDES	SENTOSA	30	B.067/PPSC/PI.210/II/2024	10/02/2024	Iskandar	Pancing Ulur
5	KENDI MAS	SENTOSA	30	B.066/PPSC/PI.210/II/2024	10/02/2024	Iskandar	Pancing Ulur
6	SELAT JAYA	SENTOSA	24	B.065/PPSC/PI.210/II/2024	10/02/2024	Iskandar	Pancing Ulur
7	PUTRI KHARISMA 01	SENTOSA	29	B.064/PPSC/PI.210/II/2024	10/02/2024	Iskandar	Pancing Ulur
8	DELIMA JAYA	JAMPEN	20	B.056/PPSC/PI.210/II/2024	07/02/2024	Iskandar	Jaring Insang Hanyut
9	PELANGI5	EKO YULIANTO	27	B.053/PPSC/PI.210/II/2024	06/02/2024	Iskandar	Pancing Ulur
10	PHINISI UNION	SENTOSA	29	B.063/PPSC/PI.210/II/2024	10/02/2024	Iskandar	Rawa Tuna
11	PHINISI UNION I	SENTOSA	28	B.062/PPSC/PI.210/II/2024	10/02/2024	Iskandar	Rawa Tuna
12	ARDAN JAYA	SURATMI	28	B.059/PPSC/PI.210/II/2024	07/02/2024	Lutfi Atikoh	Jaring Insang Hanyut
13	ARINDA	SIE LIONG	22	B.051/PPSC/PI.210/II/2024	05/02/2024	Iskandar	Jaring Insang Hanyut
14	INDAH MAJU BERSAMA 1	PT. BINTANG LAUT CILACA	30	B.047/PPSC/PI.210/II/2024	05/02/2024	Iskandar	Pancing Ulur
15	RAHAYU JAYA 2	JAMPEN	13	B.055/PPSC/PI.210/II/2024	07/02/2024	Iskandar	Jaring Insang Hanyut
16	Sumber Laut Rambo	TJUI LENG AL DJAIDIN	25	B.058/PPSC/PI.210/II/2024	07/02/2024	Narsun, A.Pi., M.Tr.Pi	Pancing Ulur
17	INDAH MAJU BERSAMA 5	PT. BINTANG LAUT CILACA	30	B.048/PPSC/PI.210/II/2024	05/02/2024	Iskandar	Pancing Ulur
18	INDAH MAJU BERSAMA 7	PT. BINTANG LAUT CILACA	30	B.049/PPSC/PI.210/II/2024	05/02/2024	Iskandar	Pancing Ulur
19	MITRA JAYA	TUN TJAN	29	B.050/PPSC/PI.210/II/2024	05/02/2024	Iskandar	Rawa Tuna
20	PELITA USAHA	CUN GIE	30	B.046/PPSC/PI.210/II/2024	05/02/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
21	WAHYU JAYA MANDIRI 08	TIARA SIKSANTI	19	B.054/PPSC/PI.210/II/2024	07/02/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
22	ISAH JAYA I	SUBADRIYAH	21	B.052/PPSC/PI.210/II/2024	06/02/2024	Hendriyanto, A.Md	Pancing Ulur Tuna
23	MUDAH JAYA 28	AI NGO	29	B.057/PPSC/PI.210/II/2024	07/02/2024	Hendriyanto, A.Md	Pancing Ulur
24	ANGSA LAUT JAYA 2	MASANTO	29	B.071/PPSC/PI.210/II/2024	19/02/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
25	ARABIKA JAYA II	KRISTIANI NINGSIH	29	B.068/PPSC/PI.210/II/2024	14/02/2024	Iskandar	Pancing Ulur
26	KERIS JAYA III	KRISTIANI NINGSIH	30	B.069/PPSC/PI.210/II/2024	14/02/2024	Iskandar	Pancing Ulur
27	PELANGI 8	EKO YULIANTO	24	B.074/PPSC/PI.210/II/2024	19/02/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
28	SEJATI 35	JULIONO	29	B.073/PPSC/PI.210/II/2024	19/02/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKP	Jenis API
29	UNITED III	MERY SUMARNI	27	B.072/PPSC/PI.210/II/2024	19/02/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Jaring Insang Hanyut
30	WAHYU JAYA MANDIRI 09	PRIYONO	21	B.070/PPSC/PI.210/II/2024	15/02/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Pancing Ulur
31	KEMBANG JAYA	VIANDI SUWANDI	30	B.087/PPSC/PI.210/II/2024	24/02/2024	Iskandar	Rawai Tuna
32	REJEKI JAYA SENTOSA 8	DANIEL STEVEN	30	B.084/PPSC/PI.210/II/2024	23/02/2024	Iskandar	Pancing Ulur
33	SABRINA 01	FABIAN FIRMANSYAH RAM	26	B.085/PPSC/PI.210/II/2024	23/02/2024	Iskandar	Pancing Ulur
34	ASIH JAYA	KASWAN JUPRIONO	17	B.089/PPSC/PI.210/II/2024	27/02/2024	Iskandar	Pancing Ulur
35	BINTANG REJEKI 02	PT. TIGA SINERGI BERJAYA	29	B.090/PPSC/PI.210/II/2024	27/02/2024	Iskandar	Pancing Ulur
36	JAYA TERUS	MERY SUMARNI	29	B.091/PPSC/PI.210/II/2024	27/02/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
37	SYAH REJEKI	IE, IVONE LELYANA	16	B.088/PPSC/PI.210/II/2024	27/02/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
38	CAHAYA MUTIARA LAUT	PT. CAHAYA LAUTAN BAH	29	B.045/PPSC/PI.210/II/2024	05/02/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Pancing Ulur

**PENERBITAN SKKP DAERAH
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
BULAN : MARET 2024**

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKP	Jenis API
1	ASIH NELAYAN JAYA 107	NELYDATU ROHMAH	30	B.109/PPSC/PI.210/III/2024	16/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur
2	BINTANG REJEKI X01	RATNA JUWITA	14	B.096/PPSC/PI.210/III/2024	02/03/2024	Dian Prihantara	Jaring Insang Hanyut
3	GANESA JAYA I	LIEM, ANASTASIA CHARISM	30	B.097/PPSC/PI.210/III/2024	04/03/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
4	Gaya Baru	SUTARNI SUTIMAN	26	B.102/PPSC/PI.210/III/2024	08/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur
5	HINDIA	SIE LIONG	29	B.101/PPSC/PI.210/III/2024	07/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur
6	INDO MARINA 1	PT INTI MARINA SEJAHTER	29	B.114/PPSC/PI.210/III/2024	16/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur
7	JEANNIE JAYA 5	TJUI LENG AL DJAIDIN	29	B.103/PPSC/PI.210/III/2024	08/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur
8	MAKMUR JAYA BAHARI IX	PT MAKMUR ALAM BAHAR	30	B.110/PPSC/PI.210/III/2024	16/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur
9	MAKMUR JAYA BAHARI VIII	PT MAKMUR ALAM BAHAR	30	B.098/PPSC/PI.210/III/2024	06/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur
10	MARINI 02	AGUS YULIANTORO	29	B.104/PPSC/PI.210/III/2024	08/03/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur
11	PANGUDI JAYA	HERY HENDRA	29	B.108/PPSC/PI.210/III/2024	16/03/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
12	PUTRA JAYA XII	LIAN EK	30	B.112/PPSC/PI.210/III/2024	16/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur
13	PUTRA JAYA XV	BUDHI	29	B.113/PPSC/PI.210/III/2024	16/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur
14	PUTRA JAYA XVII	OCTAVIANUS	30	B.112/PPSC/PI.210/III/2024	16/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur
15	PUTRA SIDOMAS I	IE, IVONE LELYANA	19	B.105/PPSC/PI.210/III/2024	08/03/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Pancing Ulur
16	SEMAKIN HARI REJEKI	TIONO	22	B.100/PPSC/PI.210/III/2024	06/03/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Jaring Insang Hanyut
17	SEMAKIN JAYA	TIONO	21	B.099/PPSC/PI.210/III/2024	06/03/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Jaring Insang Hanyut
18	TAMBORA MAS	SUMANTRI	20	B.106/PPSC/PI.210/III/2024	14/03/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
19	TIMUR JAYA 6	HARPIN	30	B.107/PPSC/PI.210/III/2024	16/03/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
20	HASIL SUMBER ALAM	JONNY	22	B.117/PPSC/PI.210/III/2024	18/03/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
21	RUJAS JAYA	SUJASMAN	17	B.116/PPSC/PI.210/III/2024	18/03/2024	Lutfi Atikoh	Jaring Insang Hanyut
22	SAMBUNG BARU	WIWIK SUPARWATI	22	B.115/PPSC/PI.210/III/2024	18/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur
23	BERKAT MELIMPAH 6	WINSON CAHYADI	17	B.122/PPSC/PI.210/III/2024	19/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur
24	CENDANA SARI	SUANDI KASDI	30	B.119/PPSC/PI.210/III/2024	19/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur
25	GARUDA PERKASA 20	ANDY	30	B.124/PPSC/PI.210/III/2024	20/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur
26	JAYA PRIMA 5	MARIE	29	B.121/PPSC/PI.210/III/2024	19/03/2024	Hendriyanto, A.Md	Pancing Ulur
27	MAJU BERSAMA -II	MARIE	30	B.120/PPSC/PI.210/III/2024	19/03/2024	Hendriyanto, A.Md	Pancing Ulur
28	SARI MULYA 10	JONI	28	B.118/PPSC/PI.210/III/2024	19/03/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Pancing Ulur

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKP	Jenis API
29	BUANA PUTRA 01	DESY WIDYASARI	27	B.125/PPSC/PI.210/III/2024	20/03/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
30	LAMPION ABADI III	KIE TJAN	29	B.126/PPSC/PI.210/III/2024	20/03/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
31	PUTRA MARITIM 03	WILLY WIRA PRATAMA	29	B.128/PPSC/PI.210/III/2024	22/03/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur Tuna
32	GUNUNG SARI I	HERY HENDRA	30	B.133/PPSC/PI.210/III/2024	29/03/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
33	HILYA 07	DAVID PRIHARJO	29	B.127/PPSC/PI.210/III/2024	21/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur
34	JAYA PRIMA 8	FREDY LIM	30	B.134/PPSC/PI.210/III/2024	29/03/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
35	PURNAMA II	SUDI	28	B.129/PPSC/PI.210/III/2024	27/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur
36	IDOLA	SUTARNI SUTIMAN	23	B.132/PPSC/PI.210/III/2024	29/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur
37	HASIL TERUS	EH DIE	26	B.131/PPSC/PI.210/III/2024	27/03/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Jaring Insang Hanyut
38	GELORA SAMUDERA - II	MARLIYAH	28	B.136/PPSC/PI.210/III/2024	31/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur
39	PULAU IKAN	SUTRISNO	27	B.137/PPSC/PI.210/III/2024	31/03/2024	Iskandar	Pancing Ulur Tuna

**PENERBITAN SKKP DAERAH
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
BULAN : APRIL 2024**

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKKP	Jenis API
1	ANGSA LAUT JAYA	MASANTO	29	B.142/PPSC/PI.210/IV/2024	02/04/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
2	ANITA JAYA V	MINTARSIH	29	B.140/PPSC/PI.210/IV/2024	02/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
3	ANITA JAYA VI	ANDRI	29	B.153/PPSC/PI.210/IV/2024	06/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
4	ANUGRAH JAYA MELIMPAH	TEGUH SANTOSO WIDIJAN	30	B.147/PPSC/PI.210/IV/2024	04/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
5	ARABIKA JAYA IV	KRISTIANI NINGSIH	29	B.152/PPSC/PI.210/IV/2024	06/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
6	ASIH NELAYAN JAYA	SUPRIYADI	28	B.170/PPSC/PI.210/IV/2024	23/04/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
7	BAKHRI SAFA'AT	HARPIN	28	B.172/PPSC/PI.210/IV/2024	23/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
8	BERKAH MULIA 8	SARDINA	29	B.171/PPSC/PI.210/IV/2024	23/04/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
9	BERKAT SAMUDRA JAYA	YOSEP SARAGIH	30	B.146/PPSC/PI.210/IV/2024	04/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
10	DARMA SETIA	HARTONO	24	B.174/PPSC/PI.210/IV/2024	25/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
11	DARMA SETIA I	HARTONO	30	B.139/PPSC/PI.210/IV/2024	02/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
12	GANESA JAYA	ULAN	29	B.150/PPSC/PI.210/IV/2024	04/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
13	HALDY II	SUDI	22	B.158/PPSC/PI.210/IV/2024	19/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
14	HALDY JAYA	KIE TJAN	27	B.151/PPSC/PI.210/IV/2024	06/04/2024	Dian Prihantara	Rawai Tuna
15	HASIL MAJU 2	LILIES	30	B.162/PPSC/PI.210/IV/2024	19/04/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
16	HASIL MAJU 3	SONAM VIRYA TAN	30	B.178/PPSC/PI.210/IV/2024	30/04/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur
17	HIDUP SENTOSA	BUDI HARTA	28	B.166/PPSC/PI.210/IV/2024	22/04/2024	Iskandar	Jaring Insang Hanyut
18	INTI KARYA II	SUMANTRI	18	B.155/PPSC/PI.210/IV/2024	06/04/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
19	JEANNIE JAYA 2	ELDY YULIANTO	29	B.159/PPSC/PI.210/IV/2024	19/04/2024	Welly Yunianto	Pancing Ulur
20	KALI SERAYU	TJOEI TIE	29	B.167/PPSC/PI.210/IV/2024	22/04/2024	Hendriyanto, A.Md	Pancing Ulur
21	KALI SERAYU 1	ALDI ANANG SEPTRIADI	30	B.177/PPSC/PI.210/IV/2024	25/04/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Pancing Ulur
22	MEKAR SARI MAKMUR	AGUS YULIANTORO	30	B.182/PPSC/PI.210/IV/2024	30/04/2024	Kushartanto Ahmad Santosa, S	Pancing Ulur
23	MINA SARI	KALIM MURNI	29	B.161/PPSC/PI.210/IV/2024	19/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
24	MITRA JAYA PERKASA	TUJO	28	B.156/PPSC/PI.210/IV/2024	18/04/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKKP	Jenis API
25	MUDAH JAYA 8	BURHAN	30	B.144/PPSC/PI.210/IV/2024	04/04/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Rawai Tuna
26	MUDAH JAYA 9	DODDY	20	B.175/PPSC/PI.210/IV/2024	25/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
27	NUSANTARA 1	SUTRISNO	27	B.176/PPSC/PI.210/IV/2024	25/04/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Pancing Ulur
28	NUSANTARA BAHARI 1	PT. NUSANTARA ALAM BAH	29	B.165/PPSC/PI.210/IV/2024	20/04/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
29	PHINISI NUSANTARA	MERY SUMARNI	21	B.145/PPSC/PI.210/IV/2024	04/04/2024	Iskandar	Jaring Insang Hanyut
30	PUTRA GUNAWAN 1	ANG PING HA	30	B.163/PPSC/PI.210/IV/2024	20/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
31	PUTRA JAYA IX	OCTAVIANUS	29	B.141/PPSC/PI.210/IV/2024	02/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
32	PUTRA JAYA XI	LIAN EK	30	B.149/PPSC/PI.210/IV/2024	04/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
33	RYZKY 8	H. KARDI	30	B.164/PPSC/PI.210/IV/2024	19/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
34	SADI NUR F	WAGIYONO, SE	9	B.179/PPSC/PI.210/IV/2024	28/04/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur
35	SENANG HATI I	HARJO BUDIMAN	27	B.157/PPSC/PI.210/IV/2024	19/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
36	SETIA JAYA 68	SUTRISNO T	30	B.173/PPSC/PI.210/IV/2024	24/04/2024	Kushartanto Ahmad Santosa, S	Pancing Ulur
37	SINAR MUTIARA LAUT I	SUGIARTO	30	B.180/PPSC/PI.210/IV/2024	28/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
38	SOECHI 01	SUDI	20	B.181/PPSC/PI.210/IV/2024	29/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
39	SPRIT SUKSES MAKMUR	BUDIONO	29	B.160/PPSC/PI.210/IV/2024	19/04/2024	Welly Yunianto	Pancing Ulur
40	SWARNA JAYA	CINTYA LADYANA	29	B.154/PPSC/PI.210/IV/2024	06/04/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Rawai Tuna
41	SWARNA JAYA 2	CINTYA LADYANA	29	B.169/PPSC/PI.210/IV/2024	23/04/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Rawai Tuna
42	TANJUNG PERMATA	FANDY MARCELLO	29	B.148/PPSC/PI.210/IV/2024	04/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
43	WIGUNA JAYA	HARTONO	21	B.143/PPSC/PI.210/IV/2024	02/04/2024	Lutfi Atikoh	Jaring Insang Hanyut
44	WILSON JAYA 28	PT INTI MARINA SEJAHTER	30	B.168/PPSC/PI.210/IV/2024	22/04/2024	Hendriyanto, A.Md	Pancing Ulur
45	BERLIMPAH REJEKI	DIDIK NURAHMAN	29	B.184/PPSC/PI.210/IV/2024	30/04/2024	Iskandar	Pancing Ulur
46	SARI MULIA MAKMUR	JONI	25	B.183/PPSC/PI.210/IV/2024	30/04/2024	Hendriyanto, A.Md	Rawai Tuna

**PENERBITAN SKKP DAERAH
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
BULAN : MEI 2024**

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKKP	Jenis API
1	ABADI JAYA	AWARUDIN	30	B.199/PPSC/PI.210/V/2024	14/05/2024	Iskandar	Pancing Ulur
2	ADHIKA II	DEDDYANTO	22	B.187/PPSC/PI.210/V/2024	06/05/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Jaring Insang Hanyut
3	ALAM INDAH	JONI	27	B.217/PPSC/PI.210/V/2024	24/05/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Pancing Ulur
4	ALMIRA JAYA	JAMPEN	20	B.197/PPSC/PI.210/V/2024	09/05/2024	Welly Yunianto	Jaring Insang Hanyut
5	ALONG MULIA	AWARUDIN	30	B.201/PPSC/PI.210/V/2024	15/05/2024	Kushartanto Ahmad Santosa,	Pancing Ulur
6	BAHARI INDAH	CATUR DANY SETIAWAN	29	B.203/PPSC/PI.210/V/2024	17/05/2024	Welly Yunianto	Rawai Tuna
7	BERKAH MELIMPAH JAYA 5	LIM LE HWA	30	B.192/PPSC/PI.210/V/2024	07/05/2024	Iskandar	Pancing Cumi
8	BERKAH MUTIARA SELATAN I	SUKAINAH	23	B.208/PPSC/PI.210/V/2024	18/05/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
9	BERKAT MELIMPAH 10	SRI HARTATI	17	B.216/PPSC/PI.210/V/2024	21/05/2024	Iskandar	Pancing Ulur
10	BERKAT MELIMPAH 11	LIM LE HWA	29	B.193/PPSC/PI.210/V/2024	07/05/2024	Iskandar	Pancing Cumi
11	BERKAT MELIMPAH 12	SRI HARTATI	17	B.213/PPSC/PI.210/V/2024	21/05/2024	Iskandar	Pancing Ulur
12	BERKAT MELIMPAH 9	LIM LE HWA	29	B.189/PPSC/PI.210/V/2024	07/05/2024	Iskandar	Pancing Cumi
13	BUNGA INDAH JAYA	TANESIH	12	B.205/PPSC/PI.210/V/2024	17/05/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur
14	CITRA	MINTARSIH	23	B.196/PPSC/PI.210/V/2024	09/05/2024	Welly Yunianto	Pancing Ulur
15	CITRA ABADI	MINTARSIH	28	B.185/PPSC/PI.210/V/2024	02/05/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
16	COLOMBIA 11	LIM LE HWA	29	B.191/PPSC/PI.210/V/2024	07/05/2024	Iskandar	Pancing Ulur
17	COLOMBIA 12	LIM LE HWA	29	B.190/PPSC/PI.210/V/2024	07/05/2024	Iskandar	Pancing Ulur
18	FIQA JAYA	YATIMAN	9	B.224/PPSC/PI.210/V/2024	29/05/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
19	GLORIA I	BONG LIONG	21	B.186/PPSC/PI.210/V/2024	06/05/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Jaring Insang Hanyut
20	HASIL SUMBER ALAM 1	JONNY	29	B.195/PPSC/PI.210/V/2024	09/05/2024	Iskandar	Pancing Ulur
21	ILHAM PUTRA II	SUTARMAN	29	B.188/PPSC/PI.210/V/2024	07/05/2024	Dian Prihantara	Jaring Insang Hanyut
22	INTAN JAYA BAHARI	AGUS AVIANTO	18	B.206/PPSC/PI.210/V/2024	17/05/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur
23	JAMBU AIR	MASANTO	9	B.224/PPSC/PI.210/V/2024	29/05/2024	Iskandar	Pancing Ulur
24	KM NELAYAN 2016 334	KUD MINASARI PANGANDA	6	B.202/PPSC/PI.210/V/2024	15/05/2024	Narsun, A.Pi., M.Tr.Pi	Jaring Insang Hanyut
25	KURNIA MAKMUR 1	SURONO	18	B.204/PPSC/PI.210/V/2024	17/05/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
26	MAJU JAYA 3	AGUS YULIANTORO	9	B.225/PPSC/PI.210/V/2024	29/05/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur
27	MAJU MULIA	AWARUDIN	26	B.200/PPSC/PI.210/V/2024	15/05/2024	Kushartanto Ahmad Santosa,	Jaring Insang Hanyut
28	MAYSHA -2	JAMPEN	28	B.212/PPSC/PI.210/V/2024	20/05/2024	Iskandar	Jaring Insang Hanyut
29	NUSANTARA 35	SUTRISNO	22	B.226/PPSC/PI.210/V/2024	29/05/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Jaring Insang Hanyut
30	PULAU DEWATA	PT HASIL MELIMPAH JAYA	28	B.223/PPSC/PI.210/V/2024	29/05/2024	Iskandar	Pancing Ulur
31	PUTRA SIDOMAS 3	ANDREW NICODEMUS USC	28	B.198/PPSC/PI.210/V/2024	14/05/2024	Iskandar	Pancing Ulur
32	RIZKI LADUNI 2	LUKMAN HAKIM	10	B.215/PPSC/PI.210/V/2024	21/05/2024	Iskandar	Pancing Ulur

[illegible]

**PENERBITAN SKKP DAERAH
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
BULAN : JUNI 2024**

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKKP	Jenis API
1	ALVIANO	FABIAN FIRMANSYAH RAM	21	B.237/PPSC/PI.210/VI/2024	11/06/2024	Hendriyanto, A.Md	Pancing Ulur
2	ANTON JAYA 1	SUJASMAN	25	B.242/PPSC/PI.210/VI/2024	13/06/2024	Dian Prihantara	Jaring Insang Hanyut
3	ARDAN JAYA 11	SURATMI	30	B.243/PPSC/PI.210/VI/2024	13/06/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
4	ARDAN JAYA V	SURATMI	29	B.230/PPSC/PI.210/VI/2024	05/06/2024	Dian Prihantara	Jaring Insang Hanyut
5	ATERIA DAYA MULYA I	SAMPO AL WARSITO	23	B.247/PPSC/PI.210/VI/2024	15/06/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Pancing Ulur
6	BAHARI WIJAYA 01	LILIES	29	B.257/PPSC/PI.210/VI/2024	24/06/2024	Kushartanto Ahmad Santosa,	Pancing Ulur
7	BAHTERA JAYA I	JU LIE	22	B.256/PPSC/PI.210/VI/2024	24/06/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
8	BANGKIT 7	H. SUYANTO	12	B.273/PPSC/PI.210/VI/2024	26/06/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
9	BERKAT MELIMPAH 17	SRI HARTATI	25	B.259/PPSC/PI.210/VI/2024	24/06/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pengangkut
10	BINTANG ABADI 85	FREDY ANGGARA	10	B.240/PPSC/PI.210/VI/2024	13/06/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
11	BINTANG MAJU 01	UN JULIONO	30	B.250/PPSC/PI.210/VI/2024	20/06/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Pancing Ulur
12	BUANA PUTRA 02	DESY WIDYASARI	29	B.267/PPSC/PI.210/VI/2024	25/06/2024	Welly Yunianto	Pancing Ulur
13	CITRA MARINA I	PT INTI MARINA SEJAHTER	30	B.233/PPSC/PI.210/VI/2024	11/06/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur
14	CITRA NUSANTARA III	KALIM MURNY	29	B.260/PPSC/PI.210/VI/2024	24/06/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
15	DELTA AGUNG	UN JULIONO	10	B.232/PPSC/PI.210/VI/2024	08/06/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Pancing Ulur
16	DERAYA UTAMA SAMUDERA	RIO ADITYA	28	B.268/PPSC/PI.210/VI/2024	25/06/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
17	ELANDA	LIAN EK	22	B.254/PPSC/PI.210/VI/2024	22/06/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
18	GUNAWAN 28 JAYA V	ANG PING HA	30	B.252/PPSC/PI.210/VI/2024	22/06/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur
19	GUNUNG TUJUH III	TINA ENI	28	B.255/PPSC/PI.210/VI/2024	22/06/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Rawai Tuna
20	HASIL MAJU I	SONAM VIRYA TAN	26	B.228/PPSC/PI.210/VI/2024	05/06/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
21	JAYA PRIMA	FREDY LIM	29	B.236/PPSC/PI.210/VI/2024	11/06/2024	Kushartanto Ahmad Santosa,	Pancing Ulur
22	KARTIKA SARI	HARPIN	28	B.235/PPSC/PI.210/VI/2024	11/06/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Pancing Ulur
23	KM NELAYAN 2016 330	KUD MINASARI PANGAND	6	B.241/PPSC/PI.210/VI/2024	13/06/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Jaring Insang Hanyut
24	Layla Marina II	PT INTI MARINA SEJAHTER	30	B.271/PPSC/PI.210/VI/2024	26/06/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
25	MAKMUR JAYA BAHARI VII	BAHASAN	30	B.246/PPSC/PI.210/VI/2024	15/06/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur
26	MARUNG BIRU	HARPIN	27	B.238/PPSC/PI.210/VI/2024	12/06/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
27	MUDAH JAYA 15	BURHAN	30	B.274/PPSC/PI.210/VI/2024	26/06/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Rawai Tuna
28	MUDAH JAYA 22	BURHAN	29	B.258/PPSC/PI.210/VI/2024	24/06/2024	Kushartanto Ahmad Santosa,	Pancing Ulur
29	PANTAI MUTIARA	HADITYA SURONO	29	B.234/PPSC/PI.210/VI/2024	11/06/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKKP	Jenis API
30	PIKTON JAYA 8	LILIANI	30	B.245/PPSC/PI.210/VI/2024	14/06/2024	Hendriyanto, A.Md	Pancing Ulur
31	PUSPITA V	CHERY	30	B.239/PPSC/PI.210/VI/2024	12/06/2024	Kushartanto Ahmad Santosa,	Pancing Ulur
32	PUTRA MARITIM 02	DAVID PRIHARJO	26	B.231/PPSC/PI.210/VI/2024	08/06/2024	Welly Yunianto	Pancing Ulur
33	PUTRA MORO III	KASMAN	25	B.244/PPSC/PI.210/VI/2024	14/06/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
34	REJEKI LAUT 18	RUDI HARTONO	22	B.269/PPSC/PI.210/VI/2024	26/06/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur
35	RIDHO ILLAHI 1	DAWAM	18	B.266/PPSC/PI.210/VI/2024	25/06/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
36	RISMA PUTRI MANDIRI 1	RISMA ARDHANA	30	B.262/PPSC/PI.210/VI/2024	24/06/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
37	RISMA PUTRI MANDIRI 2	RISMA ARDHANA	30	B.261/PPSC/PI.210/VI/2024	24/06/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
38	Rizky-7	H. KARDI	30	B.270/PPSC/PI.210/VI/2024	26/06/2024	Welly Yunianto	Pancing Ulur
39	SAPMA V	H. MOCHAMAD EKSAN	26	B.263/PPSC/PI.210/VI/2024	25/06/2024	Rista Tri Purnasari	Jaring Insang Hanyut
40	SEMBAJA II	YUWONO MINDARTO	24	B.272/PPSC/PI.210/VI/2024	26/06/2024	Lutfi Atikoh	Jaring Insang Hanyut
41	SUKA MAJU 35	LILIES	25	B.253/PPSC/PI.210/VI/2024	22/06/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur
42	SUMBER HASIL 8	BUDI HARTA	29	B.251/PPSC/PI.210/VI/2024	20/06/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
43	SUMBER MULIA 2	H. MUSONO ALIAS YUSUP	30	B.248/PPSC/PI.210/VI/2024	19/06/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
44	SUMBER MULYA I	SUPARDI	27	B.249/PPSC/PI.210/VI/2024	20/06/2024	Welly Yunianto	Pancing Ulur Tuna
45	TEKAD JAYA 1	TUMINO	16	B.265/PPSC/PI.210/VI/2024	25/06/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
46	TRI SAKTI V	AGUS DARMAWAN	29	B.229/PPSC/PI.210/VI/2024	05/06/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Jaring Insang Hanyut
47	YUDI - II	DEDDYANTO	28	B.264/PPSC/PI.210/VI/2024	25/06/2024	Welly Yunianto	Pancing Ulur
48	CITRA MARINA II	PT INTI MARINA SEJAHTER	29	B.277/PPSC/PI.210/VI/2024	30/06/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
49	MINATAMA KHATULISTIWA I	IVAN LEONARDI	28	B.276/PPSC/PI.210/VI/2024	30/06/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
50	SETIA JAYA 38	SAIFUL	29	B.278/PPSC/PI.210/VI/2024	30/06/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur

REKAP PENUGASAN JUNI 2024

PPKKP	Jml Kapal
Agung Ferieigha Nugroho	5
Dian Prihantara	8
Hendriyanto, A.Md	2
Kushartanto Ahmad Santo:	4
Lutfi Atikoh	5
Rista Tri Purnasari	7
Sulis Kurniyawati, S.S.T	5
Welly Yunianto	5
Yusvi Widya Ardiana, S.E	9
JUMLAH	50

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKKP	Jenis API
----	------------	--------------	-------------------	----------------	----------------	-------	-----------

REKAP	JANUARI	37
	FEBRUARI	38
	MARET	39
	APRIL	46
	MEI	41
	JUNI	50
	TOTAL	251

PENERBITAN SKKP DAERAH
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
BULAN : JULI S.D SEPTEMBER 2024

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKKP	Jenis API
1	ARDAN JAYA 10	SURATMI	9	B.322/PPSC/PI.210/VII/2024	31/07/2024	Iskandar	Pancing Ulur
2	ARDAN JAYA 2	SURATMI	29	B.321/PPSC/PI.210/VII/2024	31/07/2024	Iskandar	Jaring Insang Hanyut
3	BANGKIT 6	H. SUYANTO	20	B.299/PPSC/PI.210/VII/2024	21/07/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
4	BARU MUNCUL 3	HJ.AWEN	24	B.298/PPSC/PI.210/VII/2024	20/07/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Jaring Insang Hanyut
5	BINTANG KEJORA II	IVAN LEONARDI	29	B.289/PPSC/PI.210/VII/2024	10/07/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
6	CAMAR 11	SUNANTO	10	B.314/PPSC/PI.210/VII/2024	26/07/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur
7	CAMAR LAUT 888	WIWIK SUPARWATI	28	B.291/PPSC/PI.210/VII/2024	06/07/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
8	COLOMBIA 18	LILI NUR INDAH SARI	29	B.279/PPSC/PI.210/VII/2024	03/07/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Pancing Ulur
9	FLOBA MORA 02	DAVID PRIHARJO	9	B.310/PPSC/PI.210/VII/2024	24/07/2024	Iskandar	Pancing Ulur
10	FLOBA MORA 03	DAVID PRIHARJO	9	B.309/PPSC/PI.210/VII/2024	24/07/2024	Iskandar	Pancing Ulur
11	GAJAH MADA 11	AGUS BASUKI	12	B.318/PPSC/PI.210/VII/2024	30/07/2024	Welly Yunianto	Pancing Ulur
12	GUNAWAN 28 JAYA I	TINA ENI	30	B.297/PPSC/PI.210/VII/2024	17/07/2024	Welly Yunianto	Rawai Tuna
13	GUNAWAN 28 JAYA II	TINA ENI	30	B.288/PPSC/PI.210/VII/2024	06/07/2024	Rista Tri Purnasari	Rawai Tuna
14	HASIL MELIMPAH JAYA 2	WINSON CAHYADI	10	B.306/PPSC/PI.210/VII/2024	24/07/2024	Iskandar	Pancing Ulur
15	HASIL MELIMPAH JAYA 9	WINSON CAHYADI	25	B.305/PPSC/PI.210/VII/2024	24/07/2024	Iskandar	Pancing Ulur
16	JASON JAYA 8	LILIANI	30	B.292/PPSC/PI.210/VII/2024	11/07/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
17	KARTIKA ABADI	JINGGA SUGANDA	27	B.290/PPSC/PI.210/VII/2024	10/07/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Jaring Insang Hanyut
18	Karunia 11	SUNANTO	10	B.316/PPSC/PI.210/VII/2024	30/07/2024	Welly Yunianto	Pancing Ulur
19	KM NELAYAN 2016 328	KUD MINASARI PANGAND	6	B.320/PPSC/PI.210/VII/2024	30/07/2024	Narsun, A.Pi., M.Tr.Pi	Jaring Insang Hanyut
20	KM NELAYAN 2016 332	KUD MINASARI PANGAND	6	B.308/PPSC/PI.210/VII/2024	24/07/2024	Narsun, A.Pi., M.Tr.Pi	Jaring Insang Hanyut
21	LAYLA MARINA I	PT INTI MARINA SEJAHTER	30	B.283/PPSC/PI.210/VII/2024	04/07/2024	Kushartanto Ahmad Santosa,	Pancing Ulur
22	MUDA JAYA - 10	BURHAN	28	B.323/PPSC/PI.210/VII/2024	31/07/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Rawai Tuna
23	MUDAH JAYA - 13	AI NGO	28	B.319/PPSC/PI.210/VII/2024	30/07/2024	Kushartanto Ahmad Santosa,	Rawai Tuna
24	MURAH REJEKI 2	LILI	30	B.281/PPSC/PI.210/VII/2024	03/07/2024	Dian Prihantara	Jaring Insang Hanyut
25	PELITA SEJATI	AI NGO	30	B.303/PPSC/PI.210/VII/2024	23/07/2024	Iskandar	Pancing Ulur
26	PISANG JAYA II	JU LIE	26	B.294/PPSC/PI.210/VII/2024	12/07/2024	Lutfi Atikoh	Jaring Insang Hanyut
27	PRIMA KENCANA 7	CHERY	30	B.287/PPSC/PI.210/VII/2024	06/07/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur
28	PUSPITA - I	DEDDYANTO	28	B.296/PPSC/PI.210/VII/2024	17/07/2024	Welly Yunianto	Pancing Ulur
29	PUTRA USAHA 11	SUNANTO	10	B.317/PPSC/PI.210/VII/2024	30/07/2024	Welly Yunianto	Pancing Ulur
30	PUTRA USAHA 12	SUNANTO	14	B.311/PPSC/PI.210/VII/2024	26/07/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur
31	RIZKI LADUNI 3	LUKMAN HAKIM	10	B.304/PPSC/PI.210/VII/2024	23/07/2024	Iskandar	Pancing Ulur
32	SARI GEMILANG	PARMIN	10	B.312/PPSC/PI.210/VII/2024	26/07/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
33	SINAR PULAU KIJANG 9	LILI	28	B.282/PPSC/PI.210/VII/2024	03/07/2024	Dian Prihantara	Rawai Tuna
34	TIAR JAYA	INDRIANI	30	B.307/PPSC/PI.210/VII/2024	24/07/2024	Iskandar	Pancing Ulur
35	TRI PUTRA KARYA	DODDY	30	B.295/PPSC/PI.210/VII/2024	12/07/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Rawai Tuna
36	WAHYU REJEKI	SUTRIONO	10	B.313/PPSC/PI.210/VII/2024	26/07/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
37	WIGUNA I	JU LIE	29	B.315/PPSC/PI.210/VII/2024	26/07/2024	Dian Prihantara	Jaring Insang Hanyut
38	YUDI JAYA III	TJUN HWE	29	B.302/PPSC/PI.210/VII/2024	23/07/2024	Welly Yunianto	Rawai Tuna
39	YUDI JAYA VIII	CHERY	30	B.280/PPSC/PI.210/VII/2024	03/07/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
40	CHARLY WIJAYA	OEY GIOK HWA	36	B.325/PPSC/PI.210/VIII/2024	01/08/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Jaring Insang Hanyut
41	CITRA ABADI - II	SUTARNI SUTIMAN	13	B.324/PPSC/PI.210/VIII/2024	01/08/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Jaring Insang Hanyut
42	GARUDA JAYA	ANDY	30	B.327/PPSC/PI.210/VIII/2024	02/08/2024	Rista Tri Purnasari	Rawai Tuna
43	HASIL MELIMPAH JAYA 1	WINSON CAHYADI	10	B.328/PPSC/PI.210/VIII/2024	05/08/2024	Iskandar	Pancing Ulur
44	LANCAR BAHAGIA	HENDRI	24	B.326/PPSC/PI.210/VIII/2024	01/08/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
45	ASIA STAR - I	YUNUS	26	B.329/PPSC/PI.210/VIII/2024	11/08/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
46	LANCAR BAROKAH	PT. TIGA SINERGI BERJAYA	28	B.331/PPSC/PI.210/VIII/2024	12/08/2024	Iskandar	Pancing Ulur
47	YULI JAYA	INDRIANI	30	B.332/PPSC/PI.210/VIII/2024	12/08/2024	Iskandar	Pancing Ulur
48	ADHIKA - I	HJ.AWEN	19	B.330/PPSC/PI.210/VIII/2024	12/08/2024	Kushartanto Ahmad Santosa,	Jaring Insang Hanyut
49	KARTIKA JAYA	JINGGA SUGANDA	30	B.339/PPSC/PI.210/VIII/2024	19/08/2024	Lutfi Atikoh	Rawai Tuna
50	PUTRA BAROKAH	MUKLISAH	14	B.340/PPSC/PI.210/VIII/2024	19/08/2024	Welly Yunianto	Jaring Insang Hanyut
51	SEMPURNA BARU I	TJUI LENG AL DJAIDIN	25	B.338/PPSC/PI.210/VIII/2024	16/08/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
52	SUCI JAYA	MUKLISAH	29	B.337/PPSC/PI.210/VIII/2024	15/08/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
53	HARAPAN JAYA - II	REGINA CYNTHIA DEWI	29	B.335/PPSC/PI.210/VIII/2024	13/08/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur
54	MUTIARA JAYA	REGINA CYNTHIA DEWI	20	B.334/PPSC/PI.210/VIII/2024	13/08/2024	Iskandar	Pancing Ulur
55	SWARNA JAYA - 3	IDA ERI	25	B.336/PPSC/PI.210/VIII/2024	14/08/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Pancing Ulur
56	ADHIKA - I	HJ.AWEN	19	B.330/PPSC/PI.210/VIII/2024	12/08/2024	Kushartanto Ahmad Santosa,	Jaring Insang Hanyut
57	WIGUNA V	JU LIE	22	B.333/PPSC/PI.210/VIII/2024	15/08/2024	Arie Nurfiti, S.Pi	Jaring Insang Hanyut
58	ALAM INDAH	JONI	20	B.341/PPSC/PI.210/VIII/2024	20/08/2024	Iskandar	Pancing Ulur
59	SATRIA PUTRA MANDIRI	HARJO BUDIMAN	22	B.342/PPSC/PI.210/VIII/2024	20/08/2024	Iskandar	Pancing Ulur
60	FLOBA MORA 01	DAVID PRIHARJO	9	B.343/PPSC/PI.210/VIII/2024	21/08/2024	Iskandar	Pancing Ulur
61	HAI TEK RI JAYA	DODDY	25	B.345/PPSC/PI.210/VIII/2024	21/08/2024	Arie Nurfiti, S.Pi	Jaring Insang Hanyut
62	ULI JAYA I	PT MAKMUR ALAM BAHAF	28	B.344/PPSC/PI.210/VIII/2024	21/08/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur
63	BRAYAN 2	DEDDYANTO	28	B.347/PPSC/PI.210/VIII/2024	23/08/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
64	REJEKI JAYA SENTOSA	DANIEL STEVEN	30	B.346/PPSC/PI.210/VIII/2024	23/08/2024	Iskandar	Pancing Ulur
65	SEJATI	LILIES	27	B.348/PPSC/PI.210/VIII/2024	23/08/2024	Dian Prihantara	Rawai Tuna
66	HASIL MAJU 35		19	B.349/PPSC/PI.210/VIII/2024	23/08/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Pancing Ulur
67	MUDAH JAYA 23	JIMMY KURNIAWAN PRAS	30	B.350/PPSC/PI.210/VIII/2024	26/08/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
68	BINTANG SUKSES 2	DWI ANDRI OKTAVIAN	21	B.352/PPSC/PI.210/VIII/2024	28/08/2024	Iskandar	Pancing Ulur
69	HASIL MELIMPAH JAYA 5	WINSON CAHYADI	10	B.354/PPSC/PI.210/VIII/2024	28/08/2024	Iskandar	Pancing Ulur

70	ANITA JAYA VIII	EDDY SETIAWAN	29	B.353/PPSC/PI.210/VIII/2024	28/08/2024	Iskandar	Rawai Tuna
71	KMN. ANITA JAYA - VII	TRIJATI	25	B.355/PPSC/PI.210/VIII/2024	28/08/2024	Iskandar	Pancing Ulur
72	KARTIKA UTAMA 8	SARDINA	30	B.356/PPSC/PI.210/VIII/2024	29/08/2024	Arie Nurfiti, S.Pi	Rawai Tuna
73	TRI	TJOEI TIE	23	B.357/PPSC/PI.210/VIII/2024	31/08/2024	Rista Tri Purnasari	Jaring Insang Hanyut
74	CENDRAWASIH	AMELIA SEFTIANA SANTOS	29	B.358/PPSC/PI.210/VIII/2024	31/08/2024	Iskandar	Pancing Ulur
75	ADHI GENDUT 01	SUMEDI	22	B.386/PPSC/PI.210/IX/2024	26/09/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Pancing Ulur
76	AKSELERASI-07B	RUDIYANTO	12	B.389/PPSC/PI.210/IX/2024	30/09/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
77	ARABIKA JAYA I	EDDY SETIAWAN	29	B.374/PPSC/PI.210/IX/2024	18/09/2024	Welly Yunianto	Pancing Ulur
78	BB PUTRA HARAPAN JAYA	PAIMIN	26	B.368/PPSC/PI.210/IX/2024	13/09/2024	Rista Tri Purnasari	Jaring Insang Hanyut
79	BERKAH 44	WIDIYANTI	10	B.388/PPSC/PI.210/IX/2024	30/09/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
80	BERKAH JAYA 04	WIDIYANTI	14	B.393/PPSC/PI.210/IX/2024	30/09/2024	Iskandar	Pancing Ulur
81	BERKAT MELIMPAH 15	SRI HARTATI	17	B.384/PPSC/PI.210/IX/2024	25/09/2024	Iskandar	Pancing Ulur
82	BINTANG JAYA	UN JULIONO	28	B.359/PPSC/PI.210/IX/2024	04/09/2024	Kushartanto Ahmad Santosa,	Pancing Ulur
83	CAHAYA 33	LASIMAN	16	B.391/PPSC/PI.210/IX/2024	30/09/2024	Iskandar	Pancing Ulur
84	CITRA MARINA III	PT INTI MARINA SEJAHTER	29	B.371/PPSC/PI.210/IX/2024	17/09/2024	Arie Nurfiti, S.Pi	Pancing Ulur
85	COMET	HARPIN	29	B.372/PPSC/PI.210/IX/2024	17/09/2024	Iskandar	Pancing Ulur
86	ELANG JAYA	HENDRA	27	B.379/PPSC/PI.210/IX/2024	25/09/2024	Lutfi Atikoh	Jaring Insang Hanyut
87	GUNAWAN 28 JAYA III	ANG PING HA	30	B.364/PPSC/PI.210/IX/2024	09/09/2024	Welly Yunianto	Rawai Tuna
88	HARAPAN JAYA - 88	HERMAN	27	B.375/PPSC/PI.210/IX/2024	19/09/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
89	HASIL MAJU 168	YESHI VISAKHA TAN	28	B.385/PPSC/PI.210/IX/2024	25/09/2024	Iskandar	Pancing Ulur
90	HASIL MAJU 4	SUTRISNO	22	B.365/PPSC/PI.210/IX/2024	11/09/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
91	HASIL MELIMPAH JAYA 3	WINSON CAHYADI	10	B.381/PPSC/PI.210/IX/2024	25/09/2024	Iskandar	Pancing Ulur
92	INDO MARINA 6	PT INTI MARINA SEJAHTER	30	B.366/PPSC/PI.210/IX/2024	11/09/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
93	MAKMUR JAYA BAHARI X	BAHASAN	29	B.387/PPSC/PI.210/IX/2024	26/09/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
94	MEKAR SARI MAKMUR 2	JULIONO	29	B.383/PPSC/PI.210/IX/2024	25/09/2024	Arie Nurfiti, S.Pi	Pancing Ulur
95	MITRA SEJATI	SAN MIJO	22	B.361/PPSC/PI.210/IX/2024	05/09/2024	Dian Prihantara	Jaring Insang Hanyut
96	MULIA SEJATI I	SURONO	11	B.367/PPSC/PI.210/IX/2024	12/09/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
97	NADIRA JAYA	JAMPEN	17	B.377/PPSC/PI.210/IX/2024	22/09/2024	Welly Yunianto	Jaring Insang Hanyut
98	NELAYAN BERJAYA	PT. NELAYAN NUSANTARA	30	B.370/PPSC/PI.210/IX/2024	13/09/2024	Iskandar	Pancing Ulur
99	PUTRI ASIH 01	SUPRIYADI	25	B.373/PPSC/PI.210/IX/2024	18/09/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
100	RESTU PUTRA 02	ADITYA PRANOWO	15	B.394/PPSC/PI.210/IX/2024	30/09/2024	Iskandar	Pancing Ulur
101	RESTU PUTRA 03	ADITYA PRANOWO	12	B.390/PPSC/PI.210/IX/2024	30/09/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
102	RIZKI LADUNI 6	DIAN UTAMI	10	B.382/PPSC/PI.210/IX/2024	25/09/2024	Iskandar	Pancing Ulur
103	SAMUDRA JAYA	BONG LIONG	26	B.362/PPSC/PI.210/IX/2024	06/09/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Jaring Insang Hanyut
104	SAPMA 1	SARJONO	22	B.360/PPSC/PI.210/IX/2024	04/09/2024	Iskandar	Pancing Ulur
105	SRIKANDI WIJOYO 03	MUS MAANI	30	B.376/PPSC/PI.210/IX/2024	20/09/2024	Iskandar	Rawai Tuna
106	SUMBER CIPTA 8	HADITYA SURONO	29	B.363/PPSC/PI.210/IX/2024	09/09/2024	Welly Yunianto	Pancing Ulur
107	SUMBER MAJU	KRISTIANI NINGSIH	29	B.378/PPSC/PI.210/IX/2024	23/09/2024	Lutfi Atikoh	Rawai Tuna
108	SWARNA JAYA - I	IDA ERI	29	B.369/PPSC/PI.210/IX/2024	13/09/2024	Arie Nurfiti, S.Pi	Pancing Ulur
109	USAHA BARU 3	FERAWATI	12	B.392/PPSC/PI.210/IX/2024	30/09/2024	Iskandar	Pancing Ulur
110	YUDI JAYA - V	BONG LIONG	29	B.380/PPSC/PI.210/IX/2024	25/09/2024	Arie Nurfiti, S.Pi	Pancing Ulur
111	BERKAH 22	WIDIYANTI	12	B.395/PPSC/PI.210/IX/2024	30/09/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur

**PENERBITAN SKKP DAERAH
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
BULAN : OKTOBER 2024**

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKKP	Jenis API
1	KURNIA MELIMPAH 1	INDI HARTAWAN	10	B.411/PPSC/PI.210/X/2024	14/10/2024	Iskandar	Pancing Ulur
2	KURNIA MELIMPAH 2	EVI SILVIATANIA	10	B.408/PPSC/PI.210/X/2024	13/10/2024	Iskandar	Pancing Ulur
3	MUDAH JAYA 17	BURHAN	30	B.410/PPSC/PI.210/X/2024	13/10/2024	Kushartanto Ahmad Santosa,	Pancing Ulur
4	NELAYAN NUSANTARA 1	PT. NELAYAN NUSANTARA	30	B.409/PPSC/PI.210/X/2024	13/10/2024	Iskandar	Pancing Ulur
5	WIJAYA MULYA JAYA	ANJUM PANJI ISWARDANI	17	B.407/PPSC/PI.210/X/2024	11/10/2024	Iskandar	Pancing Ulur
6	DWI JAYA BAHARI	BUDIMAN TAMAN	29	B.401/PPSC/PI.210/X/2024	03/10/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
7	GUNUNG BUAH DEWA	TINA ENI	29	B.403/PPSC/PI.210/X/2024	04/10/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Rawai Tuna
8	MINA KARUNIA ABADI	LUSI	29	B.406/PPSC/PI.210/X/2024	09/10/2024	Welly Yunianto	Pancing Ulur
9	MITRA PERDANA	SAN MIJO	28	B.404/PPSC/PI.210/X/2024	08/10/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Jaring Insang Hanyut
10	RISKY JAYA 88	YESHI VISAKHA TAN	28	B.405/PPSC/PI.210/X/2024	09/10/2024	Iskandar	Pancing Ulur
11	IDOLA 1	HENDRA	30	B.400/PPSC/PI.210/X/2024	03/10/2024	Arie Nurfita, S.Pi	Pancing Ulur
12	KERIS JAYA IV	EDDY SETIAWAN	29	B.402/PPSC/PI.210/X/2024	04/10/2024	Arie Nurfita, S.Pi	Pancing Ulur
13	CAHYA LESTARI	MUJIARTO	16	B.417/PPSC/PI.210/X/2024	24/10/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
14	JAYA WIJAYA	INDRIANI	30	B.419/PPSC/PI.210/X/2024	25/10/2024	Iskandar	Pancing Ulur
15	PERMATA - 02	EKO YULIANTO	29	B.414/PPSC/PI.210/X/2024	18/10/2024	Arie Nurfita, S.Pi	Pancing Ulur
16	SAPMA II	SUJASMAN	22	B.418/PPSC/PI.210/X/2024	25/10/2024	Iskandar	Jaring Insang Hanyut
17	SARI MULIA MAKMUR 10	JONI	27	B.416/PPSC/PI.210/X/2024	22/10/2024	Iskandar	Pancing Ulur
18	ILHAM PUTRA - 4	H. MUSONO ALIAS YUSUP	23	B.413/PPSC/PI.210/X/2024	17/10/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Jaring Insang Hanyut
19	PUTRI BALI K	YULIUS HARTANTO	20	B.412/PPSC/PI.210/X/2024	17/10/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
20	SEKAR LAUT - I	TINA ENI	27	B.415/PPSC/PI.210/X/2024	18/10/2024	Arie Nurfita, S.Pi	Pancing Ulur
21	HASIL GEMILANG	KUN HOO	30	B.420/PPSC/PI.210/X/2024	31/10/2024	Kushartanto Ahmad Santosa,	Pancing Ulur

**PENERBITAN SKKP DAERAH
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
BULAN : NOVEMBER 2024**

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKKP	Jenis API
1	BERKAH LESTARI	INDRIANI	30	B.425/PPSC/PI.210/XI/2024	11/11/2024	Iskandar	Pancing Ulur
2	MERTA SARI 01	LILIES	28	B.424/PPSC/PI.210/XI/2024	08/11/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
3	PRIMA BARUNA MAKMUR	RUKY ISTIADI NOVIANANT	25	B.426/PPSC/PI.210/XI/2024	11/11/2024	Iskandar	Pancing Ulur
4	PUTRA NAURA JAYA	JURIYAH	21	B.427/PPSC/PI.210/XI/2024	13/11/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Jaring Insang Hanyut
5	ANITA JAYA IV	OEY GIOK HWA	24	B.433/PPSC/PI.210/XI/2024	22/11/2024	Iskandar	Pancing Ulur
6	BERKAH LESTARI 01	DANI ROILISMAN	30	B.434/PPSC/PI.210/XI/2024	25/11/2024	Iskandar	Pancing Ulur
7	KMN. ANITA JAYA	OEY GIOK HWA	30	B.435/PPSC/PI.210/XI/2024	25/11/2024	Iskandar	Rawai Tuna
8	KMN. ANITA JAYA - X	KRISTIANI NINGSIH	30	B.432/PPSC/PI.210/XI/2024	22/11/2024	Iskandar	Rawai Tuna
9	SEMAKIN MAJU JAYA	HERIANTO	29	B.436/PPSC/PI.210/XI/2024	29/11/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
10	HINDIA JAYA	SIE LIONG	30	B.430/PPSC/PI.210/XI/2024	15/11/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
11	MURAH REJEKI 1	LILI	30	B.429/PPSC/PI.210/XI/2024	14/11/2024	Iskandar	Jaring Insang Hanyut
12	TAMBAH PUTRA HARAPAN JAY	PAIMIN	19	B.431/PPSC/PI.210/XI/2024	15/11/2024	Dian Prihantara	Jaring Insang Hanyut
13	TIRTA SAMUDRA	TRIJATI	28	B.428/PPSC/PI.210/XI/2024	14/11/2024	Iskandar	Pancing Ulur

**PENERBITAN SKKP DAERAH
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
BULAN : DESEMBER 2024**

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKKP	Jenis API
1	AFANI JAYA	REINALDO LIM	25	B.467/PPSC/PI.210/XII/2024	22/12/2024	Welly Yunianto	Pancing Ulur
2	ANUGERAH REJEKI	TRI HARTONO	30	B.449/PPSC/PI.210/XII/2024	14/12/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
3	BINA HASIL 8	LILIANI	29	B.453/PPSC/PI.210/XII/2024	21/12/2024	Iskandar	Pancing Ulur
4	BINA HASIL 88	HADITYA SURONO	29	B.455/PPSC/PI.210/XII/2024	21/12/2024	Iskandar	Pancing Ulur
5	CHARLY I	ANDRI	26	B.465/PPSC/PI.210/XII/2024	22/12/2024	Lutfi Atikoh	Jaring Insang Hanyut
6	CITRA ABADI - II	SUTARNI SUTIMAN	13	B.447/PPSC/PI.210/XII/2024	14/12/2024	Iskandar	Pancing Ulur
7	HASIL MANTRA	KATIM	14	B.472/PPSC/PI.210/XII/2024	27/12/2024	Arie Nurfiti, S.Pi	Jaring Insang Hanyut
8	INDO MARINA 2	PT INTI MARINA SEJAHTER	30	B.464/PPSC/PI.210/XII/2024	21/12/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
9	INTI KARYA - II	CINDY ESTER	18	B.461/PPSC/PI.210/XII/2024	21/12/2024	Iskandar	Pancing Ulur
10	IRIAN JAYA	OEY GIOK HWA	24	B.470/PPSC/PI.210/XII/2024	24/12/2024	Rista Tri Purnasari	Jaring Insang Hanyut
11	ISTIQOMAH X01	EXPRIYANTO	20	B.471/PPSC/PI.210/XII/2024	24/12/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
12	JAYA MULYA	BUDI YUNARTO	20	B.441/PPSC/PI.210/XII/2024	05/12/2024	Iskandar	Jaring Insang Hanyut
13	JEANNIE JAYA 1	ELDY YULIYANTO	29	B.444/PPSC/PI.210/XII/2024	09/12/2024	Iskandar	Jaring Insang Hanyut
14	JEANNIE JAYA 3	ELDY YULIYANTO	30	B.446/PPSC/PI.210/XII/2024	11/12/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Rawai Tuna
15	KERIS JAYA III	KRISTIANI NINGSIH	30	B.445/PPSC/PI.210/XII/2024	11/12/2024	Sulis Kurniyawati, S.S.T	Pancing Ulur
16	KM NELAYAN 2016 337	KUD MINASARI PANGANDA	6	B.473/PPSC/PI.210/XII/2024	27/12/2024	Narsun, A.Pi., M.Tr.Pi	Jaring Insang Hanyut
17	MACAN	REGINA CYNTHIA DEWI	16	B.450/PPSC/PI.210/XII/2024	14/12/2024	Arie Nurfiti, S.Pi	Pancing Ulur
18	MAKMUR JAYA BAHARI XII	BAHASAN	30	B.457/PPSC/PI.210/XII/2024	21/12/2024	Iskandar	Pancing Ulur
19	MARGO INDAH - 2	RESTO RAGIL SAPUTRO	30	B.468/PPSC/PI.210/XII/2024	24/12/2024	Rista Tri Purnasari	Jaring Insang Hanyut
20	MINA KARUNIA	LUSI	28	B.466/PPSC/PI.210/XII/2024	22/12/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur
21	MITRA BAHARI II eks manggala	CUN GIE	23	B.452/PPSC/PI.210/XII/2024	21/12/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur
22	MUDAH JAYA - 25	BURHAN	29	B.475/PPSC/PI.210/XII/2024	30/12/2024	Arie Nurfiti, S.Pi	Pancing Ulur
23	PISANG V	LUSI	18	B.443/PPSC/PI.210/XII/2024	05/12/2024	Iskandar	Pancing Ulur
24	PRIMA UTAMA	CANDRA	29	B.442/PPSC/PI.210/XII/2024	04/12/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
25	RIZKY - II	H. KARDI	29	B.469/PPSC/PI.210/XII/2024	24/12/2024	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur
26	SATRIA PUTRA MANDIRI	HARJO BUDIMAN	22	B.462/PPSC/PI.210/XII/2024	21/12/2024	Welly Yunianto	Pancing Ulur
27	SEMOGA ABADI	HARTONO	26	B.440/PPSC/PI.210/XII/2024	05/12/2024	Iskandar	Jaring Insang Hanyut
28	SERRA	H. MOCHAMAD EKSAN	23	B.458/PPSC/PI.210/XII/2024	21/12/2024	Iskandar	Jaring Insang Hanyut
29	SETIA JAYA 28	RUDI HARTONO	29	B.454/PPSC/PI.210/XII/2024	21/12/2024	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur
30	SETIA JAYA 81	RUDI HARTONO	30	B.439/PPSC/PI.210/XII/2024	03/12/2024	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur
31	SRIWIJAYA	HENDRA	25	B.448/PPSC/PI.210/XII/2024	14/12/2024	Lutfi Atikoh	Pancing Ulur

32	SUKA MAJU III	H. MOCHAMAD EKSAN	21	B.451/PPSC/PI.210/XII/2024	14/12/2024	Rista Tri Purnasari	Jaring Insang Hanyut
33	SUMBER CIPTA 88	LILIANI	26	B.456/PPSC/PI.210/XII/2024	21/12/2024	Iskandar	Pancing Ulur
34	SUMBER HASIL 9	BUDI HARTA	30	B.474/PPSC/PI.210/XII/2024	27/12/2024	Dian Prihantara	Pancing Ulur
35	SUNGAI ROKAN	TJOEI TIE	30	B.476/PPSC/PI.210/XII/2024	30/12/2024	Dian Prihantara	Jaring Insang Hanyut
36	TAMBORA MAS	CINDY ESTER	20	B.463/PPSC/PI.210/XII/2024	21/12/2024	Welly Yunianto	Pancing Ulur
37	TERATAI II	FABIAN FIRMANSYAH RAM	25	B.459/PPSC/PI.210/XII/2024	21/12/2024	Iskandar	Pancing Ulur
38	ULI JAYA	BAHASAN	27	B.460/PPSC/PI.210/XII/2024	21/12/2024	Iskandar	Pancing Ulur

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP**

MEMORANDUM

NOMOR 31 /PPSC/KJ.2011/2025

Yth : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
Hal : Laporan Capaian Kinerja Tim Tata kelola Sarana dan Prasarana
Triwulan IV 2024
Lampiran : Satu lembar
Tanggal : 10 Januari 2025

Sehubungan dengan penilaian capaian Kinerja Utama (IKU) Triwulan IV, bersama ini kami sampaikan laporan kinerja Tim Kelola Sarana dan Prasarana pelabuhan dalam mendukung Indikator Kerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Laporan capaian kinerja terlampir

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Kushartanto

Lampiran : MEMORANDUM NOMOR
...../PPSC/RC.420/I/2025
Hal : Laporan Capaian Kinerja Tim
Tata kelola Sarana dan Prasarana
Triwulan IV

Sasaran Kegiatan: *Pengembangan dan peningkatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal*

1. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan demikian, indikator ini diukur dengan menunjukkan presentase perbandingan antara pengembangan fasilitas dengan masterplan pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Target dan Realisasi tahun 2024

1. Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

NO	Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	33%	36%	109,09%

• **Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan**

Realisasi hasil penilaian prosentase pengendalian Pembangunan sebesar 36% dari target 33% persen dengan Tingkat capaian 109,09%, hasil tersebut dipengaruhi oleh hasil Penyusunan target yang realistis berdasarkan analisis data yang akurat dengan mempertimbangkan sesuai arah kebijakan pemerintah.

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023
PERSENTASE PENGENDALIAN PENGEMBANGAN FASILITAS
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
BERDASARKAN MASTER PLAN TAHUN 2007 PENTAHAPAN TAHUN 2008 sd. 2028

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH	REALISASI	KETERANGAN
1	PENGERUKAN KOLAM TGH (B) & JALUR PELAYARAN SAMPAI KEDALAMAN -3 DARI LWS (-4,50 DARI MWL)	1,00 Unit	SUDAH	
2	PERBAIKAN REVETMENT KOLAM TENGAH (KOLAM B)	1,00 Unit	BELUM	
3	PEMBANGUNAN PASAR IKAN HYGIENIS	1,00 Unit	BELUM	
4	PENINGKATAN TPI LAMA (PENINGGIAN ATAP DAN LANTAI)	1,00 Unit	SUDAH	
5	PEMBANGUNAN POS JAGA	1,00 Unit	SUDAH	
6	PEMBANGUNAN JALAN AKSES SELATAN (C)	435,00 M ²	SUDAH	

Cilacap, 9 Januari 2025
Ketua Tim Kerja Tata Kelola
Sarana Prasarana


Kushartanto Ahma Santosa

Presentase = $(18/50) \times 100 = 36\%$

Realisasi Pengembangan Fasilitas PPSC : 18 kegiatan

Rencana Pengembangan sesuai Master Plan dengan tahapan tahun 2008 s/d 2028 : 50 kegiatan

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023
PERSENTASE PENGENDALIAN PENGEMBANGAN FASILITAS
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
BERDASARKAN MASTER PLAN TAHUN 2007 PENTAHAPAN TAHUN 2008 sd. 2028

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH	REALISASI	KETERANGAN
A	FASILITAS OPERASIONAL PELABUHAN BAG. SELATAN (C)			
1	PEMBANGUNAN SPDN 2 POMPA	1,00 Unit	SUDAH	
C.	FASILITAS OPERASIONAL PELABUHAN BAG. UTARA (D)			
1	PEMBANGUNAN REVETMENT KONSTRUKSI RUBBLE MOUND	1,00 Unit	SUDAH	
2	PENGURUGAN & PEMATAHAN LAHAN SEBELAH UTARA AREAL PELABUHAN UTARA (D)	1,00 Unit	BELUM	
3	PEMB. JALAN AKSES UTARA (D) DG KONSTRK. ASPAL	3.267,00 M	BELUM	
4	PEMB. JALAN AKSES UTARA (D) DG KONSTRK. BETON	1.085 M	BELUM	
5	PEMBANGUNAN COOL ROOM (20 X 12 M ²)	1,00 Unit	BELUM	
6	PEMB. KLINIK DAN LABORATORIUM(15 X 12 M ²)	2,00 Unit	BELUM	
7	PEMBANGUNAN POS JAGA	1,00 Unit	BELUM	
8	PEMBANGUNAN BREAK WATER	1,00 Unit	BELUM	
9	PEMBANGUNAN DERMAGA D DG KONSTRUKSI CON-CRETE SHEET PILE	1,00 Unit	BELUM	
10	PENGURUGAN & PEMATANGAN PEMATANGAN LAHAN AREAL PELABUHAN D	1,00 Unit	BELUM	
11	PEMBANGUNAN TPI (TEMPAT PELELANGAN IKAN)	2,00 Unit	BELUM	
12	PEMBUATAN MENARA RESERVOAR KAP. 20 M3	2,00 Unit	BELUM	
13	PEMBANGUNAN MCK	3,00 Unit	BELUM	
14	PEMBANGUNAN IPAL (INSTALASI PENGOLAH LIMBAH)	2,00 Unit	BELUM	
15	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH	3.267,0 M	BELUM	
16	PEMBANGUNAN MUSHOLLA	1,00 Unit	BELUM	



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

Nomor : B.115/DJPT.4/Pl.310/I/2025 13 Januari 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian dan Hasil Evaluasi Implementasi SELARASKAN Triwulan IV TA. 2024 di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan implementasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) Versi 2, bersama ini kami sampaikan capaian dan hasil evaluasi SELARASKAN triwulan IV TA. 2024 di Pelabuhan Perikanan sebagai berikut:

1. Capaian implementasi SELARASKAN bulan Oktober hingga Desember 2024 yang dievaluasi pada bulan Januari 2025 dengan skor setelah koreksi *evidence* oleh Tim Evaluasi SELARASKAN sebagai berikut:

No.	Pelabuhan Perikanan	Oktober	November	Desember	Skor Kumulatif	Rata-rata	Kategori
1.	PPN Prigi	96.15	93.77	99.26	289.18	96.39	SANGAT BAIK
2.	PPN Sibolga	95.39	95.96	96.60	287.95	95.98	SANGAT BAIK
3.	PPS Cilacap	92.21	94.36	95.43	282.01	94.00	SANGAT BAIK
4.	PPS Kendari	92.59	93.79	94.97	281.35	93.78	SANGAT BAIK
5.	PPN Pengambangan	91.04	93.38	93.43	277.85	92.62	SANGAT BAIK
6.	PPN Kejawan	87.98	94.78	94.33	277.09	92.36	SANGAT BAIK
7.	PPS Bungus	84.81	95.34	91.51	271.66	90.55	SANGAT BAIK
8.	PPN Pekalongan	91.49	90.27	89.12	270.88	90.29	SANGAT BAIK

No.	Pelabuhan Perikanan	Oktober	November	Desember	Skor Kumulatif	Rata-rata	Kategori
9.	PPS Nizam Zachman Jakarta	91.64	87.98	90.21	269.83	89.94	SANGAT BAIK
10.	PPN Palabuhanratu	89.58	85.34	88.44	263.36	87.79	SANGAT BAIK
11.	PPP Teluk Batang	89.83	88.87	82.68	261.37	87.12	SANGAT BAIK
12.	PPN Ternate	86.01	85.11	81.66	252.78	84.26	SANGAT BAIK
13.	PPN Pemangkat	83.70	80.29	83.55	247.54	82.51	SANGAT BAIK
14.	PPS Belawan	79.94	81.78	85.51	247.23	82.41	SANGAT BAIK
15.	PPN Brondong	66.86	88.46	88.57	243.89	81.30	SANGAT BAIK
16.	PPN Kwandang	76.20	81.13	86.45	243.78	81.26	SANGAT BAIK
17.	PPN Ambon	81.75	85.96	75.92	243.63	81.21	SANGAT BAIK
18.	PPN Sungailiat	73.77	73.52	68.63	215.92	71.97	BAIK
19.	PPS Bitung	59.85	74.62	66.61	201.07	67.02	BAIK
20.	PPN Tanjungpandan	67.84	57.23	74.67	199.74	66.58	BAIK
21.	PPN Karangantu	35.28	57.09	79.83	172.21	57.40	CUKUP
22.	PPN Tual	59.71	51.41	52.90	164.02	54.67	CUKUP

- Hasil evaluasi implementasi SELARASKAN bulan Oktober hingga Desember 2024 secara detail dapat diakses melalui tautan berikut https://bit.ly/SELARASKAN_TWIV_2024; dan
- Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan dengan capaian nilai SELARASKAN dibawah SANGAT BAIK agar lebih meningkatkan kinerjanya di bidang kebersihan dan lingkungan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tri Aris Wibowo

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran 1.

Nomor : B.115/DJPT.4/PI.310/I/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

DAFTAR PELABUHAN PERIKANAN

1. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
2. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
3. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
4. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
5. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
6. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
7. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
8. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
9. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
10. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
11. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
12. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
13. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
14. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
15. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
16. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
17. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
18. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
19. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
20. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
21. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
22. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tri Aris Wibowo

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

MEMORANDUM
NOMOR 33/PPSC/TU.140/I/2025

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Lingkup Tim Kerja
Dukungan Manajerial Triwulan IV
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 10 Januari 2025

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024, terlampir kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Dukungan Manajerial sebagai berikut:

1. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)
2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)
3. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)
4. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)
5. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)
6. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)
7. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)
8. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)
9. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

Adapun pencapaiannya terhadap Sasaran strategis Tata kelola Pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dapat kami sampaikan sebagai berikut :

IKU 10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (nilai)

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan percepatan pencapaian sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka saat ini capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK menjadi salah satu indikator kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024. Indikator ini dinilai berdasarkan hasil penjumlahan nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada komponen pengungkit dan komponen hasil yang dihitung secara tahunan dan dilakukan secara mandiri.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja dengan Komponen penilaian indikator dari nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Unit Kerja.

Hasil Pencapaian :

 Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel. Nilai PM Pembangunan ZI di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	80	86,59	108,24

Capaian Tahun 2024, PPSCilacap mendapatkan realiasi nilai 86,59 atau capaian 108,24% dari target tahun 2024 dikarenakan di tahun 2024 PPS diusulkan lagi oleh Inspektorat 5 untuk mengikuti Penilaian Nasional (Menpan RB) sehingga pendampingan dilakukan secara intensif oleh tim pendamping internal.

Pada tahun 2024 ini, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tingkat Nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang penganugerahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2024 di Jakarta.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Adapun Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU yaitu terdapat beberapa penilaian yang mengharuskan inovasi dan pengembangannya sehingga membutuhkan lebih banyak lagi inovasi dalam pencapaiannya.

Saran dan Masukan untuk perbaikan ke depan adalah melaksanakan peningkatan kompetensi dan integritas pada setiap pegawai serta meninisiasi beberapa inovasi yang menunjang kemudahan dalam pelayanan publik.

Capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023

Tabel Perbandingan capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turunan (%)
Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	86,59	86.09	100,58%

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya, capaian indikator PM Pembangunan ZI di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mengalami kenaikan sebesar 100,58%.

IKU 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)

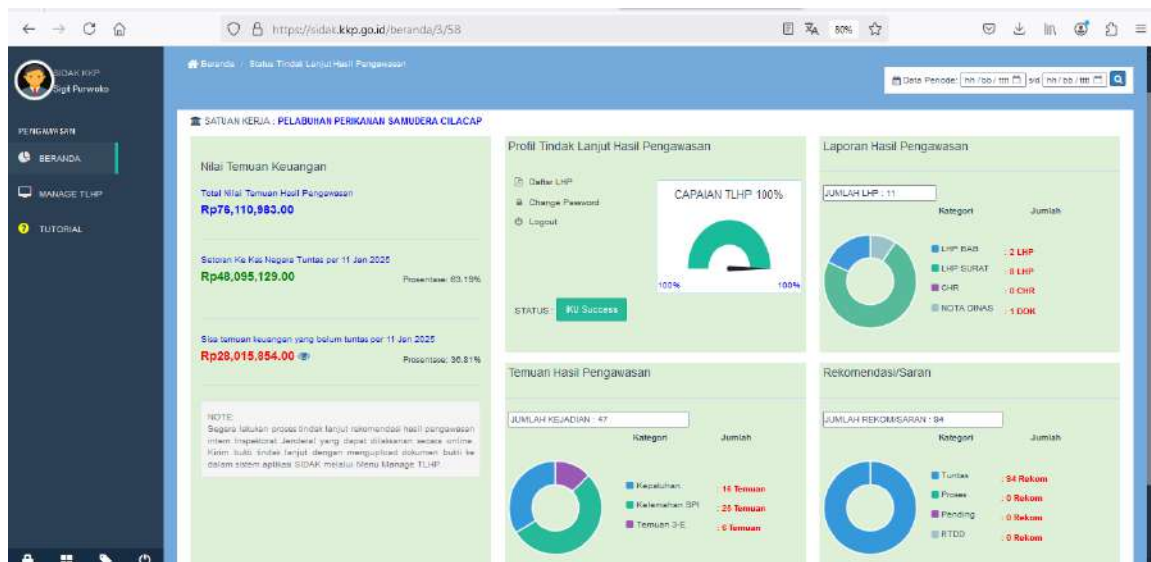
Indikator ini merupakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel . Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	80	100	125

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebesar 100%. Seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP, seluruhnya telah ditindaklanjuti berdasarkan aplikasi SIDAK KKP sebagaimana pada gambar dibawah ini.



Gambar . Screen shot Aplikasi SIDAK

Pada tahun 2024, terdapat *On The Spot* (OTS) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan oleh Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 573 oleh Inspektorat II melalui Surat Tugas Inpektur II Nomor. B.4574.1/ITJ.2/KP.440/VI/2024 tanggal 22 Juni 2024. Dari hasil evaluasi tersebut terdapat saran rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap selaku

coordinator eksekutif WPP 573 dan semua saran evaluasinya sudah di tindaklanjuti sebagaimana terlampir. Adapun evaluasi ini tidak dimasukan di Aplikasi SIDAK Itjen KKP.

 Capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023

Tabel . Perbandingan capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turunan (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	100	100	-

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya, capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini tetap pada capaian maksimal yakni 100% dan semua hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal KKP telah ditindaklanjuti.

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Hasil rekomendasi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

IKU 12. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, rekonsiliasi Kinerja merupakan salah satu metode evaluasi implementasi SAKIP untuk penilaian cepat terhadap pengelolaan kinerja sebuah unit kerja. Indikator ini diukur melalui Rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk Meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, Menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan Sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek Kepatuhan (Bobot 25%) dengan nilai maksimal 25, Aspek Kesesuaian (Bobot 25%) dengan nilai

maksimal 25, Aspek Ketercapaian (Bobot 30%) dengan nilai maksimal 30, dan Aspek Ketepatan (20%) dengan nilai maksimal 20.

Perhitungan indikator ini dilakukan berdasarkan hasil penilaian atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator tahunan dengan kegiatan yang dilakukan oleh DJPT sebagai berikut:

 Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 37. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian
Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	94	99,04	105,36

Capaian nilai rekonsiliasi kinerja ini telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor. B.5702/DJPT.1/RC.610/XI/2024 tanggal 29 November 2024 hal Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Kinerja Ligkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024.

 Capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023

Tabel . Perbandingan capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turunan (%)
Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	96,70	99,04	102,42

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya, capaian indikator Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini mengalami kenaikan sebesar 2,42% dari pada capaian Tahun 2023.

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dikarenakan dikarenakan 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek Kepatuhan (Bobot 25%),

Aspek Kesesuaian (Bobot 25%), Aspek Ketercapaian (Bobot 30%), dan Aspek Ketepatan (20%) terpenuhi dengan baik.

IKU 13. IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Indikator kinerja indeks profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap merupakan indikator untuk mengukur kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : (1) Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3; (2) Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara; (3) Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja; (4) Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
- b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
- c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
- d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
- e. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Angka capaian indikator kinerja ini diperoleh dan diukur oleh Biro SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dihitung secara semesteran.

Data IP ASN dapat diambil di dashboard pengukuran IP ASN KKP pada laman :
<http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/unker/376/pegawai>

Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel. Target dan Realisasi IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian
IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	84	93,64	111,48

Capaian Triwulan IV Tahun 2024 dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2023

Tabel. Perbandingan capaian Triwulan IV Tahun 2024 dan Triwulan IV Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turunan (%)
IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	90,19	93,64	103,45

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian IP ASN PPS Cilacap terjadi karena terpenuhinya dimensi dalam penghitungan IP ASN tersebut. Dimensi Kualifikasi, PPS Cilacap mendorong para pegawai untuk melanjutkan peningkatan jenjang pendidikan, sampai saat ini terdapat 2 orang yang sudah menyelesaikan pendidikan S2 dan 3 (tiga) pegawai diusulkan untuk tugas belajar baik jenjang S2 dan S1. Dimensi Kompetensi dilaksanakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya baik teknis, manajerial dan sosial kultural dengan bekerjasama dengan Balai Diklat Aparatur Sukamandi maupun Lembaga dan Instansi lain. Dalam dimensi kompetensi ini telah semua pegawai memperoleh hasil maksimal dalam pengembangan kompetensinya. Dimensi Kinerja telah mendorong para pegawai agar mempunyai Sasaran Kerja Pegawai yang sejalan dengan Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan dan rata rata mendapatkan nilai Baik dan Sangat Baik. Dimensi Kedisiplinan pegawai dilaksanakan sosialisasi, pengawasan, penanaman integritas terkait kode etik pegawai dan kedisiplinan dan di akhir tahun mendapatkan penilaian maksimal. Disamping itu juga dikarekanakan mulai timbulnya kesadaran dalam mendapatkan kewajiban 20 JP serta seminar dalam setiap Tahun

Anggaran. Selain itu pimpinan satker memberikan contoh dalam antusiasme mendapatkan pengembangan kompetensi lalu mengawal capaian individu setiap periode.

Adanya gap waktu pengunggahan di myasn/siasn dengan penarikan data oleh Biro SDM Aparatur sehingga sering ada keterlambatan update nilainya. Kesalahan dalam penginputan kategori diklat, terkadang masih ada pencantuman kategori diklat yang belum tepat, webinar terinput sebagai bimbingan teknis.

Saran dan perbaikan kedepan yaitu perlunya dilakukan sosialisasi lagi dalam cara penginputan di myasn/siasn serta koordinasi dengan pemangku aplikasi kepegawaian sehingga tidak ada kesalahan dan data yg ada di MyASN bisa ditarik sempurna oleh Biro SDMAO KKP.

Selain itu juga perlu koordinasi dengan Eselon I untuk dapat menghadirkan rangkaian diklat yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) setiap Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu hingga Jabatan Struktural.

IKU 14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sesuai ketentuan yang berlaku. Perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun dengan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Ketersediaan Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon I dengan mendapatkan nilai 10,00;
2. Perencanaan dan persiapan pengadaan dengan mendapatkan nilai 15,00;
3. Presentase pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE dengan mendapatkan nilai 10,00;
4. Keseuaian Tahap Pelaksanaan dengan mendapatkan nilai 41,29;
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ dengan mendapatkan nilai 5,00;
6. Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan Barang/Jasa lingkup Eselon I Triwulan I s/d Triwulan III Tahun 2024 dengan mendapatkan nilai 15,00.

Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	80	96,29	101,88

Capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023

Tabel. Perbandingan capaian Tahun 2024 dan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turunan (%)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	100	96,29	(3,71)

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal, tingkat kepatuhan PBJ Ingkup KKP mencapai nilai rata-rata sebesar 86,59% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%, namun pencapaian di Tahun 2024 lebih rendah dari pencapaian tahun 2023 dikarenakan ada beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian IKU dimaksud pada tahun sebelumnya diantaranya :

1. Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
2. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa paling lambat pada Triwulan I tahun berjalan;
3. Menyiapkan dokumen tender (KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak) pengadaan barang dan jasa dengan kontrak/Surat Perjanjian sejak periode akhir tahun anggaran sebelumnya (T-1) sehingga paket pengadaan barang dan jasa dapat segera dikontrakkan pada kesempatan pertama;
4. Menyelesaikan kontrak/surat perjanjian PBJ tepat waktu;

5. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan pengadaan barang/jasa.

IKU 15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup PPS Cilacap

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Satker PPS Cilacap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun dengan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021 (10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga Triwulan III tahun 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2018-2020 (20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2021 di dukung BAST/berita Acara Pemakaian (25%);
5. Penyusunan laporan BMN (semesteran & tahunan) secara tepat waktu (20%).

Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2024	% Capaian
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	80	90	110

Capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023

Tabel. Perbandingan capaian Tahun 2024 dan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turunan (%)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	95	90	(5)

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal, tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup KP mencapai mencapai nilai rata-rata sebesar 93,78%, namun pencapaian di Tahun 2024 lebih rendah dari pencapaian tahun 2023 dikarenakan ada beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian IKU dimaksud pada tahun sebelumnya diantaranya :

1. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
2. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) pada Unit Eselon I lingkup KKP;
3. Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
4. Penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat pada Unit Eselon I lingkup KKP;
5. Tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian pada Unit Eselon I lingkup KKP;
6. Penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu pada Unit Eselon I lingkup KKP.

IKU 16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi dengan berdasarkan 13 (tiga

belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi Penyampaian SPM, Penyerpan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Pengembalian/Kesalahan SPM, dan Perencanaan Kas. IKU ini memiliki periode pengukuran semesteran.

 Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel . Target dan Realisasi IKU Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2024	% Capaian
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	93,76	97,82	104,06

 Capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023

Tabel . Perbandingan capaian Tahun 2024 dan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turunan (%)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	93,31	97,82	8,68

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Sehubungan dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 terjadi Reformasi Perhitungan Nilai IKPA berdasar PER-5/PB/2024, dimana terdapat perubahan tata cara perhitungan per indikatornya. Adapun perubahan masing-masing indicator antara lain Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output. Masing masing indicator tersebut diejawantahkan dan saling terkait dalam perolehan nilai IKPA Tahun 2024.

Capaian Tahun 2024, PPS Cilacap mendapatkan realiasi nilai 97,82 atau capaian 104,33 dari target tahun 2024 dikarenakan dari penilaian IKPA yang meliputi 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja, yaitu: Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan

anggaran, yang terdiri dari 2 indikator: (1) Revisi DIPA dan (2) Deviasi Halaman III DIPA dengan capaian nilai aspek sebesar 94,91; Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 5 indikator: (1) Penyerapan Anggaran, (2) Belanja Kontraktual, (3) Penyelesaian Tagihan, (4) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP); dan (5) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) dengan capaian nilai aspek sebesar 99,16; serta Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan 1 indikator: (1) Capaian Output dengan capaian nilai aspek sebesar 100.

Pada Tahun 2024 realisasi penyerapan adalah sebesar Rp. 22.522.669.505,- yang terdiri dari belanja pegawai (51) sebesar Rp. 10.891.405.399; belanja barang (52) dengan realisasi sebesar Rp. 9.309.524.413,- serta Belanja Modal (53) dengan realisasi sebesar Rp. 2.298.058.800,-. Indikator lainnya antara lain pengelolaan UP dan TUP dan indikator lainnya bisa mendapatkan nilai maksimal.

Dari hasil penilaian IKPA masih terdapat Nilai indikator deviasi halaman III DIPA masih belum optimal yaitu sebesar 13.47 dari bobot sebesar 15, sehingga mempengaruhi nilai capaian Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran. Saran masukan untuk perbaikan ke depan adalah guna meningkatkan capaian Nilai IKPA ke depan masih perlu ditingkatkan melalui konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran sesuai dengan RPD yang ditetapkan sebagaimana pada halaman III DIPA serta melakukan pemutakhiran lembar III DIPA paling lambat hari ke sepuluh setiap triwulan berikutnya.

IKU 17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuan Perikanan Samudera Cilacap

Merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2023 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, PMK No. 62 Tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, KMK No. 466 Tahun 2023 Pedoman Teknis Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran dengan komponen penilaian :

1. Variabel Efektifitas yang Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Variabel Efisiensi dimana Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi: a. Penggunaan SBK; dan/atau b. Efisiensi SBK.

Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel . Target dan Realisasi IKU Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2024	% Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	71	90	126,76

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian Tahun 2024, PPS Cilacap mendapatkan realiasi nilai 90 atau capaian 126,76% didapati dari hasil Capaian Variabel Efektifitas indikator Capaian RO sebesar 100, dan Capaian Variabel Efisiensi atas Indikator Penggunaan SBK sebesar 100 dan Indikator Efisiensi SBK 33,35. Sehingga perlu ada Penetapan SBKK oleh Eselon 1 untuk tahun Anggaran 2025.

Perbandingan dengan Tahun 2023

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap merupakan IKU baru, maka belum dapat dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya.

IKU 18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Target dan realisasi Tahun 2024

Tabel . Target dan Realisasi IKU Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2024	% Capaian
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,30	91,94	103,64

Capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023

Tabel . Perbandingan capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turunan (%)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	92,29	91,94	(0,35)

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Hasil SKM pada Tahun 2024 ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebesar 91,94 (kriteria A) dengan kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK. Indeks tersebut diperoleh dari pengolahan data pada periode Tahun 2024.

Dari tabel dapat diketahui pelaksanaan tindak lanjut dapat dilihat dari table sebagaimana lampiran.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Upaya yang dilakukan dalam menunjang tercapainya indikator ini adalah dengan membentuk Tim SKM melalui Surat Tugas yang ditetapkan oleh Kepala Pelabuhan Nomor B.5/PPSC/KP.440/I/2024 tentang Penunjukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap. Hal ini dilakukan untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SKM dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Adapun dokumen dan data dukung kami tautkan pada link :
https://bit.ly/IKU_Dukman2024

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapakan terima kasih.



Sigit Purwoko

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
TAHUN 2024
WBK

Area Perubahan				Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Nilai Minimum
A. PENGUNGKIT				60,00					
		1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,11	4,42	7,53	94,18%	OK
		2.	PENATAAN TATALAKSANA	7,00	2,68	2,34	5,02	71,67%	OK
		3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	4,26	4,25	8,51	85,06%	OK
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	3,74	5,00	8,74	87,35%	OK
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	4,78	6,88	11,66	77,70%	OK
		6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	4,70	3,51	8,21	82,08%	OK
TOTAL PENGUNGKIT							49,66	82,76%	OK
B. HASIL				40,00					
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22,50			21,06	93,58%	OK
		a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal :	17,50			16,06	91,75%	OK
		b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja	5,00			5,00	100,00%	OK
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17,50			15,88	90,75%	
		-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal :	17,50			15,88	90,75%	OK
TOTAL HASIL							36,94	92,34%	
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS							86,59		OK

Penilaian		Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Revisi TPI	Pedoman Pengawasan Pembangunan ZI	Keterangan Pemenuhan Dokumen per November 2024
A. PENGUNGKIT		###							49,66	82,76%			
I. PEMENUHAN		###							23,26	77,84%			
1. MANAJEMEN PERUBAHAN		4,00							1,11	77,86%			
1.1. Penyusunan Tim Kerja		0,50							0,50	100,00%			
a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integrasi			Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.	Ya/Tidak	Ya	Tim pembangunan ZI ditetapkan sesuai Surat Tugas No. B.265/IBPAT.MDG/KP.440/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dan ST No. B.94/IBPAT.MDG/KP.440/II/2024, tanggal 5 Februari 2024. Dalam tim 2023 dan 2024, semua unsur unit kerja telah terwakili, yaitu dari pejabat struktural, fungsional, ASN dan P3K, dan kantor pusat maupun instalasi. 1. ST Tim ZI Tahun 2024 Nomor B.86/PPSC/KP.440/I/2024 tgl 5 Jan 2024 2. ST Tim ZI Tahun 2023 ST B.115/PPSC/KP.440/I/2023 tgl 5 Januari 2023 3. Undangan Rapat persiapan pembentukan Tim ZI tgl 2 Januari 2023 4. Undangan Rapat pembentukan dan penetapan Tim ZI tgl 5 Feb 2024	Pembentukan Tim Pembangunan ZI 1. Menentukan Tim Kerja 4. Surat Tugas Tim Kerja WBK 2024.pdf 6. Surat Tugas Tim Kerja WBK 2023 Berikan.pdf	Ya	1,00	Sehubungan kebijakan KKP terkait kewenangan penunjukan Surat Keputusan (SK) bahwa di tingkat UPF untuk SK ditetapkan dalam bentuk Surat Tugas (ST) Pimpinan satker UPT. Pembentukan tim pembangunan zona integrasi PPS Cilacap ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala PPS Cilacap No. B.265/IBPAT.MDG/KP.440/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dan ST No. B.94/IBPAT.MDG/KP.440/II/2024, tanggal 5 Februari 2024 dan telah sesuai dengan data dukung	1. Tim harus melibatkan seluruh unsur unit kerja. Keterwakilan unsur unit kerja mengacu pada bagian struktur organisasi unit kerja sesuai dengan peraturan Orlata. Jabatan/pegawai yang tertuang dalam bagian struktur organisasi harus terlibat dalam perwakilan tim. 2. Tim terbagi dalam seluruh indikator pengagkit (pemenuhan dan reform) dan hasil meliputi: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik dan dilengkapi dengan uraian tugas (mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WHBM di Instansi Pemerintah). 3. Kewenangan Pengawasan mengacu Permen KP Nomor 42 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP yaitu	Ya	
b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas			a. Jika dengan prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja c. Jika tidak di seleksi.	A/B/C	A	Pemilihan anggota tim Tahun 2023 dan 2024 telah dilaksanakan sesuai kriteria seleksi berupa: pendidikan, kemampuan menyelesaikan tugas, kemampuan mengoperasikan komputer, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerja secara tim. Setiap Ketua Timja melakukan penilaian individu dan mengasalkan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat pemilihan Anggota Tim Pembangunan ZI. Pengusulan nama individu telah mewakili seluruh unsur (7 unsur) dalam PPS Cilacap. Rekapitulasi pemilihan anggota tim disusun setiap tahun dan ditandatangani setiap ketua timja.	Menentukan Anggota Tim Kerja 1. Menentukan Anggota Tim Kerja Kertas kerja Penilaian Individu Lembar Kerja Penilaian Individu 2023.pdf Lembar Kerja Penilaian Individu 2024.pdf	A	1,00	Penentuan anggota tim pembangunan ZI di PPS Cilacap telah dipilih sesuai kriteria prosedur/mekanisme yang ditetapkan oleh Kepala Satker dan telah mewakili seluruh unsur dalam unit kerja, dibuktikan dengan kertas kerja rekapitulasi individu setiap timja mewakili seluruh unsur unit kerja. Penjelasan unit kerja dan dokumen sudah sesuai	1. Kewenangan penetapan mengacu Permen KP Nomor 42 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP; 2. Penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas a. Penunjukan tertulis berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi harus disertai mekanisme lainnya (misalnya membentuk tim formatir, voting, akreditasi deli atau persyaratan tertentu lainnya; b. Notulen atau mekanisme tertulis harus menggambarkan secara jelas prosedur pemilihan anggota tim; c. Setiap penggantian/perubahan anggota tim harus dilengkapi mekanisme pembaharuan; d. Standar minimal mekanisme: 1) Membuat kriteria calon anggota tim; 2) Pengusulan calon anggota tim; 3) Rapat untuk penentuan tim anggota. 3. Dalam tim harus melibatkan seluruh unsur dalam unit kerja. Keterwakilan unsur unit kerja mengacu pada bagian struktur organisasi unit kerja sesuai dengan peraturan Orlata. Jabatan/pegawai yang tertuang dalam bagian struktur organisasi harus terlibat dalam perwakilan tim. 4. Penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili keterlibatan seluruh unsur dalam unit kerja; 5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika terdapat penunjukan tertulis berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi, disertai mekanisme yang jelas dan melibatkan seluruh unsur dalam unit kerja, maka dinilai A; b. Dinilai B, jika: 1) Terdapat penunjukan tertulis berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi tanpa disertai mekanisme lain atau persyaratan lain dan melibatkan seluruh unsur dalam unit kerja atau		
II. Rencana Pembangunan Zona Integ		1,00							0,83	83,33%			
a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integrasi menuju WBK/WHBM			Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integrasi.	Ya/Tidak	Ya	Telah disusun rencana kerja pembangunan ZI tahun 2023 yg terdiri dari 84 butir kegiatan yang mencakup 6 area perubahan. Beberapa agenda kegiatan dari Kerja Tahun 2023 merupakan kegiatan yang dihasilkan dari identifikasi kebutuhan dalam pembangunan ZI PPSK Tahun 2023. Rencana kerja pembangunan ZI tahun 2024, telah dilengkapi dengan: - Hasil identifikasi yang kegiatan yang dihadapi oleh unit kerja, dituangkan dalam bentuk notulensi hasil identifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti (hasil SKM, dumas, survey stakeholder, isu strategis blueconomy terkait PIT dan Gerakan bersih pelabuhan perikanan). Identifikasi masalah/kelemahan diantaranya bersumber dari: a. Survey SKM - hasil survei SKM yaitu agar SPIR dipercepat - Pelayanan penyimpanan unit pendingin memperoleh nilai rendah - floating repair prosedur, kecepatan respon memperoleh nilai rendah b. Pengadaan Masyarakat sudah dilengkapi dengan dokumen rencana kerja dengan memasukkan beberapa pertimbangan diakhir di atas c. FGD dengan pihak stakeholder - kegiatan Selasa Sapa Sahabat yang mempertemukan Stakeholder dengan Pimpinan - FGD dengan instansi lain saat kunjungan d. Isu strategis blue economy berupa kegiatan Pemangangan Ikan Terukur (PIT) dan gerakan bersih pelabuhan perikanan 2. Identifikasi masalah/kelemahan pada masing-masing area pembangunan ZI yang dituangkan dalam rencana kerja	1. Rencana Kerja Pembangunan ZI tahun 2023 dan 2024 2. a. Dokumen Rencana Kerja ZI 2023 2. b. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI 2024 2. c. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI 2024 2. d. Hasil Identifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai dasar penyusunan rencana kerja 2023-2024 1. Dokumen Hasil Identifikasi 1. Dokumen Hasil Identifikasi	Ya	1,00	Penjelasan unit kerja dan dokumen sudah sesuai Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK yang dihasilkan pada identifikasi masalah/kelemahan pada hasil SKM, pengakuan masyarakat, FGD dengan stakeholder, dan isu strategis blue economy	1. Rencana kerja selaras dengan Permen PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WHBM di Instansi Pemerintah dan Rencana Aksi Identifikasi Awal Reform di Unit Kerja; 2. Unit kerja perlu melakukan penetapan program pembangunan Zona Integrasi ini harus disesuaikan dengan hasil identifikasi yang layanan utama unit kerja, isu strategis dan risiko-risiko yang dihadapi oleh unit kerja; 3. Rencana kerja harus menunjukkan orientasi reform yaitu dengan mengidentifikasi masalah/kelemahan pada masing-masing area pembangunan ZI. Identifikasi masalah/kelemahan dan kebutuhan organisasi tersebut dapat mengacu pada: a. Survei terhadap pegawai dan pengguna layanan; b. Hasil evaluasi kinerja organisasi dan pegawai; c. FGD internal dan/atau melibatkan pihak eksternal; d. Rencana kerja memuat hal-hal yang perlu dilakukan; e. Membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integrasi; f. Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integrasi seperti: diprakarsai pada unsur pengagkit (6 area); g. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan; d. Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi; e. Melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinergis langsung dengan masyarakat atau stakeholder; f. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke		
b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WHBM			a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WHBM b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WHBM c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integrasi	A/B/C	B	Dalam Kerja Tahun 2023 terdapat 34 Target Prioritas yang relevan dengan tujuan reform diarahkan area perubahan. Sedangkan pada Tahun 2024 terdapat 36 target prioritas Kegiatan prioritas telah ditetapkan dengan penyesuaian isu strategis yang dihadapi PPS Cilacap, hasil survey yanlik, evaluasi kinerja, FGD eksternal (P3K), evaluasi Dumas, evaluasi tata laksana, di sesuai dengan hasil identifikasi sebelumnya.	Rencana Kerja Prioritas ZI Tahun 2023 dan 2024 Rencana Kerja Prioritas Tahun 2023.pdf Rencana Kerja Prioritas Pembangunan ZI Tahun 2024.pdf Kertas kerja pelaksanaan program prioritas dengan tujuan pembangunan WBK/WHBM Kertas Kerja pendukung LKZ ZI PPS Cilacap-MP.pdf	B	0,50	Penjelasan unit kerja dan dokumen sudah sesuai Kegiatan prioritas telah ditetapkan dengan penyesuaian isu strategis yang dihadapi PPS Cilacap, hasil survey yanlik, evaluasi kinerja, FGD eksternal (P3K), evaluasi Dumas, evaluasi tata laksana, di sesuai dengan hasil identifikasi sebelumnya. hal tersebut relevan dengan pembangunan ZI dan dituangkan dalam Dokumen Pembangunan ZI	1. Target prioritas harus relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WHBM dan penyesuaian isu prioritas pada unit kerja; 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika seluruh target prioritas tahun berjalan dalam rencana kerja relevan dengan pencapaian tujuan reform setiap area perubahan, dinilai A; b. Jika >30% -100% target prioritas tahun berjalan dalam rencana kerja relevan dengan pencapaian tujuan reform setiap area perubahan, dinilai B; c. Jika <30% target prioritas tahun berjalan dalam rencana kerja relevan dengan pencapaian tujuan reform setiap area perubahan, dinilai C.		
c. Terdapat mekanisme atau media untuk memsosialisasikan pembangunan WBK/WHBM			a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan	A/B/C	A	PPS Cilacap telah melakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder setiap bulan melalui: 1. tatap muka berupa : apel pagi, kegiatan Selasa Sapa Sahabat, kerja bakti jumud khilwan (BekerjaK, sosialisasi/intermalisasi, dan senam pagi 2. media offline berupa papan pengumuman tentang larangan menerima gratifikasi di hari raya, stiker nilai-nilai pembangunan budaya MANTEP, balho, spanduk, himbunan larangan gratifikasi pada setiap Surat Tugas, pengumuman tin takol gratifikasi oleh Pegawai 3. media sosial berupa : a. Youtube dengan alamat https://www.youtube.com/c/PPSCilacap dengan 985 subscriber dan 357 video (s.d. 25 Juli 2024) b. Facebook dengan alamat Facebook https://www.facebook.com/PPSCilacap dengan 232.276, jumlah follower 1.877 c. Instagram dengan alamat https://www.instagram.com/ppscilacap jumlah posting 2.768, jumlah follower 1.877 d. Twitter dengan alamat https://twitter.com/ppscilacap dengan 1.609 pengikut e. WhatsApp group ASN PPS Cilacap berisi pengumuman dan informasi pengembangan kompetensi pegawai dll 4. website PPS Cilacap dengan alamat https://ppscilacap.com/	Mekanisme atau media sosialisasi 2.c. Media sosialisasi 1. Rencana Kerja Informasi publikasi 2023 2. Rencana Kegiatan Sosialisasi (PC) WBK 2023.pdf 3. Rencana Kegiatan Sosialisasi (PC) WBK 2024.pdf 2. Dokumentasi publikasi memsosialisasikan pembangunan WBK ke target media 2023 2. Dokumentasi Informasi Publikasi 3. Video Komunitif 2024 2. Dokumentasi Informasi Publikasi 3. Video Komunitif	A	1,00	Penjelasan unit kerja dan dokumen sudah sesuai PPS Cilacap telah melakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder. Nerusi penjelasan dari Unit kerja dan data dukung telah sesuai	1. Melakukan manajemen media komunikasi dan informasi pembangunan ZI untuk menginformasikan semua perubahan unit kerja ke masyarakat yang dituangkan dalam rencana kerja (Isa menyatu dengan rencana kerja pembangunan ZI atau terpisah) secara berkala; 2. Informasi/publikasi interaktif kepada internal dan stakeholder minimal yang memuat konten upaya, capaian, dan dampak pembangunan ZI melalui: a. Pertemuan tatap muka; b. Media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, Website); c. Media elektronik (running text, videotext, dll); d. Papan pengumuman. 3. Media interaktif adalah aktivitas sosialisasi dan publikasi yang memungkinkan adanya feedback dari pegawai dan stakeholder dapat melalui survei, jumlah seuer, komentar, testimoni, dll; 4. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala, maka dinilai A; b. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder melalui seluruh media, namun tidak secara berkala atau sebaliknya, maka dinilai B.		
III. Pemantauan dan Evaluasi Pemba		1,00							0,78	78,00%			
a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana			a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana	A/B/C/D	A	Seluruh kegiatan pembangunan telah direalisasikan sesuai rencana dan dilengkapi data dukung dengan penjelasan sbb: Kegiatan pembangunan ZI Tahun 2023 telah dilaksanakan seluruhnya sesuai rencana dengan rincian berikut : a. Triwulan I terdapat 51 kegiatan selesai terlaksana dari target Triwulan I 51 kegiatan (100%) terdiri atas: - MP : 11 kegiatan seluruhnya terlaksana - TI : 5 kegiatan seluruhnya terlaksana - SDM : 9 kegiatan seluruhnya terlaksana - Akuntat : 7 kegiatan seluruhnya terlaksana - Pengawasan : 10 kegiatan seluruhnya terlaksana - Yandik : 9 kegiatan seluruhnya terlaksana - Hasil : tidak ada target b. Triwulan II terdapat 54 kegiatan yang terlaksana 100%, terdiri atas: - MP : 8 kegiatan seluruhnya terlaksana - TI : 9 kegiatan seluruhnya terlaksana - SDM : 5 kegiatan seluruhnya terlaksana - Akuntat : 5 kegiatan seluruhnya terlaksana - Peng							

			b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpisah c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM	A/B/C	B	PPS Cilacap telah menggunakan teknologi informasi terpasang dalam operasionalisasi manajemen SDM berupa aplikasi pegawai, Sikpro (e-presensi), portal kkgp-id dan kinerja BKN Belum terdapat inovasi pada operasionalisasi manajemen SDM	Teknologi Informasi Operasionalisasi SDM 2.b Menggunakan Teknologi Informasi dalam Operasionalisasi Manajemen SDM dan Melakukan Inovasi 2024 Tanggap layar aplikasi e-Pegawai 2023 E-Pegawai 2024 E-Pegawai 2024 Tanggap layar aplikasi SIKPEO 2023 SI KEPO 2024 SIKEPO Tanggap layar aplikasi Portal Co Office KKP PORTAL.CO-OFFICE	B	0,50	PPS Cilacap telah menggunakan teknologi informasi terpasang dalam operasionalisasi manajemen SDM berupa aplikasi pegawai, Sikpro (e-presensi), portal kkgp-id dan kinerja BKN Belum terdapat inovasi pada operasionalisasi manajemen SDM	1. Operasionalisasi manajemen SDM di lingkungan KKP dilakukan secara terpasang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP (e-Pegawai) mencakup SKP individu dan organisasi, presensi, dan database pegawai; 2. Unit kerja dapat melakukan inovasi dalam Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan sistem lainnya berbasis TI yang berbeda dengan aplikasi yang sudah ada (disesuaikan dengan karakteristik unit kerja); 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Aktifitas operator SIMPEG bulan november-desember, Aktivitas Operator Aplikasi Sikpro PPSC Oktober-November 2024		
			c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpisah/unit sendiri dan terdapat inovasi b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpisah c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi	A/B/C	A	Pemberian pelayanan kepada publik pada PPS Cilacap telah menggunakan teknologi informasi secara terpasang menggunakan aplikasi: 1. Sistem Informasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SI-SHTI) untuk pelayanan sertifikat hasil tangkapan ikan 2. E-Logbook Penangkapan Ikan (e-LPIB) untuk mendukung layanan STBLK 3. Sistem Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Temam SPB) untuk pemberian layanan SPB 4. SI JAKA (Sistem Integrasi Jasa Kepelabahanan) untuk pelayanan tambah lahab 5. SICEPI (sistem cek fisik untuk pelayanan SKKP) 6. Sipasu untuk pelayanan rekomendasi penggunaan tanah dan/atau bangunan dan perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan Terdapat inovasi dari sakter berupa aplikasi SRIKANDI (Sistem Monitoring Kapal Ikan) yaitu aplikasi berbasis android/PC yang digunakan sebagai alat bantu validasi waktu kedatangan kapal saat pengajuan STBLK kedatangan dan tambah lahab kapal Aplikasi Srikandi telah terintegrasi dengan SPB sehingga pada Srikandi muncul tanda Go (berangkat) jika telah terbit SPB Terdapat pengembangan Aplikasi Sistem Layanan Terpadu Satu Atap Terintegrasi (SI ANTASIDA) yang mempermudah pelaku usaha dalam mengurus dokumen tanpa harus langsung datang ke Pelabuhan. Karena dalam aplikasi ini pelaku usaha dapat mengajukan dokumen dan memantau jalannya dokumen yang diajukan. Dalam aplikasi juga tersedia fitur antrian, call center, dan progres tracking	Pemberian pelayanan kepada publik pada PPS Cilacap telah menggunakan teknologi informasi secara terpasang menggunakan aplikasi: 1. Sistem Informasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SI-SHTI) untuk pelayanan sertifikat hasil tangkapan ikan 2. E-Logbook Penangkapan Ikan (e-LPIB) untuk mendukung layanan STBLK 3. Sistem Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Temam SPB) untuk pemberian layanan SPB 4. SI JAKA (Sistem Integrasi Jasa Kepelabahanan) untuk pelayanan tambah lahab 5. SICEPI (sistem cek fisik untuk pelayanan SKKP) 6. Sipasu untuk pelayanan rekomendasi penggunaan tanah dan/atau bangunan dan perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan Terdapat inovasi dari sakter berupa aplikasi SRIKANDI (Sistem Monitoring Kapal Ikan) yaitu aplikasi berbasis android/PC yang digunakan sebagai alat bantu validasi waktu kedatangan kapal saat pengajuan STBLK kedatangan dan tambah lahab kapal Aplikasi Srikandi telah terintegrasi dengan SPB sehingga pada Srikandi muncul tanda Go (berangkat) jika telah terbit SPB Terdapat pengembangan Aplikasi Sistem Layanan Terpadu Satu Atap Terintegrasi (SI ANTASIDA) yang mempermudah pelaku usaha dalam mengurus dokumen tanpa harus langsung datang ke Pelabuhan. Karena dalam aplikasi ini pelaku usaha dapat mengajukan dokumen dan memantau jalannya dokumen yang diajukan. Dalam aplikasi juga tersedia fitur antrian, call center, dan progres tracking	A	1,00	Pemberian pelayanan kepada publik pada PPS Cilacap telah menggunakan teknologi informasi secara terpasang menggunakan aplikasi: 1. Sistem Informasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SI-SHTI) untuk pelayanan sertifikat hasil tangkapan ikan 2. E-Logbook Penangkapan Ikan (e-LPIB) untuk mendukung layanan STBLK 3. Sistem Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Temam SPB) untuk pemberian layanan SPB 4. SI JAKA (Sistem Integrasi Jasa Kepelabahanan) untuk pelayanan tambah lahab 5. SICEPI (sistem cek fisik untuk pelayanan SKKP) 6. Sipasu untuk pelayanan rekomendasi penggunaan tanah dan/atau bangunan dan perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan Terdapat inovasi dari sakter berupa aplikasi SRIKANDI (Sistem Monitoring Kapal Ikan) yaitu aplikasi berbasis android/PC yang digunakan sebagai alat bantu validasi waktu kedatangan kapal saat pengajuan STBLK kedatangan dan tambah lahab kapal Aplikasi Srikandi telah terintegrasi dengan SPB sehingga pada Srikandi muncul tanda Go (berangkat) jika telah terbit SPB Terdapat pengembangan Aplikasi Sistem Layanan Terpadu Satu Atap Terintegrasi (SI ANTASIDA) yang mempermudah pelaku usaha dalam mengurus dokumen tanpa harus langsung datang ke Pelabuhan. Karena dalam aplikasi ini pelaku usaha dapat mengajukan dokumen dan memantau jalannya dokumen yang diajukan. Dalam aplikasi juga tersedia fitur antrian, call center, dan progres tracking	1. Pelayanan kepada publik yang diunggap menggunakan TI adalah mulai dari pendaftaran sampai pelayanan selesai (seluruh proses pemberian pelayanan); 2. Unit kerja dengan pelayanan menggunakan TI terpasang dapat melakukan inovasi berbasis TI yang berbeda dengan aplikasi yang sudah ada (disesuaikan dengan karakteristik unit kerjanya); 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Rekap data ELBPI bulan April-Desember, Tangkap Layar SIJAKA bulan Juli-Desember, SICEPI Bulan Juli-Desember, SI SHTI bulan Oktober-Desember, SRIKANDI bulan Juli-Desember, Temam SPB bulan Oktober-Desember.		
			d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi	A/B/C	B	- PPS Cilacap telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan publik secara berkala semester - Laporan movev telah memuat informasi pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan, memuat permasalahan dan saran Lap movev 2023 MONEV SPBE SEMESTER 1 3. NOTULENSI RAPAT Monev SPBE_TW_1.pdf NOTULENSI RANVT Monev SPBE_Semester II 2023.pdf 2024 LAPORAN MONEV TI SEMESTER I 2024.pdf NOTULENSI RAPAT SPBE SEMESTER I 2024.pdf	Movev Pemanfaatan Teknologi Informasi 2.4 Melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam Pengukuran Kinerja Unit Operasionalisasi SDM Lap movev 2023 MONEV SPBE SEMESTER 1 3. NOTULENSI RAPAT Monev SPBE_TW_1.pdf NOTULENSI RANVT Monev SPBE_Semester II 2023.pdf 2024 LAPORAN MONEV TI SEMESTER I 2024.pdf NOTULENSI RAPAT SPBE SEMESTER I 2024.pdf	B	0,50	PPS Cilacap telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan publik secara berkala setiap semester Laporan movev telah memuat substansi pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan, memuat permasalahan belum adanya menu update laporan wujudi di dipublikasikan, namun belum menguri kondisi dengan lengkap Laporan sudah memuat saran perbaikan berupa koordinasi dengan Tim PPID Ea I/DIPT	1. Monitoring dan evaluasi (movev) dilaporkan secara berkala (semesteran) terhadap pemanfaatan dan permasalahan yang ditemukan dalam operasional aplikasi meliputi: a. Pengaturan kinerja unit; b. Operasionalisasi SDM; dan c. Pemberian layanan kepada publik. Ketiganya harus termuat dalam laporan movev. 2. Dalam laporan movev, tidak hanya memuat rekomendasi pada periode pelaporan saja, namun juga memuat rekomendasi dan tindaklanjut atas rekomendasi periode pelaporan sebelumnya; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika movev telah memuat informasi dari seluruh aplikasi dan dilhat secara semesteran, maka dinilai A; b. Jika movev dibuat secara berkala, namun belum memuat informasi dari seluruh aplikasi, maka dinilai B.	Akan di lakukan rapat movev SPBE Semester II di bulan desember 2024		
			III. Keterbukaan Informasi Publik	0,50					0,38	75,00%					
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik	A/B/C	A	PPS Cilacap telah menerapkan kebijakan informasi publik melalui: 1. Unit kerja telah membentuk Tim PPID UPT Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas Nomor B.15/PPSC/KP.440/I/2022, Tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor B.12/PPSC/KP.440/I/2023 dan Tahun 2024 dengan Surat Tugas Nomor B.18/PPSC/KP.440/I/2024 terkait melaksanakan tugas sebagai Pejabat dan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentas PPS Cilacap; 2. Telah terdapat inventarisasi jenis KIP sesuai Peraturan Pejabat PPID KKP. 2. Tim telah melakukan penyusunan laporan KIP secara triwulan pada Tahun 2022 dan 2023, sedangkan untuk Tahun 2024 akan disusun secara tahunan 3. Telah dilakukan penyebaran informasi sesuai daftar informasi publik yang telah ditetapkan	Kebijakan KIP PPS Cilacap 3.a. Menyajikan Kebijakan dan Menerapkan tentang informasi Publik 36 KEPMEM KP-2019 tlg PPID KKP.pdf 12 ST PPID PPSC 2023.pdf Surat Tugas PPID Tahun 2024.pdf	A	1,00	PPS Cilacap telah menerapkan kebijakan informasi publik melalui: 1. Unit kerja telah membentuk Tim PPID UPT Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas Nomor B.15/PPSC/KP.440/I/2022, Tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor B.12/PPSC/KP.440/I/2023 dan Tahun 2024 dengan Surat Tugas Nomor B.18/PPSC/KP.440/I/2024 terkait melaksanakan tugas sebagai Pejabat dan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentas PPS Cilacap. 2. Telah terdapat inventarisasi jenis KIP sesuai Peraturan Pejabat PPID KKP. 2. Tim telah melakukan penyusunan laporan KIP secara triwulan pada Tahun 2022 dan 2023, sedangkan untuk Tahun 2024 akan disusun secara tahunan. 3. Telah dilakukan penyebaran informasi sesuai daftar informasi publik yang telah ditetapkan	1. Unit kerja membentuk Tim PPID Pelaksana dengan uraian tugas dan wewenang mengacu pada PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP tanggal 29 Desember 2023 Bagian Keenam (Pasal 13-14). PermenKp Nomor 42 Tahun 2023 ini mencakup PermenKp Nomor 4/Permen KP/2019; 2. Inventarisasi jenis informasi publik tiap unit kerja yang mengacu pada Daftar Informasi Publik KKP 3. Informasi yang termuat dalam poin No. 2 tersebut dijabarkan oleh PPID UPT Pelaksana sesuai dengan jenis informasinya dengan mengacu pada PermenKp Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP tanggal 29 Desember 2023 Bab III Informasi Publik; 4. Penyebarluasan informasi termasuk didalamnya memuat penyebaran informasi sesuai tugas fungsi kehumasan sesuai Permen KP 43 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kehumasan 5. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik (Tahunan) 6. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika sudah terdapat PPID Pelaksana yang menyebarkan sebagian informasi (>30%) yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap, maka dinilai B; b. Jika belum ada PPID Pelaksana dan belum melakukan penyebaran informasi publik, maka dinilai C; c. Jika tidak menyusun laporan Layanan Informasi Publik (Tahunan) dinilai satu tingkat lebih rendah dari seharusnya;			
			b. Telah dilakukan monitoring dan keterbukaan informasi publik	a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan	A/B/C	A	PPS Cilacap telah melakukan movev pelaksanaan kebijakan informasi publik dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara triwulan Tahun 2022 dan 2023 yang memuat: 1. Pelaksanaan pemberian informasi kepada publik dalam 4 kategori informasi meliputi informasi yang diberikan per kategori informasi, waktu pemberian informasi dan penanggung jawab, media penyampaian informasi. 2. Pelaksanaan tugas dan wewenang PPID UPT 3. Rekomendasi serta tindak lanjut atas laporan periode sebelumnya, Tahun 2024 Laporan Layanan Informasi Publik akan disusun secara tahunan sesuai Permen KP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP	Movev KIP dan dokumentasi rapat 2023 2024	B	0,50	PPS Cilacap telah melakukan movev pelaksanaan kebijakan informasi publik dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik 2023 dan 2024 Substansi laporan movev KIP memuat: 1. Pelaksanaan pemberian informasi kepada publik dalam 4 kategori informasi meliputi informasi yang diberikan per kategori informasi, waktu pemberian informasi dan penanggung jawab, media penyampaian informasi. 2. Pelaksanaan tugas dan wewenang PPID UPT 3. Rekomendasi serta tindak lanjut atas laporan periode sebelumnya, Tahun 2024 Laporan Layanan Informasi Publik akan disusun secara tahunan sesuai Permen KP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP	1. Laporan movev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik berupa Laporan Layanan Informasi Publik yang terbit per tahun, minimal memuat informasi tentang: a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik; b. gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik; c. rincian pelayanan Informasi Publik; d. rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kementerian jika ada; e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik; f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik. 2. Laporan Layanan Informasi Publik memuat rekomendasi, kecuali jika sudah dimovev namun tidak ditemui kelemahan yang harus ditindaklanjuti; 3. Rekomendasi hasil movev harus ditindaklanjuti; 4. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika laporan movev disusun, memuat seluruh informasi pada point 1, sudah ditindaklanjuti, maka dinilai A b. Dinilai B, jika: B) Jika substansi laporan movev tidak memuat seluruhnya pada poin 1; atau 2) Jika laporan movev tidak dilengkapi bukti pelaksanaan atau uraian/penjelasan pelaksanaan kegiatan yang ditindaklanjuti c. Jika laporan movev tidak dibuat, maka dinilai C;	Akan di lakukan movev KIP semester II di bulan Desember 2024		
			3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	5,00					4,26	85,12%					
			1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai	0,25					0,22	89,00%					

			b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	A/B/C/D	B	Rencana pengembangan kompetensi pegawai berupa rencana diklat Tahun 2023 dan 2024 telah disusun, untuk Tahun 2023 disusun terhadap 23 pegawai, sedangkan rencana diklat Tahun 2024 ditetapkan untuk 34 pegawai. Rencana pengembangan kompetensi telah ditetapkan dan mempertimbangkan predikat nilai SKP 2022 dan 2023 sebagai pertimbangan hasil pengelolaan kinerja pegawai tahun sebelumnya	Form kebutuhan diklat 2023 FORM PENENTUAN KEBUTUHAN DIKLAT TAHUN 2023 rev.pdf Form Penentuan Kebutuhan Diklat 2024 FORM PENENTUAN KEBUTUHAN DIKLAT TAHUN 2024.pdf				Rencana pengembangan kompetensi 2023-2024 telah disusun berdasarkan analisis tugas, analisis gap kompetensi tahun sebelumnya dan telah mempertimbangkan hasil SKP sebagai dasar pertimbangan pengelolaan kinerja pegawai	1. Pengujian kesesuaian rencana pengembangan kompetensi dengan hasil pengelolaan kinerja pegawai dengan melakukan konfirmasi apakah penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan kinerja pegawai (SKP), dan dapatkan dokumen pendukungnya; 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika sebagian besar jika ≥ 50% rencana mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai, dinilai B; b. Jika sebagian kecil jika < 50% rencana mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai, dinilai C; 3. Prioritas pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan pada gap kompetensi yang besar dan hasil pengelolaan kinerja rendah.	Tidak ada update selama Oktober-November 2024, update terakhir pada Januari 2024, dan seluruh pegawai sudah memenuhi target bangkom 20 JP selama 1 tahun anggaran
			c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75% d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang	A/B/C/D	A	Telah dilakukan perhitungan kesenjangan (GAP) kompetensi pegawai 2023 sebesar 7,20% (dihitung dari hasil akhir tahun 2023) dan 2024 sebesar 17,61% (dihitung dari hasil akhir tahun 2023) dengan standar kompetensi pegawai Perhitungan kesenjangan (GAP) kompetensi pegawai untuk Tahun 2025 akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024	Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi 2023 adalah sebesar 7,20% FORM ANALISIS KESEJANGAN GAP 2023.pdf PRESENTASE KESEJANGAN GAP KOMPETENSI TAHUN 2022 SEMESTER II.pdf Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi 2024 adalah sebesar 17,61% FORM ANALISIS KESEJANGAN GAP 2024 fix.pdf PRESENTASE KESEJANGAN GAP KOMPETENSI TAHUN 2023 SEMESTER II.pdf				Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai telah dihitung per jabatan pegawai Tahun 2023 dan 2024 dengan persentase sebesar 7,20% dan 17,61%	1. Kesenjangan kompetensi pegawai (PNS) yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen PNS (Lampiran 5 tentang Formulir Analisis Kesenjangan (Gap) Kompetensi); 2. Hitung kesenjangan kompetensi pegawai (PNS) dengan standar kompetensi, rumusan dalam persentase; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Seluruh Pegawai sudah memenuhi target Bangkom 20 JP selama 1 Tahun anggaran
			d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat	A/B/C/D	A	Seluruh pegawai di PPS Cilacap telah memperoleh kesempatan/hak Tahun 2023 dan 2024 untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya melalui pemberitahuan diklat/pengembangan kompetensi diumumkan melalui WA grup pegawai dan/atau papan pengumuman.	Bukti Pemberitahuan Diklat/Pengembangan Kompetensi media sosial 2023 dan 2024 a. Media Sosial Bukti Pemberitahuan Diklat/Pengembangan Kompetensi media offline papan pengumuman 2023 dan 2024 b. Media Cetak b. Media Cetak				Seluruh pegawai di PPS Cilacap telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya Tahun 2023 dan 2024 melalui pemberitahuan diklat/pengembangan kompetensi diumumkan melalui WA grup pegawai dan/atau papan pengumuman.	1. Pemberitahuan kesempatan diklat dan pengembangan kompetensi lainnya berdasarkan: a. rencana pengembangan kompetensi pegawai; dan b. pemberitahuan penyelenggaraan (webinar, workshop, in house training, bimtek, diklat, pengembangan kompetensi lainnya). 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika sebagian besar ≥50% pegawai, maka dinilai B; b. Jika sebagian kecil <50% pegawai, maka dinilai C.	Tidak ada update selama Oktober-November 2024, update terakhir pada Desember 2024, karena seluruh pegawai sudah memenuhi target bangkom 20 JP selama 1 tahun anggaran
			e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)	a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai	A/B/C/D	B	PPS Cilacap telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai dengan kondisi: 1. Sampai dengan Desember tahun 2023 seluruh pegawai (76 pegawai) telah mengikuti pengembangan kompetensi. 2. Tahun 2024 (Januari s.d. April) terdapat 28 pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi, namun terdapat PPPK sebanyak 3 orang yang masuk per Maret 2024 dan belum mengikuti kompetensi pegawai.	Upaya Pengembangan Kompetensi Pegawai 2023 sudah dilakukan ke seluruh pegawai INHAOUSE TRAINING 2023 SPT DIKLAT & SERTIFIKAT DIKLAT 2023 Upaya Pengembangan Kompetensi Pegawai 2024 SPT DIKLAT & SERTIFIKAT DIKLAT 2024 Selain TTE PERBANDINGAN JUMLAH KESELURUHAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI YANG TELAH MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SMT 1 2024.pdf				PPS Cilacap telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai dengan kondisi: 1. Tahun 2023 seluruh pegawai (76 pegawai) telah mengikuti pengembangan kompetensi. 2. Tahun 2024 (Semester I) seluruh pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi termasuk pegawai PPPK sebanyak 3 orang yang masuk per Maret 2024	1. Upaya pengembangan kompetensi merupakan realisasi dari rencana pengembangan kompetensi pegawai yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil Gap Kompetensi dan/atau hasil usulan pengembangan kompetensi lainnya; 2. Menyampaikan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya dibandingkan jumlah PNS; 3. Menyusun daftar rekapitulasi diklat/ pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh masing-masing pegawai; 4. Menghitung realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika sebagian besar PNS (≥ 50%) mendapat upaya pengembangan kompetensi, maka dinilai B; b. Jika sebagian besar PNS (<50%) mendapat upaya pengembangan kompetensi, maka dinilai C.	Tidak ada update selama Oktober-November 2024, update terakhir pada Desember 2024, karena seluruh pegawai sudah memenuhi target bangkom 20 JP selama 1 tahun anggaran
			f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan	A/B/C	A	Telah dilakukan move pengembangan kompetensi pada Tahun 2023 dengan kondisi: 1. Telah dilakukan move terhadap seluruh pegawai yang melakukan pengembangan kompetensi 2. Terjadi peningkatan nilai IP ASN semula sebesar 78,06 (semester I 2023) menjadi sebesar 90,19 (Semester II 2023).	Move Hasil Pengembangan Kompetensi 3/4 Move Pengembangan Kompetensi Pegawai Laporan Move dan Rekapit						

			a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan perjanjian kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	A	Terdapat penetapan kinerja individu/pegawai terkait dengan kinerja organisasi serta Perjanjian Kinerja (PK) selaras dengan Sasaran kinerja pegawai (SKP), dengan adanya Matrik Peran Hasil (MPH) dan SKP seluruh pegawai tahun 2024 (79 pegawai). Hal ini terlihat pada penyusunan SKP pegawai yang merupakan cascading dari penetapan kinerja pimpinan yang telah selaras dengan perjanjian kinerja organisasi.	MPH, PK dan SKP seluruh pegawai 4.a. Penetapan Kinerja Individu (SKP Pegawai), Fungsional dan Staf, 2022-2023 MPH ISKOR/IA 2023.pdf MPH SKP CILACAP 2024.pdf	A	1,00	Terdapat penetapan kinerja individu/pegawai terkait dengan kinerja organisasi serta Perjanjian Kinerja (PK) selaras dengan Sasaran kinerja pegawai (SKP), dengan adanya Matrik Peran Hasil (MPH) dan SKP seluruh pegawai tahun 2024 (79 pegawai). Hal ini terlihat pada penyusunan SKP pegawai yang merupakan cascading dari penetapan kinerja pimpinan yang telah selaras dengan perjanjian kinerja organisasi.	1. Penetapan kinerja individu menggunakan SKP Pimpinan unit kerja s.d staff; 2. Menhandingkan kesesuaian IKU unit kerja dengan IKU Eselon I; 3. Menhandingkan SKP dengan IKU unit kerja; 4. Indikator Kinerja Individu (IKI) harus terkait dengan kinerja organisasi; 5. Pengujian dilakukan dari SKP Pimpinan unit kerja sampai dengan jabatan terendah pada unit kerja, dilakukan secara sampling; 6. Hitung kesesuaian penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) dengan penetapan kinerja organisasi, dituangkan dalam persentase; 7. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika ≥ 50% penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) terkait dengan IKU organisasi, maka dinilai B; b. Jika <50% penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) terkait dengan IKU organisasi, maka dinilai C.	Tidak ada perubahan data (Rerja Jan 2024)	
			b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya serta menggambarkan logis model b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	A/B/C/D	B	Ukuran kinerja individu sebagian besar telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya, dengan adanya: 1. Cascading IKU PPS Cilacap 2. Matrik Peran Hasil dari aplikasi kinerja.bkn.go.id 3. SKP seluruh pegawai tahun 2024 (79 pegawai).	Matrik Peran Hasil dan Matrik Cascading 4.a Dokumen Kesesuaian SKP Individu dengan Level Diatasnya, 2022 MPH ISKOR/IA 2023.pdf MPH SKP CILACAP 2024.pdf	B	0,67	Ukuran kinerja individu sebagian besar telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya, dengan adanya: 1. Cascading IKU PPS Cilacap 2. Matrik Peran Hasil dari aplikasi kinerja.bkn.go.id 3. SKP seluruh pegawai tahun 2024 (79 pegawai).	1. Menguji kesesuaian melalui analisis cascading dalam aplikasi SKP unit kerja, apakah IKU organisasi telah dijabarkan ke seluruh pegawai dan apakah antara SKP pimpinan s.d staf telah selaras; 2. Pengujian dilakukan dari SKP Pimpinan unit kerja sampai dengan jabatan terendah pada unit kerja, dilakukan secara sampling secara satu garis cascading; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika ≥ 50 ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya, maka dinilai B; b. Jika <50% ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya, maka dinilai C.	Tidak ada perubahan data (Rerja Jan 2024)	
			c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulan c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan	A/B/C/D/E	B	Pengukuran kinerja individu Tahun 2023 dan 2024 telah dilakukan secara periodik (triwulan) menggunakan aplikasi Kinerja.bkn.go.id dengan adanya SKP Triwulan I, II, III, IV dan SKP Final (tahunan) 2023 serta SKP Triwulan I dan II Tahun 2024.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik Kinerja.bkn.go.id 2023, 2024.	B	0,75	Pengukuran kinerja individu Tahun 2023 dan 2024 telah dilakukan secara periodik (triwulan) menggunakan aplikasi Kinerja.bkn.go.id dengan adanya SKP Triwulan I, II, III, IV dan SKP Final (tahunan) 2023 serta SKP Triwulan I dan II Tahun 2024.	Telah jelas, penilaian mengacu kriteria jawaban. Penilaian SKP menggunakan aplikasi kinerja.bkn.go.id	Penilaian SKP Sudah hingga TW III 2024, penilaian TW IV 2024 pada Januari 2025	
			d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward	Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (Seperti: pengembangan karir individu, atau penghargaan)	Ya/Tidak	Ya	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward: 1. Terdapat kebijakan tentang mekanisme dan kriteria penilaian PNS dan Tenaga Kontrak yang berprestasi untuk pemberian reward berdasarkan Keputusan Kepala PPS Cilacap Nomor 81/PPSPC/KP.700/1/2020 tanggal 3 Januari 2020 yang didalamnya memuat antara lain reward diberikan berupa usulan untuk dikukuhkan dalam diklat. Salah satu kriteria pemberian reward yaitu nilai sasaran kinerja pegawai dengan kategori Baik 2. Telah terdapat pelaksanaan pemilihan bagi pegawai berprestasi secara semesteran Tahun 2023 dan pemberian penghargaan berupa sertifikat 3. Pemilihan pegawai prestasi Tahun 2024 belum dilaksanakan	4.d. Kebijakan Pemberian Reward n Punishment Pegawai, 2022 SK Mekanisme Reward dan Punishment Pegawai Copy of SK Mekanisme dan Kriteria Penilaian untuk Reward, 2020.pdf Data Dukung dan Kertas Kerja Penilaian Perhitungan Penyelenggaraan Pemilihan Pegawai Berprestasi 2023 SEMESTER 1 2024	Ya	1,00	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward: 1. Terdapat kebijakan tentang mekanisme dan kriteria penilaian PNS dan Tenaga Kontrak yang berprestasi untuk pemberian reward berdasarkan Keputusan Kepala PPS Cilacap Nomor 81/PPSPC/KP.700/1/2020 tanggal 3 Januari 2020 yang didalamnya memuat antara lain reward diberikan berupa usulan untuk dikukuhkan dalam diklat. Salah satu kriteria pemberian reward yaitu nilai sasaran kinerja pegawai dengan kategori Baik 2. Telah terdapat pelaksanaan pemilihan bagi pegawai berprestasi secara semesteran Tahun 2023 dan pemberian penghargaan berupa sertifikat 3. Pemilihan pegawai prestasi Tahun 2024 belum dilaksanakan	1. Terdapat Tim Penilai atau mekanisme/kriteria pemberian reward pegawai, antara lain dapat berupa prioritas dalam pengikutsertaan diklat atau penghargaan dalam bentuk lainnya; 2. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Pemberian reward Pegawai Berprestasi Kategori ASN dan TKM Smf II akan dijabarkan Desember 2024	
			y. Penetapan Aturan Disiplin/Kode Etik	0,75					0,50	67,00%				
			a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan	A/B/C/D	B	Aturan disiplin/kode etik perilaku telah diimplementasikan PPS Cilacap melalui: 1. Terdapat kode etik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala PPS Cilacap Nomor 137/PPSPC/KP.150/1/2020 dan Pedirjen No 5.PSR.13/PT/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Pegawai ASN lingkup DAPT 2. Terdapat penetapan Tim movey pelaksana kode etik Tahun 2023 melalui ST Kepala PPS Cilacap Nomor B.7/PPSPC/KP.440/1/2023 tanggal 2 Januari 2023. 3. Telah disusun laporan movey kode etik tahun 2023 yang memuat pelaksanaan kewajiban dan larangan. 4. Tidak terdapat pelanggaran disiplin Tahun 2023 dan 2024	5.a. Dokumen Implementasi atau Pelaksanaan Kode Etik Kode etik/kode perilaku/kode etik profesi Copy of 35. SK Penetapan Kode Etik Pegawai, 2020.pdf Laporan movey dan bakti tindak lanjut hasil movey sebelumnya 2023 Laporan Movey Implementasi Kode Etik TA 2023.pdf 2. ST Tim Kode Etik.pdf 2024 2. ST Tim Kode Etik.pdf	B	0,67	Aturan disiplin/kode etik perilaku telah diimplementasikan PPS Cilacap melalui: 1. Terdapat kode etik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala PPS Cilacap Nomor 137/PPSPC/KP.150/1/2020 dan Pedirjen No 5.PSR.13/PT/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Pegawai ASN lingkup DAPT 2. Terdapat penetapan Tim movey pelaksana kode etik Tahun 2023 melalui ST Kepala PPS Cilacap Nomor B.7/PPSPC/KP.440/1/2023 tanggal 2 Januari 2023. 3. Telah disusun laporan movey kode etik tahun 2023 yang memuat pelaksanaan kewajiban dan larangan. 4. Tidak terdapat pelanggaran disiplin Tahun 2023 dan 2024	1. Implementasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku dilaporkan dalam laporan movey minimal memuat informasi tentang: a. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan movey aturan disiplin/kode etik/dan kode perilaku; b. Pelaksanaan kewajiban dan larangan sesuai butir-butir kewajiban dan larangan pada: 1) Permen KP Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi ASN di lingkungan KKP; dan 2) Kode Etik Profesi yang berlaku pada unit kerja; c. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang terjadi; dan d. Sanksi hukuman disiplin/sanksi moral yang telah dijatuhkan; 2. Laporan movey terhadap penerapan kode etik minimal disusun setiap tahun berisi narasi dengan matriks perdebatan rekomendasi dan implementasi hasil movey serta bakti implementasi menjadi lampiran; 4. Movey tetap disusun meskipun tidak ada pelanggaran terhadap kode etik/kode perilaku; 5. Inovasi dapat berupa metode/cara penilaian/pemantauan kode etik atau penambahan butir kode etik yang baru yang dapat mengatur lebih tajam etika/perilaku pegawai; 6. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Sudah terpenuhi hingga November 2024	
			vi. Sistem Informasi Kepegawaian	0,25					0,25	100,00%				
			a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan	A/B/C	A	Data kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala setiap ada perubahan pegawai pada Tahun 2023 s.d. Mei 2024.	6.a Pemutakhiran Informasi Kepegawaian (Aktifitas Operator) Monitoring Pemutakhiran berkala data SDM oleh Operator e-Pegawai 2023 2024	A	1,00	Data kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala setiap ada perubahan pegawai pada Tahun 2023 s.d. Mei 2024.	1. Melakukan update data kepegawaian pada aplikasi e-Pegawai dan memutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai (red time). 2. Data update yang perlu dicek pada tahun berjalan yaitu: a. Daftar pegawai prestasi; b. Daftar pegawai mutasi; c. Daftar pegawai yang mengalami perpindahan jabatan/kenaikan pangkat/pegawai baru; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika pemutakhiran data informasi kepegawaian telah dilakukan secara red time dan seluruhnya valid, maka dinilai A; b. Jika pemutakhiran data informasi kepegawaian telah dilakukan secara berkala atau red time, namun terdapat data/informasi yang tidak valid, maka dinilai B. c. Jika tidak dilakukan pemutakhiran data informasi kepegawaian, maka dinilai C.	Sudah Terpenuhi Hingga November 2024	
			4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00					3,74	74,71%				
			1. Keterlibatan Pimpinan	2,50					1,39	55,67%				

			a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan b. Jika pimpinan ikut terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perencanaan c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan (hanya menandatangani)	A/B/C	B	Sehubungan kebijakan KKP terkait kewenangan penerbitan Surat Keputusan (SK) bahwa di tingkat UPT untuk SK ditetapkan dalam bentuk Surat Tugas (ST) Pimpinan asiter UPT. PPS Cilacap telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan, antara lain keterlibatan pada: 1. Penyusunan Perjanjian Kinerja tanggal 9 Januari 2024 2. Rapat Penetapan Target Indikator Kinerja Tahun 2024 Lingkup UPT Tanggal 21 Februari 2024 3. Rakor penjabaran target kinerja, membahas target penyerapan anggaran Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024 4. Penyusunan Manual Indikator Kinerja tanggal 22 Februari 2024 5. Penyusunan Rencana Aksi tanggal 22 Februari 2024 6. Penyusunan Rapat RKT 2024 tanggal 9 Oktober 2024	1.a Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pd saat peny perencanaan	B	0,50	Sehubungan kebijakan KKP terkait kewenangan penerbitan Surat Keputusan (SK) bahwa di tingkat UPT untuk SK ditetapkan dalam bentuk Surat Tugas (ST) Pimpinan asiter UPT. PPS Cilacap telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan, antara lain keterlibatan pada: 1. Penyusunan Perjanjian Kinerja tanggal 9 Januari 2024 2. Rapat Penetapan Target Indikator Kinerja Tahun 2024 Lingkup UPT Tanggal 21 Februari 2024 3. Rakor penjabaran target kinerja, membahas target penyerapan anggaran Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024 4. Penyusunan Manual Indikator Kinerja tanggal 22 Februari 2024 5. Penyusunan Rencana Aksi tanggal 22 Februari 2024 6. Penyusunan Rapat RKT 2024 tanggal 9 Oktober 2024	1. Yang dimaksud dengan pimpinan adalah Kepala Unit Organisasi Eselon II dan UPT. 2. Tahapan penyusunan perencanaan kinerja terdiri dari : a. Usulan/masukan atas Konsep Renstra/Renja Unit Kerja Atasannya, b. Penyusunan Perjanjian Kinerja c. Penyusunan Manual Indikator Kinerja d. Penyusunan Rencana Aksi e. Usulan/Masukan atas SK IKU Unit Kerja Atasannya 3. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan kinerja dapat berupa: a. Memo usulan/Masukan atas konsep Renstra/Renja Unit Kerja Atasannya atau keterlaksanaan unit kerja dalam proses penyusunan Renstra/Renja Unit Kerja Atasannya dibuktikan dengan daftar kehadiran pimpinan unit kerja eselon II/UPT dan notulensi kegiatan. Dapat juga berupa rapat internal yang membahas masalah Renstra b. Keterlaksanaan Pimpinan di unit kerja dalam kegiatan penyusunan dan/atau Revisi/Validasi Perjanjian Kinerja, Manual indikator Kinerja, Rencana Aksi c. Memo usulan/Masukan atas Usulan/Masukan atas SK IKU unit kerja atasannya atau keterlaksanaan unit kerja dalam proses penyusunan SK IKU Unit Kerja Atasannya dibuktikan dengan daftar kehadiran pimpinan unit kerja eselon II/UPT dan notulensi kegiatan. Dapat juga berupa rapat internal yang membahas masalah SK IKU unit kerja atasannya 4. Penilaian mengacu kriteria jawaban: a. Jika pimpinan terlibat dalam penyusunan 3 dokumen perencanaan pada poin 2b,2c,2d, dinilai A b. Jika pimpinan terlibat dalam penyusunan salah satu dokumen perencanaan pada poin 2b,2c,2d, dinilai B			
			b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja	a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian kinerja b. Jika pimpinan terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perjanjian kinerja c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja	A/B/C	B	PPS Cilacap telah melibatkan pimpinan secara langsung saat penyusunan penetapan kinerja, berupa keterlibatan pada: 1. Rapat koordinasi Saker Pusat dan UPT lingkup D/PT Tahun 2024 dengan pembahasan target kinerja, dialog kinerja dan target penyerapan anggaran Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024. 2. Pembahasan Perjanjian Kinerja (PK) secara internal pada tanggal 22 Februari 2024. 3. Penyusunan dan Penetapan PK lingkup UPT pada tanggal 21 Februari 2024.	Pimpinan terlibat dalam tahapan penyusunan perjanjian kinerja 1.b Unit kerja telah melibatkan secara langsung rim saat peny PK	B	0,50	PPS Cilacap telah melibatkan pimpinan secara langsung saat penyusunan perjanjian kinerja, berupa keterlibatan pada: 1. Rapat koordinasi Saker Pusat dan UPT lingkup D/PT Tahun 2024 dengan pembahasan target kinerja, dialog kinerja dan target penyerapan anggaran Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024. 2. Pembahasan Perjanjian Kinerja (PK) secara internal pada tanggal 22 Februari 2024. 3. Penyusunan dan Penetapan PK lingkup UPT pada tanggal 21 Februari 2024.	1. Yang dimaksud dengan pimpinan adalah Kepala Unit Organisasi Eselon II dan UPT. 2. Tahapan penyusunan penetapan kinerja terdiri dari : a. Dialog Kinerja Organisasi antara Kepala Unit Organisasi Eselon I dan Kepala Unit Organisasi Eselon II dan UPT; b. Revisi Perjanjian Kinerja c. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja 3. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat tahapan penyusunan perjanjian kinerja dapat berupa pemberian arahan, Notulensi Kegiatan, Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja yang disahkan pimpinan dan Perjanjian Kinerja yang disahkan pimpinan unit kerja. 4. Penilaian mengacu kriteria jawaban. a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian kinerja pada poin 2, dinilai A b. Jika pimpinan terlibat dalam salah satu tahapan penyusunan perjanjian kinerja pada poin 2, dinilai B	Melakukan beberapa update data dukung sbb: 1. Revisi PK yang ditandatangani 22 November 2024		
			c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan b. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja secara berkala	A/B/C/D	B	Kepala PPS Cilacap selalu memantau pencapaian kinerja secara berkala (triwulanan) melalui rapat/nasev kinerja triwulanan, Laporan Kinerja (LKJ) yang terbit setiap triwulanan, dan dilakukan monitoring rutin setiap minggu pada kegiatan apel pagi. Telah terdapat matriks capaian target IKU Triwulan I, II dan III 2024 yang memuat capaian terhadap target dan justifikasi. Terdapat kenaikan angka NPS pada triwulan II yaitu sebesar 115,79% dibandingkan dengan Triwulan I sebesar 115,59%	Notulensi, Daftar Hadir, Dokumentasi Rapat Monev LKJ dan Bukti Tindak Lanjut Pemantauan Pimpinan 1. Pemantauan Pimpinan dalam Pencapaian Kinerja secara berkala	B	0,67	Kepala PPS Cilacap selalu memantau pencapaian kinerja secara berkala (triwulanan) melalui apel/monev kinerja triwulanan, Laporan Kinerja (LKJ) yang terbit setiap triwulan, dan dilakukan monitoring rutin setiap minggu pada kegiatan apel pagi. Telah terdapat matriks capaian target IKU Triwulan I, II dan III 2024 yang memuat capaian terhadap target dan justifikasi. Terdapat kenaikan angka NPS pada triwulan II yaitu sebesar 117,14% dibandingkan TW II sebesar 115,79% dan dibandingkan dengan Triwulan I sebesar 115,59%.	1. Pimpinan di unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala dilakukan melalui: a. Aliran pimpinan untuk memantau capaian kinerja organisasi dalam aplikasi Rinekras; b. Melakukan rapat internal/masukan pimpinan/apel pagi di unit kerja terhadap evaluasi kinerja secara triwulanan Apel pagi yang dilaksanakan berkala dengan subtema menentukan kinerja organisasi dan dipimpin oleh pimpinan serta diampirkan notulen apel pagi yang memuat pencapaian kinerja. 2. Hasil pemantauan ditindaklanjuti disertai dokumen pendukung; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Melakukan beberapa update data dukung sbb: 1. Screeshoot Capaian Kinerja PPS Cilacap TW III Tahun 2024 di Aplikasi Kinerjaaku 2. Rapat MONEV TW III yang dilaksanakan 8 Oktober 2024; 3. Laporan Kinerja TW III Tahun 2024 4. Matriks Capaian Target IKU TW III PPSK 2024		
			II. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2,50								2,34	93,78%			
			a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada	ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap	Ya/Tidak	Ya	PPS Cilacap telah memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap yaitu: 1. Renstra 2020 - 2024; 2. Renstra Kerja Tahun 2024 dari aplikasi Krisna; 3. Perjanjian Kinerja TA 2023 s.d. 2024; 4. Manual indikator kinerja; 5. Rencana Aksi.	1. Renstra 2020-2024 2. Renja Tahun 3. Perjanjian Kinerja 4. Manual indikator kinerja 5. Rencana Aksi 2.a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada 2023 2024	Ya	1,00	PPS Cilacap telah memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap yaitu: 1. Renstra 2020 - 2024; 2. Renstra Kerja Tahun 2024 dari aplikasi Krisna; 3. Perjanjian Kinerja TA 2023 s.d. 2024; 4. Manual indikator kinerja; 5. Rencana Aksi.	1. Dokumen perencanaan kinerja terdiri atas : a. Renstra/Renja Unit Kerja Atasannya yang telah disahkan, b. Perjanjian Kinerja yang telah disahkan, c. Manual Indikator Kinerja yang telah disahkan dalam bentuk Carta Pengantar d. Rencana Aksi yang telah disahkan, e. SK IKU Unit Kerja Atasannya yang telah disahkan, 2.Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan jika salah satu dokumen tidak terpenuhi maka dinilai Tidak	Melakukan beberapa update data dukung sbb: 1. Revisi PK yang ditandatangani 22 November 2024 yang direvisi dengan nota dinas dari Kepala Biro Keuangan dan BMR Hal Revisi Target dan Manual IKU RKA RKP TA, 2024 2. Rencana Aksi TW III 2024		
			b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	ya, jika perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Ya/Tidak	Ya	Perencanaan kinerja PPS Cilacap telah berorientasi hasil didukung dengan dokumen: 1. Renstra 2020 - 2024; 2. Tangkap layar Rencana Kerja Tahun 2024 dari aplikasi Krisna; 3. Perjanjian Kinerja TA 2024	1. Renstra 2020-2024 2. Renja 3. PK 4. Matrik IKU berorientasi Hasil 2.b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil 2024 2023	Ya	1,00	Perencanaan kinerja PPS Cilacap telah berorientasi hasil didukung dengan dokumen: 1. Renstra 2020 - 2024; 2. Tangkap layar Rencana Kerja Tahun 2024 dari aplikasi Krisna; 3. Perjanjian Kinerja TA 2024	1. Sasaran berorientasi hasil apabila memenuhi ketentuan : a. Menggambarkan kondisi ideal dan realista b. Sasaran berwujud, terukur dan memperoleh Prioritas Tinggi c. Merupakan Outcome atau Output Penting Bukan kegiatan atau proses 4. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jumlah sasaran yang telah berorientasi hasil dibandingkan jumlah sasaran keseluruhan; b. Jika >50% sasaran telah berorientasi hasil, maka dinilai Ya.	Melakukan beberapa update data dukung sbb: 1. Revisi PK yang ditandatangani 22 November 2024		
			c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	ya, jika unit kerja memiliki IKU	Ya/Tidak	Ya	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS Cilacap telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 11 Tahun 2023, terdapat 21 IKU pada Pelabuhan Perikanan Samudera Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS Cilacap telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 15 Tahun 2024, terdapat 18 IKU untuk pelabuhan perikanan samudera	SH IKU PPS Cilacap 2.c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ya	1,00	Terdapat Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS Cilacap telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 11 tahun 2023 dan 15 Tahun 2024	IKU yang ditetapkan oleh Eselon I melalui SK IKU dan Perjanjian Kinerja yang telah disahkan	Melakukan beberapa update data dukung sbb: 1. Revisi PK yang ditandatangani 22 November 2024.		
			d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART	a. Jika seluruh indikator kinerja telah SMART b. Jika sebagian besar indikator kinerja telah SMART c. Jika sebagian kecil indikator kinerja telah SMART d. Jika belum ada indikator kinerja yang SMART	A/B/C/D	A	Dokumen yang terdapat: 1. Renstra 2020 - 2024; 2. Perjanjian Kinerja TA 2024 telah diint Kepala PPS dan dalam proses nt Ptl. D/PT; 3. Manual IKU 2024; 4. Surat Setidjen PT Nomor B.2934/D/PT.1/7U.330/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Penyempurnaan Hasil Verifikasi SAMP 5. Berita Acara Rekonsiliasi Kinerja Pusat dan UPT Triwulan III Tahun 2023 6. Hasil analisis IKU SMART PPS Cilacap	2.d Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART IKU SMART 6. Tabel analisis SMART sesuai Lampiran II Permen KP 35 Tahun 2023	A	1,00	Indikator telah memenuhi kriteria SMART dengan dibuktikan data dukung sbb: 1. Renstra 2020 - 2024; 2. Perjanjian Kinerja TA 2024 telah diint Kepala PPS dan dalam proses nt Ptl. D/PT; 3. Manual IKU 2024; 4. Surat Setidjen PT Nomor B.2934/D/PT.1/7U.330/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Penyempurnaan Hasil Verifikasi SAMP 5. Berita Acara Rekonsiliasi Kinerja Pusat dan UPT Triwulan III Tahun 2023 6. Hasil analisis IKU SMART PPS Cilacap	1. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria: a. Spesifik (spesifik); b. Measurable (dapat diukur); c. Achievable (dapat dicapai); d. Relevant (relevan); dan e. Time Bound (sesuai dengan kurun waktu tertentu). 2. Untuk mempermudah penilaian IKU SMART dapat dilakukan pengecekan manual IKU; 3. Jumlah IKU dijabarkan per tahun, kemudian bandingkan jumlah IKU yang telah memenuhi kriteria SMART dengan seluruh jumlah IKU, tuncangan dalam persentase. 4. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika sebagian besar (>50%) indikator kinerja unit kerja telah SMART, maka dinilai I; b. Jika sebagian kecil (<50%) indikator kinerja unit kerja telah SMART, maka dinilai C;	Melakukan beberapa update data dukung sbb: 1. Revisi PK yang ditandatangani 22 November 2024; 2. Rencana Aksi TW III 2024		
			e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu	Ya/Tidak	Ya	Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu, dengan rincian sebagai berikut: 1. LKJ tahun 2022 : 13 Januari 2023. 2. LKJ Tw I 2023 : ditandatangani dan disampaikan tanggal 13 April 2023. 3. LKJ Tw II 2023 : ditandatangani dan disampaikan tanggal 14 Juli 2023. 4. LKJ Tw III 2023 : ditandatangani dan disampaikan tanggal 16 Oktober 2023. 5. LKJ Tahun 2023 : ditandatangani dan disampaikan tanggal 18 Januari 2024. 6. LKJ Triwulan I 2024 : ditandatangani dan disampaikan 19 April 2024 7. LKJ Triwulan II 2024 : ditandatangani dan disampaikan tanggal 15 Juli 2024	2.e Laporan kinerja telah disusun tepat waktu e. 2 LKJ Tahunan e. 1 LKJ Triwulanan 3. Bukti Penyempurnaan Laporan Kinerja	Ya	1,00	Penjelasan unit kerja dan dokumen sudah sesuai Unit kerja telah menyusun seluruh laporan kinerja tepat waktu	Melakukan beberapa update data dukung sbb: 1. Laporan Kinerja TW III yang ditandatangani 18 Oktober 2024; 2. bukti penyempurnaan Laporan Kinerja TW III melalui portal			

	f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja	A/B/C	B	PPS Cilacap secara berkala telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) setiap Triwulan dan memberikan informasi tentang Kinerja. Dokumen yang tersedia : 1. Renstra 2020 - 2024; 2. LKj Triwulan I Tahun 2023 s.d. Triwulan I 2024. 3. LKj Tahunan 2023.	2.f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	B	0,50	PPS Cilacap secara berkala telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) setiap Triwulan dan memberikan informasi tentang Kinerja. Dokumen yang tersedia : 1. Renstra 2020 - 2024; 2. LKj Triwulan I Tahun 2023 s.d. Triwulan I 2024. 3. LKj Tahunan 2023.	1. Laporan kinerja minimal memuat informasi: A. Pada LKj tahunan : Memuat informasi kinerja Capaian kinerja sebagaimana dalam Lampiran 8 Halaman 44 Permen KP 35/2023 yaitu : 1). Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2). Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3). Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi; 4). Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5). Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 6). Analisa atas efisiensi penggunaan sumberdaya; 7). Analisa program/kegiatan yang menunjng keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 8. Realisasi anggaran B. Pada LKj triwulan : Memuat informasi kinerja Capaian kinerja sebagaimana dalam Lampiran 8 Halaman 44 Permen KP 35/2023 yaitu : 1). Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Triwulan berjalan; 2). Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan berjalan dengan Triwulan tahun sebelumnya (opsional); 3). Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan berjalan dengan target Tahunan; 4). Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 5). Analisa program/kegiatan yang menunjng keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	Melakukan beberapa update data dukung sbb: 1. Laporan Kinerja TW III yang ditandatangani 18 Oktober 2024;
	g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja	ya, jika terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja	Ya/Tidak	Ya	Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja, dengan adanya : 1. Manual IKU 2023; 2. Tangkap layar capaian kinerja di aplikasi Kinerjaku periode Triwulan I s.d. III Tahun 2023 dan capaian Tahun 2023; 3. Laporan Monev Kinerja Triwulan I s.d. IV Tahun 2023 4. Manual IKU TA 2024	2.g. Terdapat sistem informasi-mekanisme informasi kinerja	Ya	1,00	Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja, dengan adanya : 1. Manual IKU 2023; 2. Tangkap layar capaian kinerja di aplikasi Kinerjaku periode Triwulan I s.d. III Tahun 2023 dan capaian Tahun 2023; 3. Laporan Monev Kinerja Triwulan I s.d. IV Tahun 2023 4. Manual IKU TA 2024 unit kerja menggunakan sistem informasi kinerjaku dan mengupload capaian kinerja secara berkala sesuai dengan pelaporannya ke aplikasi Kinerjaku	1. Terdapat sistem informasi dalam pengelolaan kinerja, yaitu aplikasi Kinerjaku; 2. Terdapat dasar hukum pengelolaan kinerja organisasi (Permen KP No. 35/PERMEN-KP/2023); 3. Capaian kinerja diinput secara berkala sesuai periode pelaporannya ke aplikasi pengelolaan kinerja KKP (kinerjaku.lkpp.go.id). 4. Penilaian: a. Jika unit kerja menggunakan sistem informasi kinerja dan mengupload capaian kinerja secara berkala sesuai dengan pelaporannya ke aplikasi Kinerjaku, maka dinilai Ya b. Jika unit kerja menggunakan sistem informasi kinerja, namun tidak mengupload capaian kinerja secara berkala sesuai dengan pelaporannya ke aplikasi Kinerjaku, maka dinilai Tidak	Melakukan beberapa update data dukung sbb: 1. Screenshoot NPS TW III Tahun 2024; 2. Laporan Verifikasi Capaian Kinerja TW III PPS Cilacap Tahun 2024 3. Hasil Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024 tanggal 29 November 2024
	h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menanggung akuntabilitas kinerja	a. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten b. Jika sebagian SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten c. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja belum ada yang kompeten	A/B/C	A	Tim Pengelola Kinerja PPS Cilacap tahun 2023 yang ditetapkan berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1/PPSC/KP.440/I/2023 yaitu Sigit Purwokito, Yan Luby, Lutfi Arikah, Bambang Triyono, Fanni Jasmike, Hendriyanto, Agung Pertiaga, Nugroho Wahyu Kusumo Tim Pengelola Kinerja PPS Cilacap tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Surat tugas Nomor B.17/PPSC/KP.440/I/2024 yaitu Sigit Purwokito, Yan Luby, Lutfi Arikah, Bambang Triyono, Fanni Jasmike, Hendriyanto, Agung Pertiaga, Nugroho Wahyu Kusumo Seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja telah kompeten dengan dilakukan upaya peningkatan kompetensi yang melalui webinar, sosialisasi maupun forum manajemen kinerja yang diadakan dengan sertifikat Seluruh tim pengelola kinerja telah dilakukan upaya peningkatan kompetensi antara lain melalui: 1. Webinar "Memahami SAKIP berdasarkan Perpres No 29 tahun 2014 2. Webinar "penguatan akuntabilitas keuangan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi 3. Webinar "memahami LKE AKIP (OPT) komponen perencanaan (Pemerpuan RN 88/2021) 4. "Sosialisasi PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga 5. Webinar penguatan implementasi SAKIP tanggal 14 Maret 2024	2.h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja	A	1,00	Seluruh pengelola kinerja PPS Cilacap telah kompeten dan dilakukan upaya peningkatan kompetensi kepada SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.	Kompetensi minimal memenuhi unsur sebagai berikut: 1. Telah mengikuti dilakr AKIP atau telah mengikuti kintek/sosialisasi/in house training yang diadakan dengan Sertifikat tentang AKIP atau pengelolaan kinerja 2. Perhitungan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja berdasarkan Penetapan ST/SK Pimpinan Unit Kerja Organisasi dan bandingkan dengan SDM yang kompeten tuangkan dalam persentase 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten, maka dinilai A; b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh >30% <100% SDM yang kompeten, maka dinilai B; c. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja < 30%, maka dinilai C.	
	8. PENGUATAN PENGAWASAN	7,50						4,78	63,74%		
	1. Pengendalian Gratifikasi	1,50						1,25	83,50%		
	a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Jika belum dilakukan public campaign	A/B/C	A	Selubungan kebijakan KKP terkait kewenangan penerbitan Surat Keputusan (SK) bahwa di tingkat UPT untuk SK ditetapkan dalam bentuk Surat Tugas (ST) Pimpinan atasan UPT. Telah dilakukan kampanye publik tentang pengendalian gratifikasi Tahun 2023 dan 2024 yang dilakukan secara bulanan dengan data dukung: 1. rencana kerja public campaign 2023 dan 2024. Berupa: - Apel pagi - Pencantuman larangan gratifikasi dalam ST - Pembuatan balho, PIN, video anti gratifikasi, serta larangan menerima parcel hari raya - Sosialisasi anti gratifikasi 2. Bukti dukung pelaksanaan giatan PC berkala bulanan yaitu Apel Pagi, publikasi media, pemakaian PIN, pencantuman larangan KKN,	Laporan pelaksanaan Public Campaign Pengendalian gratifikasi 1. A.PELAKSANAAN PUBLIC CAMPAIGN TENTANG GRATIFIKASI		A	1,00	Selubungan kebijakan KKP terkait kewenangan penerbitan Surat Keputusan (SK) bahwa di tingkat UPT untuk SK ditetapkan dalam bentuk Surat Tugas (ST) Pimpinan atasan UPT. Telah dilakukan kampanye publik tentang pengendalian gratifikasi Tahun 2023 dan 2024 yang dilakukan secara bulanan dengan data dukung: 1.	

			d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait	A/B/C	B	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait, yaitu dengan mempublikasikan Laporan SPI melalui website dan pengiriman email kepada Pusat, namun belum memuat seluruh substansi pada unsur-unsur SPI.	1. <u>Data Dukung Publikasi SPI Tahun 2022 dan 2023</u>	B	0,50	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait, yaitu dengan mempublikasikan Laporan SPI melalui website dan pengiriman email kepada Pusat, namun belum memuat seluruh substansi pada unsur-unsur SPI.	1. SPI yang diinformasikan dan dikomunikasikan berpedoman pada Lampiran PP No. 60 Tahun 2008 Bagian IV tentang Informasi dan Komunikasi; 2. Saluran SPI yang diinformasikan, berupa: a. Lingkungan pergaulan yang telah dibangun (8 unsur); b. Penilaian risiko yang telah dilakukan; c. Aktivitas pergaulan yang telah dilakukan untuk meminimalisir risiko d. Informasi dan komunikasi; e. Pemantauan SPI yang diinformasikan, antara lain dapat berupa self assesment maturitas SPI; f. SPI diinformasikan kepada seluruh pihak terkait yaitu pegawai dan stakeholder; g. Media Informasi dan komunikasi dapat menggunakan: a. Pertemuan tatap muka; b. Media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, Website); c. Media elektronik (running text, videotron, dll); d. Media Cetak (surat,dll); e. Papan pengumuman. 5. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait (pegawai dan stakeholder), maka dinilai A; 6. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika unit kerja telah menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pihak seluruh substansi SPI, maka dinilai A b. Jika unit kerja telah menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pihak seluruh substansi SPI, maka dinilai B	Melakukan beberapa update data dukung sbb: 1. Laporan SPI Trivulan III terpenahi; 2. Laporan SPI Trivulan IV di akhir bulan Desember	
			iii. Pengaduan Masyarakat	1,50					0,94	62,50%			1. Implementasi kebijakan pengaduan mengacu Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan KKP minimal meliputi: a. Terlebitnya Tim Penanganan Pengaduan yang ditetapkan Pimpinan Belon I; b. Mekanisme/SOP penanganan pengaduan yang ditetapkan kepa sarker mengacu SOP Penanganan Pengaduan yang diterbitkan oleh TPP Kementerian; c. Pengawasan SPN Laport dan mengutip seluruh pengaduan yang bersumber dari saluran lain yang dimiliki unit kerja (jennara lain: kotak pengaduan, ruang pengaduan, email, dll dalam web lapo.go.id); d. Penyusunan dan penyempurnaan penanganan pengaduan bulanan (berisi data/realitanya laporan pengaduan) dan secara berjenjang disampaikan kepada TPP Kementerian; 2. Implementasi dapat disampaikan melalui laporan movey penanganan pengaduan secara semester dengan melampirkan bukti pelaksanaan keempat substansi di atas, yaitu ada/tidak adanya pengaduan yang masuk, SK/Pengawasan sebagai Tim Penanganan Pengaduan, mekanisme/SOP penanganan pengaduan, dan foto/printscreen sarana pengaduan yang disediakan; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Melakukan beberapa update data dukung sbb: 1. Lap Penanganan pengaduan sampai dengan bulan November; 2. Screenshot Spnlaport sampai dengan bulan November
			a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat	A/B/C	B	kebijakan penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan, antara lain 1. Tim penanganan pengaduan yang ditunjuk melalui ST Kepala unit kerja Tahun 2023 dan 2024; 2. Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan PPSC Tahun 2023 dan 2024; 3. Telah memiliki SOP dan alur proses penanganan pengaduan, sarana pengaduan telepon/SMS; 4. Melakukan internalisasi penanganan pengaduan dan WBS melalui kegiatan apel pagi, sosialisasi melalui media cetak (spanduk, banner) dan media sosial/elektronik (twitter, website), serta 5. Melakukan movey atas penanganan pengaduan secara bulanan. 6. Laporan movey penanganan pengaduan secara semester dengan melampirkan bukti pelaksanaan keempat substansi di atas, yaitu ada/tidak adanya pengaduan yang masuk; 7. Terlebit inovasi terkait pengaduan masyarakat terintegrasi dalam Aplikasi Antena. Didalam S Antena, pengaduan masyarakat yang masuk dapat terlihat tracking status apakah sudah tindak lanjut atau belum.	KEBIJAKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 3.A. KEBIJAKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 2023 2024	B	0,50	kebijakan penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan, antara lain 1. Tim penanganan pengaduan yang ditunjuk melalui ST Kepala unit kerja Tahun 2023 dan 2024; 2. Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan PPSC Tahun 2023 dan 2024; 3. Telah memiliki SOP dan alur proses penanganan pengaduan, sarana pengaduan telepon/SMS; 4. Melakukan internalisasi penanganan pengaduan dan WBS melalui kegiatan apel pagi, sosialisasi melalui media cetak (spanduk, banner) dan media sosial/elektronik (twitter, website), serta 5. Melakukan movey atas penanganan pengaduan secara bulanan. 6. Laporan movey atas penanganan pengaduan secara bulanan. 7. Melakukan movey atas penanganan pengaduan secara semester dengan melampirkan bukti pelaksanaan keempat substansi di atas, yaitu ada/tidak adanya pengaduan yang masuk; 8. Terlebit inovasi terkait pengaduan masyarakat terintegrasi dalam Aplikasi Antena. Didalam S Antena, pengaduan masyarakat yang masuk dapat terlihat tracking status apakah sudah tindak lanjut atau belum.	1. Memastikan TPP unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang hanya memiliki kewenangan unit kerja; 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Melakukan beberapa update data dukung sbb: 1. Lap Penanganan pengaduan sampai dengan bulan November; 2. Screenshot Spnlaport sampai dengan bulan November	
			b. pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	ya,pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	Ya/Tidak	Ya	PPS Cileaup telah melakukan penanganan pengaduan Tahun 2023 (12 pengaduan) dan 2024 (s.d.Juni 2024 sebanyak 8 pengaduan) yg seluruhnya telah tuntas ditindaklanjuti. Seluruhnya telah diinput kedalam aplikasi Laport.	3.B. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT YG DITINDAKLANJUTI Laporan Penanganan Pengaduan 2023 2024 Laporan Sekretariat Pengaduan 2023 2024 -	Ya	1,00	PPS Cileaup telah melakukan penanganan pengaduan Tahun 2023 (12 pengaduan) dan 2024 (s.d.Juni 2024 sebanyak 8 pengaduan) yg seluruhnya telah tuntas ditindaklanjuti. Seluruhnya telah diinput kedalam aplikasi Laport.	1. Memastikan TPP unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang hanya memiliki kewenangan unit kerja; 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Melakukan beberapa update data dukung sbb: 1. Lap Penanganan pengaduan sampai dengan bulan November; 2. Screenshot Spnlaport sampai dengan bulan November	
			c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak secara berkala c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	B	1. Pada Tahun 2023 dan 2024 telah dilakukan movey terhadap penanganan pengaduan masyarakat di setiap semester 2. Secara substansi movey telah menginformasikan saran perbaikan tindak lanjut periode sebelumnya, hasil pengaduan, SDM yang menangani pengaduan/Tim Penanganan Pengaduan, SOP, dan sarana prasarana pengaduan.	3.C. MONEY PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 2023 2024	B	0,50	1. Pada Tahun 2023 dan 2024 telah dilakukan movey terhadap penanganan pengaduan masyarakat di setiap semester 2. Secara substansi movey telah menginformasikan saran perbaikan tindak lanjut periode sebelumnya, hasil pengaduan, SDM yang menangani pengaduan/Tim Penanganan Pengaduan, SOP, dan sarana prasarana pengaduan. 3. Laporan movey atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan oleh unit kerja sesuai kewenangannya; 4. Laporan movey atas penanganan pengaduan masyarakat telah disusun mekapan tidak terdapat pengaduan. 5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika substansi movey tidak lengkap, maka dinilai satu tingkat lebih rendah; b. Jika dalam movey tidak memuat saran perbaikan, maka dinilai satu tingkat lebih rendah; c. Jika substansi movey tidak lengkap dan tidak memuat saran perbaikan, maka dinilai 0.	Melakukan beberapa update data dukung sbb: 1. Lap Penanganan pengaduan sampai dengan bulan November; 2. Laporan Penanganan Pengaduan Semester II di akhir bulan Desember		
			d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti	A/B/C	B	laporan Movey penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti, bukti penyelesaian periode sebelumnya belum dilengkapi foto bukti	3.D BUKTI TINDAK LANJUT HASIL MONEY PENANGANAN DUKUNG 2023 2024	B	0,50	laporan Movey penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti, bukti penyelesaian periode sebelumnya belum dilengkapi foto bukti	1. Rekomendasi yang disampaikan dalam laporan movey atas penanganan pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti; 2. Laporan movey yang tidak memberikan rekomendasi tidak akan dinilai, kecuali bila seluruh substansi sudah dibahas dalam movey namun tidak ditemukan permasalahan; 3. Jika tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk bukan berarti tidak perlu membuat rekomendasi. Rekomendasi tetap diperlukan untuk perbaikan pengelolaan pengaduan; 4. Tim menghitung jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti per tahun dan disampaikan; 5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Dinilai sebagai jika (30%) hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika movey tidak memberikan rekomendasi, maka dinilai satu tingkat lebih rendah, kecuali bila seluruh substansi sudah dibahas dalam movey namun tidak ditemukan permasalahan.	Melakukan beberapa update data dukung sbb: 1. Lap Penanganan pengaduan sampai dengan bulan November; 2. Laporan Penanganan Pengaduan Semester II di akhir bulan Desember	
			iv. Whistle-Blowing System	1,50					0,75	50,00%			1. Implementasi kebijakan pengaduan mengacu Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan KKP yaitu erlebitnya Tim Penanganan Pengaduan yang ditetapkan Pimpinan Eelon I yang memiliki tugas melakukan sosialisasi/publikasi kebijakan dan saluran Whistleblowing System; 2. Implementasi dapat disampaikan melalui laporan movey penanganan pengaduan yang memuat bukti pelaksanaan tugas Tim Penanganan Pengaduan; 3. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; 4. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Lap WBS Semester I di akhir bulan desember
			a. Whistle-Blowing System telah diterapkan	a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing System	A/B/C	B	Internalisasi WBS dilaksanakan melalui berbagai metode, antara lain melalui media sosial grup Whatsapp kepada pegawai dan Twitter, poster, dan internalisasi secara tatap muka pada 3 Juli 2021 secara daring dengan melibatkan 95 pegawai. Penerapan WBS juga tetap diterapkan sampai dengan TA 2024, yaitu penerapan Tim Penanganan Pengaduan dan WBS, penyusunan SOP dan alur proses penanganan pengaduan WBS, penyediaan sarana pengaduan WBS (telepon/SMS), melakukan internalisasi penanganan pengaduan WBS melalui kegiatan apel pagi, dan kegiatan sosialisasi secara daring kepada pegawai, sosialisasi melalui media cetak (spanduk, banner) dan media sosial/elektronik (twitter, website), serta melaksanakan movey secara bulanan.	Internalisasi WBS 4.A. INTERNALISASI WBS 2023 2024	B	0,50	Internalisasi WBS dilaksanakan melalui berbagai metode, antara lain melalui media sosial grup Whatsapp kepada pegawai dan Twitter, poster, dan internalisasi secara tatap muka pada 5 Juli 2021 secara daring dengan melibatkan 95 pegawai. Penerapan WBS juga tetap diterapkan sampai dengan TA 2024, yaitu penerapan Tim Penanganan Pengaduan dan WBS, penyusunan SOP dan alur proses penanganan pengaduan WBS, penyediaan sarana pengaduan WBS (telepon/SMS), melakukan internalisasi penanganan pengaduan WBS melalui kegiatan apel pagi, dan kegiatan sosialisasi secara daring kepada pegawai, sosialisasi melalui media cetak (spanduk, banner) dan media sosial/elektronik (twitter, website), serta melaksanakan movey secara bulanan.	1. Implementasi kebijakan pengaduan mengacu Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan KKP yaitu erlebitnya Tim Penanganan Pengaduan yang ditetapkan Pimpinan Eelon I yang memiliki tugas melakukan sosialisasi/publikasi kebijakan dan saluran Whistleblowing System; 2. Implementasi dapat disampaikan melalui laporan movey penanganan pengaduan yang memuat bukti pelaksanaan tugas Tim Penanganan Pengaduan; 3. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; 4. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Lap WBS Semester II di akhir bulan desember	
			b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	B	Penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala tahun 2023 s.d. 2024 (Semester I)	4.D. PENERAPAN WBS 2023 2024	B	0,50	Penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala tahun 2023 s.d. 2024 (Semester I)	1. Movey dilakukan atas penerapan WBS minimal dilakukan secara semester dan memuat substansi: a. upaya sosialisasi/publikasi kebijakan WBS termasuk sarana prasarana Kementerian (website web.kkp.go.id, email pengaduan@kkp.go.id, tatap muka: Inspektorat Jenderal); b. memantau/menilai pemahaman pegawai terkait WBS; c. permasalahan dan saran perbaikan atas hasil movey WBS; d. upaya tindak lanjut terhadap saran perbaikan pada laporan periode sebelumnya. 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika movey dilakukan berkala dan substansi lengkap sesuai poin 1, maka dinilai A b. Dinilai B jika : 1) Movey dilakukan berkala, namun substansi tidak lengkap; 2. Substansi dalam movey tidak lengkap, namun tidak ada bukti	Lap WBS Semester II di akhir bulan desember	

	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asaa serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku	A/B/C/D/E	A	PPS Cilacap menerapkan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dalam memberikan pelayanan. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, PPS Cilacap juga menerapkan ISO 45001:2015 tentang Manajemen Lingkungan.	1.a. Kebijakan Standar Pelayanan Daftar jenis pelayanan publik pada Unit Kerja 1. Memo Daftar Jenis Pelayanan Publik 2. STANDAR PELAYANAN 2024.pdf 1. Jenis Layanan PPS Cilacap.pdf Standar pelayanan unit kerja 2. Standar Pelayanan PPS24.pdf Laporan Kegiatan Forum Konsultasi Publik 3. Hasil Penelaahan SP (FPP) 3. LAPORAN FKPP PPS Cilacap 2023.pdf Sertifikasi ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu Pelayanan ISO 45001:2015 Sertifikasi ISO 14001:2015 tentang Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015	A	1.00	Selubungan kebijakan KKP terkait kewenangan peraturan Surat Keputusan (SK) bahwa di tingkat UPT untuk SK ditetapkan dalam bentuk Surat Tugas (ST) Pimpinan asder UPT. Telaah terdapat standar pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan sesuai Permen/PANRB Nomor 15/2014 : 1. Tahun 2021 dan 2022 terdapat 10 Standar Pelayanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala PPS Cilacap Nomor 39/PPSC/OT/31/10/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan Surat Keputusan Kepala PPS Cilacap Nomor 13/PPSC/OT/31/10/2022 yaitu Pelayanan Perenbitan STRILK Kelodangan Kapal, Pelayanan Perenbitan STRILK Kelengkapan Kapal, Pelayanan Perenbitan STRILK Rekomendasi Penggunaan Tanah dan atau Bangunan, Pelayanan Perenbitan Penggantian Tanah dan atau Bangunan, Pelayanan Perenbitan Alas Bant, Pelayanan Perenbitan Alas Bant, Pelayanan Tambat Labuh, Pelayanan Perenbitan Sertifikat Cita Pengawasan (Isan yang baik) SK-CYB, Pelayanan Perenbitan Sertifikat Kelakuan Kapal Perikanan, pelayanan floating repair kapal perikanan, perenbitan Perizinan Pengisian BBM dan atau subditi, pelayanan pengisian perizinan kerja laut, pelayanan e-logbook pengangkutan ikan, pelayanan pas masuk tarikan, pelayanan pas masuk tangkapan, pelayanan penangkapan barang, pelayanan penyewaan pada unit pendingin, pelayanan jasa listrik, pelayanan data dan informasi publik 3. Tahun 2024 ditetapkan Standar Pelayanan yang memuat 15 standar pelayanan, memuat diantaranya 9 layanan utama pada PPS Cilacap yaitu Pelayanan Perenbitan STRILK Kelodangan Kapal, Pelayanan Perenbitan Surat Perenbitan Berlayar (SPB), Pelayanan Perenbitan SHIT, Pelayanan Rekomendasi Penggunaan Tanah dan atau Bangunan, Pelayanan Perenbitan Penggantian Tanah dan atau Bangunan, pelayanan pengisian transporan, pelayanan tambat dan labuh, Pelayanan Sertifikat CYB, Pelayanan perenbitan Surat kalikan kapal perikanan, Pelayanan Floating repair.	1. Identifikasi jenis layanan berdasarkan Permen NK 15/2014 (atau sesuai dengan itu) pelayanan masing-masing dalam pelaksanaan oleh Saterki; 2. Penetapan standar pelayanan berdasarkan Permen/PANRB Nomor 15/2014 : a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) meliputi: 1) Penerimaan 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur 3) Jangkay waktu pelayanan 4) Biaya/larif 5) Produk pelayanan 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi a. 2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing) meliputi: 1) Dasar hukum 2) Sarana dan prasarana, dan atau fasilitas 3) Kompetensi pelaksana 4) Pengawasan internal 5) Jumlah pelaksana 6) Jumlah pelayanan 7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 8) Evaluasi kinerja pelaksana b. Proses penyampaian standar pelayanan melibatkan stakeholders (tidak masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memandatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat. c. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dinilai sebagai jika unit kerja telah memiliki >30% jenis pelayanan.
	b. Standar pelayanan telah dimaklumkan	a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan minimal di website	A/B/C/D	A	Standar pelayanan telah dimaklumkan untuk seluruh jenis layanan, pada Tahun 2023 sebanyak 20 pelayanan dan tahun 2024 sebanyak 15 pelayanan Maklumat pelayanan telah diuassan telah mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Standar pelayanan Tahun 2024 telah dimaklumkan melalui website, media sosial (twitter, facebook, instagram) dan digital banner yang ditempatkan di gedung PTSA, dalam bentuk buku yang terdapat di ruang tunggu pelayanan dan receptionist gedung pelayanan (PTSA) Maklumat pelayanan PTSA Tahun 2024 telah dipublikasi melalui website, dipasang pada gedung PTSA.	Tahun 2023 1. SP PPS24.pdf 2. Maklumat Pelayanan.pdf 3. publikasi Maklumat pelayanan 4. publikasi standar pelayanan media elektronik Tahun 2024 1. STANDAR PELAYANAN 2024.pdf 2. Publikasi Maklumat Pelayanan, SP, dan Jenis Layanan	A	1.00	Standar pelayanan telah dimaklumkan untuk seluruh jenis layanan, pada Tahun 2023 sebanyak 20 pelayanan dan tahun 2024 sebanyak 15 pelayanan Maklumat pelayanan telah diuassan telah mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Standar pelayanan Tahun 2024 telah dimaklumkan melalui website, media sosial (twitter, facebook, instagram) dan digital banner yang ditempatkan di gedung PTSA, dalam bentuk buku yang terdapat di ruang tunggu pelayanan dan receptionist gedung pelayanan (PTSA) Maklumat pelayanan PTSA Tahun 2024 telah dipublikasi melalui website, dipasang pada gedung PTSA. Catatan: Maklumat Pelayanan mengacu Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 memuat hal-hal yaitu: a. Penerimaan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan. b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. c. Pernyataan bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.	1. Identifikasi SP yang telah dimaklumkan; 2. Media yang digunakan untuk memuat SP dan Maklumat pelayanan adalah website dan media lainnya (media cetak, elektronik dan media sosial); 3. Penilaian: a. Jika standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya, maka dinilai A; b. Jika standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar (>50%) jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website, maka dinilai B; c. Jika standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil (<50%) jenis pelayanan dan belum dipublikasikan, maka dinilai C; d. Jika standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan, maka dinilai D.
	c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain: tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memandatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memandatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat								

		b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/ media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/ media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan publik belum tersedia	A/B/C/D	A	Informasi tentang pelayanan pada PPS Cilacap mudah diakses secara online melalui media sosial (website, instagram, facebook, twitter) dan melalui media offline melalui banner, papan pengumuman dan telah terhubung dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (https://sippn.menpan.go.id/)	Tahun 2023 1. Dokumentasi publikasi informasi pelayanan 2. Screenshoot web,wa group/twitter dll untuk media sosial 2023 Tahun 2024 1. Publikasi Jenis Layanan 2. Publikasi Standar Pelayanan	A	1,00	Informasi tentang pelayanan pada PPS Cilacap mudah diakses secara online melalui media sosial (website, instagram, facebook, twitter) dan melalui media offline melalui banner, papan pengumuman dan telah terhubung dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (https://sippn.menpan.go.id/)	1. Seluruh Informasi layanan (SK/ST Petugas Layanan, SP, Jenis layanan, Makhmat Pelayanan, SOP) pada unit kerja dapat diakses melalui berbagai media dan terhubung dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (dijui dalam website: sippn.menpan.go.id/); 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	TERPENUHI
		c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan secara rutin/berkelanjutan c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum	A/B/C/D	B	PPS Cilacap mempunyai sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi pemberi pelayanan sebagaimana diatur dalam mekanisme Pemberian Penghargaan, hukuman dan Kompensasi pada Pelaksanaan Pelayanan Publik Lingkup PPS Cilacap. Unsur penilaian pemberian penghargaan meliputi memiliki nilai dasar berakhlak, dan terdapat penilaian dari penerima layanan Mekanisme pemberian penghargaan, hukuman dan kompensasi pada Pelaksanaan Pelayanan Publik lingkup PPS Cilacap sudah mengatur penilaian dari arahan, sesama pelaksana pelayanan (rekan sejawat), dan penilaian dari pengguna layanan. Tahun 2023 dan 2024 telah terdapat implementasi pemberian penghargaan kepada petugas layanan secara semesteran dengan penilaian berdasarkan mekanisme yang ditetapkan	Tahun 2023 1. Kebijakan reward dan punishment 2. Bukti pemberian penghargaan dan sanksi petugas pelayanan layanan Tahun 2024 Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan PPSC 2024.pdf Mekanisme Reward n Punishment PPSC.pdf Reward Petugas Pelayanan Publik Semester I	B	0,67	PPS Cilacap mempunyai sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi pemberi pelayanan sebagaimana diatur dalam mekanisme Pemberian Penghargaan, hukuman dan Kompensasi pada Pelaksanaan Pelayanan Publik Lingkup PPS Cilacap. Unsur penilaian pemberian penghargaan meliputi memiliki nilai dasar berakhlak, dan terdapat penilaian dari penerima layanan Mekanisme pemberian penghargaan, hukuman dan kompensasi pada Pelaksanaan Pelayanan Publik lingkup PPS Cilacap sudah mengatur penilaian dari arahan, sesama pelaksana pelayanan (rekan sejawat), dan penilaian dari pengguna layanan. Tahun 2023 dan 2024 telah terdapat implementasi pemberian penghargaan kepada petugas layanan secara semesteran dengan penilaian berdasarkan mekanisme yang ditetapkan	1. Kode etik khusus petugas layanan yang memuat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi; 2. Mekanisme penilaian pemberian penghargaan dan sanksi kepada petugas layanan, memuat minimal: a. kriteria penilaian oleh pimpinan dan rekan sejawat meliputi: sikap dan perilaku, kedisiplinan, profesionalitas, kecepatan respon, kerja sama, tanggung jawab dan integritas, inovasi/ kreativitas (bermampuan dalam menguangkan ide) b. Hasil penilaian pengguna layanan; penampilan (pakaiannya, atribut dll sesuai ketentuan), tidak pernah mendapat complain , 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Penilaian reward kepada petugas pelayanan publik semester 2 sedang berlangsung di bulan Desember 2024
		d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C/D	A	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi pada penerima layanan jika layanan tidak sesuai standar pada seluruh layanan sebagaimana diatur dalam mekanisme Pemberian Penghargaan, hukuman dan Kompensasi pada Pelaksanaan Pelayanan Publik Lingkup PPS Cilacap. Kompensasi diberikan kepada penerima layanan jika terjadi keterlambatan pemberian layanan selama 1-15 menit, 15-30 menit, 30-60 menit, lebih dari 1 jam, dan keterlambatan dikarenakan hal-hal di luar kendali Selama tahun 2023 dan sampai dengan Juli 2024 belum pernah ada pengguna layanan yang menerima layanan tidak sesuai standar, sehingga belum ada pemberian kompensasi	Tahun 2023 Memo Kompensasi Pelayanan Semester I 2023.pdf Memo Kompensasi Pelayanan Semester II 2023.pdf Memorandum Mekanisme Reward, Punishment dan kompensasi penyelenggaraan Pelayanan 2023.pdf Tahun 2024 Mekanisme Reward n Punishment PPSC 2024.pdf Memo Kompensasi Pelayanan Semester I 2024.pdf	A	1,00	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi pada penerima jika layanan tidak sesuai standar pada seluruh layanan sebagaimana diatur dalam mekanisme Pemberian Penghargaan, hukuman dan Kompensasi pada Pelaksanaan Pelayanan Publik Lingkup PPS Cilacap. Selama tahun 2023 dan sampai dengan Juli 2024 belum pernah ada pengguna layanan yang menerima layanan tidak sesuai standar, sehingga belum ada pemberian kompensasi	1. Mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan untuk seluruh jenis layanan pada unit kerja, jika pemberian layanan tidak sesuai standar. Informasi terkait mekanisme kompensasi wajib dipublikasikan ke pengguna jasa; 2. Implementasi atas pemberian kompensasi selain dokumen bukti, dilengkapi juga dengan pernyataan puas/tidak puas dari pengguna jasa yang menerima kompensasi berupa dokumen tertulis/ foto/video, dll.; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar (≥ 50%) jenis layanan, maka dinilai B; b. Jika telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil (<50%) jenis layanan, maka dinilai C.	TERPENUHI
		e. Terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi	a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/ terintegrasi c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/ terintegrasi d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu/terintegrasi	A/B/C/D	A	Telah terdapat kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) pada PPS Cilacap yang ditetapkan dengan Kepmen KP Nomor 162 Tahun 2023 Seluruh layanan PPS Cilacap telah terpadu dalam PTSA dan telah terdapat SOP PTSA. Terdapat pengintegrasian layanan pada PTSA menggunakan aplikasi Si Antasena (Sistem Layanan Terpadu Satu Atap Terintegrasi) yang memuat fitur antrian, call center, progress tracking. Saat ini sedang dilakukan pengembangan untuk versi android, didalamnya nantinya akan mengintegrasikan seluruh layanan yang ada di PTSA (termasuk instansi lain yang telah bergabung dalam PTSA)	Tahun 2023 Dokumentasi dalam gedung pelayanan terpadu Gedung pelayanan terpadu baru.pdf SOP PTSA.pdf Tahun 2024 Gedung PTSA PPS Cilacap Publikasi dan Sosialisasi SIANTASENA SI ANTASENA KEMENKOP Petajapan UPTA UPT KKP.pdf SOP Layanan di PTSA.pdf SOP Pelayanan Terpadu Satu Atap.pdf	A	1,00	Telah terdapat kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) pada PPS Cilacap yang ditetapkan dengan Kepmen KP Nomor 162 Tahun 2023 Seluruh layanan PPS Cilacap telah terpadu dalam PTSA dan telah terdapat SOP PTSA. Terdapat pengintegrasian layanan pada PTSA menggunakan aplikasi Si Antasena (Sistem Layanan Terpadu Satu Atap Terintegrasi) yang memuat fitur antrian, call center, progress tracking. Saat ini sedang dilakukan pengembangan untuk versi android, didalamnya nantinya akan mengintegrasikan seluruh layanan yang ada di PTSA (termasuk instansi lain yang telah bergabung dalam PTSA)	1. Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengelolaan manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya; 2. Layanan terpadu/terintegrasi dapat berupa: a. Layanan satu atap atau b. Layanan satu pintu; c. Layanan terpadu dalam sistem/aplikasi 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika sebagian besar (≥50%) pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi; maka dinilai B; b. Jika sebagian kecil (<50%) pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi, maka dinilai C.	TERPENUHI
		f. Terdapat inovasi pelayanan	a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendapatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendapatkan pelayanan dengan masyarakat c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan dari inovasi yang sudah ada d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan terapan memiliki inovasi dalam terapan pemerintahan e. Jika unit kerja belum	A/B/C/D/E	B	Tahun 2021 Sarker memiliki inovasi berupa fasilitas kemudahan pembayaran untuk seluruh pelayanan di PPS Cilacap melalui penyediaan layanan bank dan atm bersama dan pembayaran non tunai melalui penyediaan Mesin Elektronik Data Capture (EDC) serta mobile banking. Inovasi lain untuk pembayaran adalah menghadirkan kantor pos dalam satu gedung PTSP untuk kemudahan pembayaran jasa tambah labat secara tunai. Inovasi pelayanan yang dibangun dan diimplementasikan tahun 2022 yaitu Sistem monitoring kapal ikan di PPS Cilacap (Srikandi PPSC) adalah aplikasi yang dibuat menggunakan fitur Addon (Appsheet) pada spreadsheet google yang dapat diakses baik melalui Smartphone maupun pc/notebook. Aplikasi ini dibuat untuk memonitor, mencatat, menyimpan serta mengolah data yang berkaitan dengan pencatatan aktivitas kapal pada Pelabuhan. Data dari aktivitas kapal digunakan sebagai validasi atas nilai PHBP yg harus dibayar oleh pengguna jasa. Aplikasi ini dimanfaatkan untuk mendukung aplikasi pelayanan yang dibuat oleh Pusat yaitu SLAJA dan TEMAN SPB. Tahun 2023 terdapat pengembangan Aplikasi Si Antasena (sistem layanan terpadu satu atap terintegrasi) merupakan aplikasi yang digunakan dalam PTSA yang memuat fitur antrian, call center, progress tracking. Dalam aplikasi antasena untuk memudahkan pelaku usaha melakukan aksi perijinan untuk kedatangan dan keberangkatan kapal, dan melakukan tracking proses pelayanan yang diajukan. Saat ini sedang dilakukan pengembangan untuk versi android, didalamnya nantinya akan mengintegrasikan seluruh layanan yang ada di PTSA (termasuk instansi lain yang telah bergabung dalam PTSA).	Tahun 2023 1. Materi aplikasi Srikandi PPSC.pdf 2. Aplikasi srikandi2.pdf 3. Memorandum Penerapan Aplikasi SRIKANDI.pdf Tahun 2024 Aplikasi srikandi2.pdf REPORT AFTER ANTASENA.pptx DAMPK IMPLEMENTASI APLIKASI SRIKANDI.pdf Materi aplikasi Srikandi PPSC.pdf Memorandum Penerapan Aplikasi SRIKANDI.pdf Notulen Rapat Pengembangan Antasena.pdf PROGRESS PENGIMBANGAN SI ANTASENA RIKAPITULASI PENGIMBANGAN SI ANTASENA NEW.pdf Summary.ppt Uraian Perbaikan Pelayanan Publik (DAMPK SRIKANDI).pdf	B	0,75	Tahun 2021 Sarker memiliki inovasi berupa fasilitas kemudahan pembayaran untuk seluruh pelayanan di PPS Cilacap melalui penyediaan layanan bank dan atm bersama dan pembayaran non tunai melalui penyediaan Mesin Elektronik Data Capture (EDC) serta mobile banking. Inovasi lain untuk pembayaran adalah menghadirkan kantor pos dalam satu gedung PTSP untuk kemudahan pembayaran jasa tambah labat secara tunai. Inovasi pelayanan yang dibangun dan diimplementasikan tahun 2022 yaitu Sistem monitoring kapal ikan di PPS Cilacap (Srikandi PPSC) adalah aplikasi yang dibuat menggunakan fitur Addon (Appsheet) pada spreadsheet google yang dapat diakses baik melalui Smartphone maupun pc/notebook. Aplikasi ini dibuat untuk memonitor, mencatat, menyimpan serta mengolah data yang berkaitan dengan pencatatan aktivitas kapal pada Pelabuhan. Data dari aktivitas kapal digunakan sebagai validasi atas nilai PHBP yg harus dibayar oleh pengguna jasa. Aplikasi ini dimanfaatkan untuk mendukung aplikasi pelayanan yang dibuat oleh Pusat yaitu SLAJA dan TEMAN SPB. Tahun 2023 terdapat pengembangan Aplikasi Si Antasena (sistem layanan terpadu satu atap terintegrasi) merupakan aplikasi yang digunakan dalam PTSA yang memuat fitur antrian, call center, progress tracking. Dalam aplikasi antasena untuk memudahkan pelaku usaha melakukan aksi perijinan untuk kedatangan dan keberangkatan kapal, dan melakukan tracking proses pelayanan yang diajukan. Saat ini sedang dilakukan pengembangan untuk versi android, didalamnya nantinya akan mengintegrasikan seluruh layanan yang ada di PTSA (termasuk instansi lain yang telah bergabung dalam PTSA). Pada Tahun 2023 aplikasi Srikandi juga dilakukan pengembangan sehingga terintegrasi dengan SLAJA dan SIMPONI Dampaknya memudahkan dalam melakukan monitoring dan penyajian	1. Inovasi sebagai inisiatif terobosan dari unit kerja dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik; 2. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty), dapat berbentuk replikasi yang dilakukan dengan proses yang mudah yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM); 3. Salah satu kriteria pelayanan publik yang inovatif jika memberikan hasil dan manfaat, serta 'dakar' dengan masyarakat; 4. Yang dimaksud unit kerja lain dapat berasal dari Unit Eselon 1 yang sama; dan 5. Penilaian mengacu kriteria jawaban. 6. Dampak inovasi yang mempermudah pelayanan publik telah diformasikan kepada masyarakat Catatan: 1. Bagi unit kerja yang karakteristik pengguna jasanya tidak kondusif untuk layanan berbasis TI/gaya teknologi atau remote area blank spot maka transformasi digital diperbolehkan dalam bentuk selain aplikasi (non TI), contohnya layanan jemput bola dengan mobil pelayanan yg standby di wilayah pengguna jasa keliling. 2. Ketika layanan telah menggunakan aplikasi terpadu, inovasi dapat berupa kegiatan penunjang layanan utama.	TERPENUHI (belum bisa A karena inovasi belum direplikasi oleh unit kerja lain)
		III. Pengelolaan Pengaduan	1,00						0,83	83,33%		

			a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!	a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara	A/B/C/D/E	A	PPSC Cilacap mempunyai media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor 1. Telah terdapat Tim Penanganan Pengaduan (TPP) yang sudah ditetapkan bertugas melayani konsultasi dan penanganan pengaduan dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR yang ditetapkan dengan Kep Dirjen No 6 Tahun 2023 dan Kep Dirjen Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan D.IPT dan UPT lingkup DJPPT. 2. Terdapat Media konsultasi dan pengaduan secara offline meliputi ruang pengaduan dan konsultasi serta kotak pengaduan, dan secara online melalui lapor, email, wa, telepon dan fax 4. Terdapat alur proses pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!	Tahun 2023 1. Sarana pengaduan Offline 2. Sarana pengaduan online ALUR PROSES PENGADUAN MASYARAKAT.pdf Matriks Pengaduan termasuk Informasi.pdf SK TIM PENANGANAN PENGADUAN ST Tim Dumas dan WIS.pdf Tahun 2024 1. Sarana Pengaduan Offline 2. Sarana Pengaduan Online ALUR PROSES PENGADUAN MASYARAKAT.pdf Screenshot Aplikasi LAPORI di web PPS Cilacap.JPG SK DJPT NO 17 Tahun 2024 Tim TPP DJPPT.pdf	A	1,00	1. Terdapat sarana konsultasi dan pengaduan secara offline dan online yang telah terintegrasi dengan SP4N-LAPORI; 2. Tim Penanganan Pengaduan (TPP) yang sudah ditetapkan bertugas melayani konsultasi dan penanganan pengaduan; 3. Dalam hal unit kerja memiliki saluran pengaduan tersendiri di luar yang ditetapkan Kementerian, maka harus melapor pada TPP Kementerian dan seluruh adanya (pengaduan, permintaan informasi, aspirasi, dan konsultasi) dari berbagai saluran wajib diinput dalam aplikasi LAPORI oleh Tim Penanganan Pengaduan. Contoh: jika pengaduan disampaikan melalui nomor Whatsapp pribadi, harus disampaikan ke TPP untuk diinput ke LAPORI; 4. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	TERPENUHI			
			b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	a. Terdapat unit pengaduan untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPORI di level unit kerja b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPORI di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPORI di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada c. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPORI di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPORI di level	A/B/C	A	1. Telah terdapat Tim Penanganan Pengaduan (TPP) yang sudah ditetapkan bertugas melayani konsultasi dan penanganan pengaduan yang telah terintegrasi dengan SP4N-LAPORI yang ditetapkan oleh DJPPT yaitu KepDirjen No 6 Tahun 2023 dan Kep Dirjen Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan DJPT dan UPT lingkup DJPPT Dalam SK tersebut terdapat penunjukan sebagai admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan pada PPS Cilacap yaitu Suci Monica dengan salah satu tugasnya adalah menerima dan menginput pengaduan dengan menggunakan aplikasi SP4N-Lapor	Tahun 2023 ALUR PROSES PENGADUAN MASYARAKAT.pdf Matriks Pengaduan termasuk Informasi.pdf ST Sekretariat Pengaduan.pdf Tahun 2024 ALUR PROSES PENGADUAN 2024.pdf SK DJPT NO 17 Tahun 2024 Tim TPP DJPPT.1.pdf ST Tim Penangan Pengaduan PPSC.pdf	A	1,00	1. Tim Penanganan Pengaduan (TPP) yang sudah ditetapkan bertugas melayani konsultasi dan penanganan pengaduan; 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	TERPENUHI			
			c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	a. Emluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala b. Emluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi.	A/B/C	B	PPS Cilacap telah melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi secara berkala setiap semester laporan move telah memuat substansi. Secara substansi move pada Laporan Bab III dan IV belum lengkap berisi move terhadap hasil pengaduan dan SKM yang menangani pengaduan/Tim Penanganan Pengaduan (opas dari tahun sebelumnya).	Matriks penanganan pengaduan Tahun 2023 Laporan Pengaduan Tahun 2024	B	0,50	1. Move penanganan keluhan/masukan dan konsultasi masyarakat dilakukan oleh TPP unit kerja; 2. Move berisi substansi minimal hasil penanganan keluhan/masukan, konsultasi, dan rekomendasi dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik. Jika dalam kurciorer SKM memuat saran masukan dari pengguna jasa, dapat menjadi bahan move oleh TPP. 3. Laporan move penanganan pengaduan masyarakat (keluhan/masukan, aspirasi, permintaan informasi dan konsultasi) dinilai berkala jika disusun minimal setiap semester, dilengkapi dengan saran perbaikan dan tindak lanjut, kecuali bila seluruh substansi sudah dibahas dalam move namun tidak ditemukan permasalahan; 4. Laporan move penanganan pengaduan masyarakat (keluhan/masukan, aspirasi, permintaan informasi dan konsultasi) tetap disusun meskipun tidak terdapat pengaduan; 5. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	TERPENUHI			
			iv. Penilaian Kepuasan terhadap Pelay 1,00				PPS cilacap telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara triwulanan (4 kali dalam setahun)	4.a Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		1,00	100,00%	PPS cilacap telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara triwulanan (4 kali dalam setahun)		1. Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan RB 14/2017 dan SE Menpan RB Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Di Lingkup Instansi Pemerintah yaitu : a. dilaksanakan secara berkala; b. substansi SKM minimal 9 unsur meliputi : 1) persyaratan 2) sistem, mekanisme, prosedur 3) waktu penyelesaian 4) biaya/larif 5) produk spesifikasi jenis layanan 6) kompetensi pelaksana/SDM 7) perilaku pelaksana/SDM 8) penanganan pengaduan, saran dan masukan 9) sarana dan prasarana 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	TERPENUHI
			a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A/B/C/D/E	A		4.a Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka melalui website, media sosial (instagram, facebook, twitter) dan papan pengumuman Laporan SKM telah dipublikasi melalui website Publikasi SKM triwulan 1 Tahun 2024 meliputi indeks kepuasan masyarakat, periode pelaksanaan SKM, nilai per unsur, rencana tindak lanjut dan realisasi rencana tindak lanjut yang telah dilaksanakan	4.b Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	A	1,00	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka melalui website, media sosial (instagram, facebook, twitter) dan papan pengumuman Laporan SKM telah dipublikasi melalui website Publikasi SKM triwulan 1 Tahun 2024 meliputi indeks kepuasan masyarakat, periode pelaksanaan SKM, nilai per unsur, rencana tindak lanjut dan realisasi rencana tindak lanjut yang telah dilaksanakan		1. Publikasi Hasil Pelaksanaan SKM Publikasi hasil pelaksanaan SKM paling tidak memuat : a. Indeks Kepuasan Masyarakat b. Periode Pelaksanaan c. Nilai per Unsur d. Rencana Tindak lanjut Publikasi hasil SKM dapat berupa unggahan Laporan SKM pada media elektronik yang dimiliki 2. Publikasi Realisasi Rencana Tindak Lanjut yang telah dilakukan Publikasi dalam bentuk dokumentasi/laporan kegiatan (untuk transparansi tindak lanjut hasil SKM) 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban	TERPENUHI
			b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi	A/B/C	A		4.c Tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat		A	1,00	Seluruh hasil Survei Kepuasan Masyarakat telah ditindaklanjuti dan dilengkapi bukti tindak lanjutnya		1. Saran/rekomendasi dalam laporan SKM memuat masukan perbaikan secara konkrit pada masing-masing komponen yang menunjukkan kelemahan. Rekomendasi perbaikan harus relevan dengan permasalahan dalam hasil SKM; 2. Seluruh rekomendasi wajib ditindaklanjuti; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar (>50%) hasil survei kepuasan masyarakat, maka dinilai C; b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil (<50%) hasil survei kepuasan masyarakat, maka dinilai D. Catatan: Jika rekomendasi perbaikan membutuhkan anggaran dan waktu penyelesaian, maka tidak perlu dibuang sebagai rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pada periode tersebut.	TERPENUHI
			c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A/B/C/D	A				A	1,00				
			v. Pemanfaatan Teknologi Informati 1,00							1,00	100,00%				

RT

PERHITUNGAN IKU 2024

IKU TW IV

OKTOBER 2023 - SEPTEMBER 2024

JML REKOM	TL REKOM	%
640	561	87.66%

					241	640	537,719,139	198	561	404,550,918	43	79	133,168,221		
No	Pengawasan	Satker	Nomor LHP	Laporan Hasil Pengawasan	Sebelum Tindak Lanjut			Tindak Lanjut			Setelah Tindak Lanjut			Ket	
					Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
OKTOBER 2023															
1	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	R.233/ITJ.2/HP.380/X/2023	Reviu atas Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT)	3	4	-	3	4	-	-	-	-	TUNTAS	
2	Evaluasi	SEKRETARIAT DJPT	R.235/ITJ.2/HP.460/X/2023	Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	6	-	-	1	-	1	5	-	PROSES	
3	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	R.236/ITJ.2/HP.320/X/2023	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) pada Ditjen Perikanan Tangkap Triwulan III TA 2023	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS	
4	Evaluasi	DIT KAPI	R.240/ITJ.2/HP.470/X/2023	Evaluasi atas Pelaksanaan Bantuan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2023 pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS	
5	Evaluasi	PPN TUAL	R.246/ITJ.2/HP.430/X/2023	Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Tahun 2023	1	7	-	1	7	-	-	-	-	TUNTAS	
6	Audit	PPN TUAL	R.248/ITJ.2/HP.130/X/2023	Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual Provinsi Maluku TA 2023	3	21	2,577,000	3	21	2,577,000	-	-	-	TUNTAS	
7	Pemantauan	SEKRETARIAT DJPT	R.248/ITJ.2/HP.130/X/2023	Pemantauan Implementasi Program Peningkatan Penggunaan	2	3	-	2	3	-	-	-	-	TUNTAS	
8	Audit	PPS KENDARI	R.279/ITJ.2/HP.130/X/2023	Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara	11	43	139,907,100	11	43	139,907,100	-	-	-	TUNTAS	
9	Evaluasi	DIT KAPI	R.280/ITJ.2/HP.470/X/2023	Evaluasi Pengadaan Bantuan Mesin Kapal Perikanan TA 2023	2	8	-	2	8	-	-	-	-	TUNTAS	
NOVEMBER 2023															
1	Pemantauan	DIT PDK	R.286/ITJ.2/HP.550/XI/2023	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kampung Nelayan Maju TA 2023 di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS	
2	Audit	DIT PP	R.296/ITJ.2/HP.130/XI/2023	Probity Audit atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Ukurlaran SKPT Saumlaki Provinsi Maluku	3	5	-	3	5	-	-	-	-	TUNTAS	
DESEMBER 2023															
1	Pemantauan	DIT PDK	R.307/ITJ.2/HP.550/XII/2023	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kampung Nelayan Maju TA 2023 di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS	
2	Pemantauan	DIT PDK	R.308/ITJ.2/HP.550/XII/2023	Pemantauan Pelaksanaan Penataan Kampung Nelayan Maju TA 2023 di Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS	
3	Pemantauan	DIT PDK	R.312/ITJ.2/HP.550/XII/2023	Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Kampung Nelayan Maju TA 2023 di Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS	
4	Audit	DIT PDK	R.321/ITJ.2/HP.130/XII/2023	Audit Pelaksanaan Pembangunan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) Ditjen Perikanan Tangkap TA 2023	2	2	-	2	2	-	-	-	-	TUNTAS	
5	Audit	DIT PP	R.323/ITJ.2/HP.130/XII/2023	Probity Audit Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana SKPT Morotai, Provinsi Maluku Utara	2	8	-	2	8	-	-	-	-	TUNTAS	
6	Evaluasi	DIT PSDI	R.332/ITJ.2/HP.470/XII/2023	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Hibah GEF 6 TA 2020 s.d. 2023 pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) Ditjen Perikanan Tangkap	13	53	115,153,591	8	46	92,502,192	5	7	22,651,399	PROSES	
7	Evaluasi	SEKRETARIAT DJPT	R.329/ITJ.2/HP.470/XI/2023	Evaluasi Penyusunan Manajemen Risiko (MR) Tahun 2023 Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1	3	-	1	3	-	-	-	-	TUNTAS	
8	Evaluasi	DIT PDK	R.338/ITJ.2/HP.470/XII/2023	Evaluasi Kegiatan Pengembangan Korporasi Nelayan pada Ditjen Perikanan Tangkap TA 2023	3	11	16,263,500	3	11	16,263,500	-	-	-	TUNTAS	
9	Audit	DINAS KP PROV. JAWA TENGAH	R.340/ITJ.2/HP.130/XII/2023	Probity Audit Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah TA 2023	1	3	-	1	3	-	-	-	-	TUNTAS	
10	Evaluasi	SEKRETARIAT DJPT	R.348/ITJ.2/HP.470/XII/2023	Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Tahun 2023	6	40	33,344,640	2	30	-	4	10	33,344,640	PROSES	
11	Audit	DINAS KP PROV. SULAWESI UTARA	R.352/ITJ.2/HP.130/XII/2023	Probity Audit Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023 pada Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara	2	2	-	2	2	-	-	-	-	TUNTAS	
JANUARI 2024															
1	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	R.9/ITJ.2/HP.380/II/2024	Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) TA 2023 Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	5	5	-	5	5	-	-	-	-	TUNTAS	
2	Pemantauan	DIT PDK	R.2/ITJ.2/HP.660/II/2024	Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Kampung Nelayan Maju TA 2023 di Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	4	4	-	4	4	-	-	-	-	TUNTAS	

3	Reviu	DIT PP	R.3/ITJ.2/HP.380/I/2024	Hasil Reviu Dokumen Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pekerjaan Pengawasan Proteksi Tiang Pancang Dermaga Tambahan PPI Fandoi Kabupaten Biak Numfor.	1	4	-	1	4	-	-	-	-	TUNTAS
4	Reviu	DKP PROV. MALUKU UTARA	R.18/ITJ.2/HP.380/I/2024	Hasil Reviu atas Usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan Pemusnahan pada Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Dinas KP Provinsi Maluku Utara	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
5	Reviu	PPP TELUK BATANG	R.23/ITJ.2/HP.380/I/2024	Hasil Reviu Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid (DED) PPP Teluk Batang TA 2024	3	3	-	3	3	-	-	-	-	TUNTAS
6	Reviu	PPN KWANDANG	R.28/ITJ.2/HP.380/I/2024	Hasil Reviu Rencana Pembangunan Fasilitas Pelabuhan pada PPN Kwandang TA 2024 di Prov. DKI Jakarta	1	3	-	1	3	-	-	-	-	TUNTAS
7	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	R.31/ITJ.2/HP.380/II/2024	Hasil Reviu Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan Pemusnahan pada PPS Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara	2	4	-	2	4	-	-	-	-	TUNTAS
8	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	R.36/ITJ.2/HP.380/II/2024	Hasil Reviu atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan /Rehabilitasi Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Lampulo Provinsi Aceh	1	5	-	-	-	-	1	5	-	PENDING
FEBRUARI 2024														
1	Reviu	DKP Prov. Aceh	R.35/ITJ.2/HP.380/II/2024	Hasil Reviu atas Usulan Penghapusan BMN pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh	1	1	-	-	-	-	1	1	-	PROSES
2	Reviu	PPS NIZAM ZACHMAN	R.47/ITJ.2/HP.380/II/2024	Reviu Hasil Rekonsiliasi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima kepada Pemilik Pengurus Nakhoda Kapal pada PPS Nizam Zachman	1	4	-	1	4	-	-	-	-	TUNTAS
3	Reviu	PPN PRIGI	R.46/ITJ.2/HP.380/II/2024	Hasil Reviu atas Dokumen Addendum Perjanjian Pemanfaatan Tanah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi oleh PT Dayamitra Telekomunikasi	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
4	Reviu	PPN BRONDONG	R.52/ITJ.2/HP.380/III/2024	Hasil Reviu Hasil Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Outlet Pengepakan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Provinsi Jawa Timur di Prov. DKI Jakarta	5	5	-	5	5	-	-	-	-	TUNTAS
5	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	R.116/ITJ.2/HP.380/II/2024	Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023	1	5	-	1	5	-	-	-	-	TUNTAS
MARET 2024														
1	Reviu	PPN PRIGI	R.54/ITJ.2/HP.380/III/2024	Reviu Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Gudang Keranjang/Trays, Peningkatan Pagar Kawasan, dan Pembangunan Rambu Suar/Navigasi TA 2024 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi di Prov. DKI Jakarta	2	3	-	2	3	-	-	-	-	TUNTAS
2	Pemantauan	PPN TERNATE	R.57/ITJ.2/HP.550/III/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada PPN Ternate	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
3	Reviu	DIT PP	R.62/ITJ.2/HP.380/III/2024	Hasil Reviu Permohonan Pembayaran Termin Keenam (Tahap Pendampingan Tender) Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa -	1	4	-	1	4	-	-	-	-	TUNTAS
4	Evaluasi	PPS BUNGUS	R.63/ITJ.2/HP.470/III/2024	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada PPS Bungus Tahun 2024	2	2	-	2	2	-	-	-	-	TUNTAS
5	Reviu	DIT PDK	R.91/ITJ.2/HP.380/III/2024	Reviu Dokumen Perencanaan Paket Pekerjaan Pembangunan/Penataan Kampung Nelayan Modern Desa Warloka Pesisir Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT	2	4	-	2	4	-	-	-	-	TUNTAS
6	Reviu	PPN TERNATE	R.94/ITJ.2/HP.380/III/2024	Reviu atas Hasil Pekerjaan Konsultan Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi TPI Higienis (Pos Pemantauan Kesyahbandaran) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate	2	3	-	2	3	-	-	-	-	TUNTAS
7	Reviu	PPN KARANGANTU	R.99/ITJ.2/HP.380/III/2024	Reviu Hasil Perencanaan Pekerjaan Paket Rehab Gedung Perkantoran pada PPN Karangantu	2	3	-	2	3	-	-	-	-	TUNTAS
8	Audit	PPS BUNGUS	R.102/ITJ.2/HP.130/III/2024	Hasil Audit Kinerja pada PPS Bungus TA 2023/2024	7	20	-	7	20	-	-	-	-	TUNTAS
9	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	R.142/ITJ/HP.380/III/2024	Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ Triwulan I TA 2024 pada Ditjen Perikanan Tangkap	1	7	-	1	7	-	-	-	-	TUNTAS
APRIL 2024														
1	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	97/ITJ.2/HP.380/IV/2024	Hasil Reviu Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual Provinsi Maluku	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
2	Pemantauan	PPN KWANDANG	R.114/ITJ.2/HP.550/IV/2024	Laporan Hasil Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada PPN Kwandang Provinsi Gorontalo	1	3	-	1	3	-	-	-	-	TUNTAS
MEI 2024														
1	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	98/ITJ.2/HP.380/V/2024	Hasil Reviu Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	3	-	1	3	-	-	-	-	TUNTAS

2	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	101/ITJ.2/HP.380/V/2024	Laporan Hasil Reviu Atas Usulan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan Cara Pemusnahan pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, di Provinsi DKI Jakarta	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
3	Reviu	PPN PENGAMBENGAN	106/ITJ.2/HP.380/V/2024	Hasil Reviu Pekerjaan Konstruksi Rehab Trestel Dermaga pada PP Teluk Awang	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
4	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	107/ITJ.2/HP.380/V/2024	Hasil Reviu Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus Provinsi Sumatera Barat	2	3	-	2	3	-	-	-	-	TUNTAS
5	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	108/ITJ.2/HP.380/V/2024	Hasil Reviu Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat Provinsi Kalimantan Barat	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
6	Evaluasi	PPN PEKALONGAN	110/ITJ.2/HP.470/V/2024	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
7	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	114/ITJ.2/HP.380/V/2024	Hasil Reviu Penghapusan BMN Berupa Bangunan Tugu pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanen Provinsi Jawa Barat	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
8	Pemantauan	SEKRETARIAT DJPT	119/ITJ.2/HP.550/V/2024	Hasil Pemantauan Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Triwulan I Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Perikanan Tangkap	2	3	-	-	-	-	2	3	-	PENDING
9	Evaluasi	DIT PP	120/ITJ.2/HP.470/V/2024	Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Ukurlaran Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki, Provinsi Maluku	2	3	-	2	3	-	-	-	-	TUNTAS
10	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	123/ITJ.2/HP.380/V/2024	Hasil Reviu Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat	4	7	-	4	7	-	-	-	-	TUNTAS
11	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	124/ITJ.2/HP.380/V/2024	Hasil Reviu Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
12	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	127/ITJ.2/HP.380/V/2024	Hasil Reviu atas Usulan Permohonan Penghapusan BMN dengan Cara Pemusnahan pada Satker PPN Kwandang	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
13	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	128/ITJ.2/HP.380/V/2024	Hasil Reviu atas Usulan Permohonan Penghapusan BMN dengan cara Penjualan pada Satker PPN Pekalongan	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
14	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	134/ITJ.2/HP.380/V/2024	Hasil Reviu Atas Usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Dengan Cara Pemusnahan pada Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
15	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	153/ITJ.2/HP.380/V/2024	Hasil Reviu Atas Usulan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Cara Pemusnahan Pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanen Provinsi Jawa Barat	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
16	Audit	PPS BELAWAN	R.146/ITJ.2/HP.130/V/2024	Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan TA 2023-2024	5	15	-	2	11	-	3	4	-	PROSES
17	Audit	BBPI SEMARANG	R.147/ITJ.2/HP.130/V/2024	Hasil Audit Kinerja pada BBPI Semarang TA. 2023-2024	5	15	-	4	14	-	1	1	-	PROSES
18	Evaluasi	PPN PEMANGKAT	R.154/ITJ.2/HP.470/V/2024	Hasil Evaluasi Pengelolaan PNPB di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat Provinsi Kalimantan Barat	9	19	17,971,209	9	19	17,971,209	-	-	-	TUNTAS
JUNI 2024														
1	Audit	PPN PEKALONGAN	R.153/ITJ.2/HP.130/VI/2024	Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan Tahun Anggaran 2023-2024	8	14	52,230,955	7	13	4,068,315	1	1	48,162,640	PROSES
2	Audit	PPN PENGAMBENGAN	R.166/ITJ.2/HP.130/VI/2024	Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023-2024	6	17	49,362,854	3	11	34,723,312	3	6	14,639,542	PROSES
3	Reviu	PPS BELAWAN	R.169/ITJ.2/HP.380/VI/2024	Hasil Reviu atas Aset Tidak Ditemukan Keberadaannya pada Satker Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan	1	5	-	1	5	-	-	-	-	TUNTAS
4	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	R.177/ITJ.2/HP.380/VI/2024	Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Triwulan II TA 2024	1	7	-	1	7	-	-	-	-	TUNTAS
5	Reviu	PPN SUNGAILIAT	157/ITJ.2/HP.380/VI/2024	Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Talud Penahan Pantai pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat Tahun Anggaran (TA) 2024	2	3	-	2	3	-	-	-	-	TUNTAS
6	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	163/ITJ.2/HP.380/VI/2024	Hasil Reviu Atas Usulan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Cara Pemusnahan Pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
7	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	164/ITJ.2/HP.380/VI/2024	Hasil Reviu Atas Usulan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Cara Pemusnahan pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon.	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
8	Reviu	DIT PDK	169/ITJ.2/HP.380/VI/2024	Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Desa Soure Jaya Provinsi Sulawesi Tenggara, Desa Kuala Raja Provinsi Aceh dan Desa Warloka Provinsi NTT pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	1	7	-	-	6	-	1	1	-	PROSES

9	Evaluasi	DIT PP	190/ITJ.2/HP.470/VI/2024	Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Daero Majiko Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu	3	4	-	3	4	-	-	-	-	TUNTAS
JULI 2024														
1	Pemantauan	PPS BUNGUS	R.181/ITJ.2/HP.550/VII/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada PPS Bungus	1	3	-	-	-	-	1	3	-	PENDING
2	Evaluasi	PPN KARANGANTU	R.191/ITJ.2/HP.470/VII/2024	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada PPN Karangantu	1	5	-	1	5	-	-	-	-	TUNTAS
3	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	R.193/ITJ.2/HP.380/VII/2024	Hasil Reviu Penghapusan BMN dengan Cara Pemusnahan pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
4	Audit	PPN KARANGANTU	R.200/ITJ.2/HP.130/VII/2024	Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu TA 2023-2024	8	19	987,409	8	19	987,409	-	-	-	TUNTAS
5	Reviu	DIT KAPI	R.201/ITJ.2/HP.380/VII/2024	Hasil Reviu Dokumen Persiapan Tender Pekerjaan Perbaikan Kapal Perikanan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	1	4	-	1	4	-	-	-	-	TUNTAS
Agustus 2024														
1	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	R.206/ITJ.2/HP.380/VIII/2024	Hasil Reviu atas Usulan Penghapusan BMN Karena Sebab Lain pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari	1	2	-	-	-	-	1	2	-	PENDING
2	Audit	PPN PRIGI	R.219/ITJ.2/HP.130/VIII/2024	Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023-2024	7	18	13,474,330	7	18	13,474,330	-	-	-	TUNTAS
3	Evaluasi	PPN SIBOLGA	R.220/ITJ.2/HP.470/VIII/2024	Hasil Evaluasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023-2024	6	14	2,118,000	5	13	2,118,000	1	1	-	PROSES
4	Evaluasi	PPN SIBOLGA	R.221/ITJ.2/HP.430/VIII/2024	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga Tahun 2024	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
5	Evaluasi	DIT KAPI	R.223/ITJ.2/HP.430/VIII/2024	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI)	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
6	Reviu	Dit PDK	R.225/ITJ.2/HP.550/VIII/2024	Hasil Pemantauan Kegiatan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) di Kabupaten Bitlar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Maros dan Pendampingan Kalaju Kabupaten Kebumen	1	5	-	1	5	-	-	-	-	TUNTAS
7	Audit	PPS BITUNG	R.232/ITJ.2/HP.130/VIII/2024	Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023-2024	11	29	40,117,563	4	18	25,747,563	7	11	14,370,000	PROSES
8	Evaluasi	PPN SUNGAILIAT	R.240/ITJ.2/HP.430/VIII/2024	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada PPN Sungailiat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	1	6	-	1	6	-	-	-	-	TUNTAS
9	Evaluasi	SEKRETARIAT DJPT	R.250/ITJ/HP.440/VIII/2023	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap	1	1	-	-	-	-	1	1	-	PROSES
10	Reviu	DIT PSDI	R.252/ITJ/HP.470/VIII/2023	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	1	2	-	-	-	-	1	2	-	PENDING
September 2024														
1	Evaluasi	PPN SUNGAILIAT	R.258/ITJ.2/HP.470/IX/2024	Hasil Evaluasi Pengelolaan PNBP TA 2023 - 2024 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung	4	23	15,697,692	2	18	15,697,692	2	5	-	PROSES
2	Evaluasi	PPN PALABUHANRATU	R.259/ITJ.2/HP.470/VIII/2024	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Provinsi Jawa Barat	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
3	Evaluasi	PPN PALABUHANRATU	R.260/ITJ.2/HP.470/VIII/2024	Hasil Evaluasi Pengelolaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu Provinsi Jawa Barat	6	21	38,513,296	6	21	38,513,296	-	-	-	TUNTAS
4	Evaluasi	DIT PP	R.241/ITJ/HP.470/IX/2024	Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Tiakur Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Provinsi Maluku	3	3	-	3	3	-	-	-	-	TUNTAS
5	Audit	DIT KAPI	R.261/ITJ.2/HP.130/IX/2024	Hasil Probit Audit Perencanaan Pengadaan Bantuan Kapal Perikanan Berukuran Kurang dari 5 GT Tahun Anggaran 2024 Pada Direktorat KAPI	2	2	-	2	2	-	-	-	-	TUNTAS
6	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	R.270/ITJ.2/HP.380/IX/2024	Hasil Reviu Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi/Penjaminan Kualitas pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024	1	4	-	-	2	-	1	2	-	PROSES
7	Evaluasi	PPN TANJUNGPANDAN	R.271/ITJ.2/HP.430/IX/2024	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjungpandan	1	1	-	-	-	-	1	1	-	PENDING
8	Evaluasi	SEKRETARIAT DJPT	R.278/ITJ.2/HP.470/IX/2024	Hasil Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT)	4	7	-	-	-	-	4	7	-	PENDING
9	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	R.302/ITJ.2/HP.380/IX/2024	Hasil Reviu Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Eks.Dana Bergulir Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 6/ITJ.0/TU.140/I/2025

Yth : 1. Para Sekretaris Ditjen/Badan lingkup KKP
2. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP
Hal : Capaian IKU "Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP Tahun 2024"
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 3 Januari 2025

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP Tahun 2024, bersama ini disampaikan capaian IKU "Tingkat Kepatuhan PBJ Lingkup KKP Tahun 2024", dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Itjen pada masing-masing unit eselon I lingkup KKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon I
 - b. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
 - c. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE
 - d. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan
 - e. Laporan Penyelenggaraan PBJ
 - f. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024
2. Berdasarkan hasil evaluasi Itjen, Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup KKP mencapai nilai rata-rata sebesar 86,59% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%. Adapun rincian capaian Tingkat Kepatuhan PBJ dari masing-masing unit eselon I disampaikan pada lampiran.
3. Terkait pencapaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya, antara lain:
 - a. Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
 - b. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa paling lambat pada Triwulan I tahun berjalan;

- c. Menyiapkan dokumen tender (KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak) pengadaan barang dan jasa dengan kontrak/Surat Perjanjian sejak periode akhir tahun anggaran sebelumnya (T-1) sehingga paket pengadaan barang dan jasa dapat segera dikontrakkan pada kesempatan pertama;
- d. Menyelesaikan kontrak/surat perjanjian PBJ tepat waktu;
- e. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan pengadaan barang/jasa

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ivy Silfia Irani

Tembusan:
Inspektur Jenderal

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 6/ITJ.0/TU.140/I/2025
 Tanggal: 3 Januari 2025

**Hasil Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP
 Tahun 2024**

No	Unit Eselon I Mitra	Nilai Subindikator (%)						Nilai Kepatuhan PBJ (%)
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4 ⁴⁾	5 ⁵⁾	6 ⁶⁾	
1	Setjen	10,00	11,65	10,00	37,46	5,00	15,00	89,11
2	DJPKRL	8,35	15,00	10,00	35,66	3,75	15,00	87,76
3	DJPT	10,00	15,00	10,00	41,29	5,00	15,00	96,29
4	DJPSPDKP	10,00	10,40	10,00	34,65	5,00	15,00	85,05
5	DJPB	6,67	15,00	10,00	31,84	3,75	15,00	82,24
6	BPPSDMKP	10,00	13,35	10,00	30,94	5,00	15,00	84,29
7	DJPDPSPKP	10,00	13,35	10,00	31,84	5,00	15,00	85,19
8	BPPMHKP	10,00	13,75	10,00	31,84	3,75	15,00	84,34
9	Itjen	10,00	15,00	10,00	45,00	5,00	0,00	85,00

Keterangan:

- 1) = Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon I
- 2) = Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
- 3) = Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE
- 4) = Kesesuaian Tahap Pelaksanaan
- 5) = Laporan Penyelenggaran PBJ
- 6) = Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 7/ITJ.0/TU.140/I/2025

Yth : 1. Sekretaris Ditjen/Badan lingkup KKP
2. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Capaian IKU "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2024"
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 3 Januari 2025

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP Tahun 2024, bersama ini disampaikan capaian IKU "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2024", dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Itjen pada masing-masing unit eselon I lingkup KKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN);
 - b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST;
 - c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
 - d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
 - e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.
2. Berdasarkan hasil evaluasi Itjen, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup KKP mencapai nilai rata-rata sebesar 93,78%. Adapun rincian capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dari masing-masing unit eselon I disampaikan pada lampiran.
3. Terkait pencapaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya, antara lain:
 - a. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;

- b. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- c. Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- d. Penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- e. Tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- f. Penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu pada Unit Eselon I lingkup KKP.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ivy Silfia Irani

Tembusan:
Inspektur Jenderal

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 7/ITJ.0/TU.140/I/2025
 Tanggal: 3 Januari 2025

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2024

No	Unit Eselon I	Target	Nilai Kepatuhan Pengelolaan BMN
1	Sekretariat Jenderal	82,50	94,00
2	Ditjen PKRL	80,00	100,00
3	Ditjen Perikanan Tangkap	80,00	90,00
4	Ditjen PSDKP	80,00	100,00
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	80,00	87,50
6	BPPSDMKP	80,00	90,00
7	Ditjen PDSPKP	80,00	87,50
8	BPPMHKP	80,00	97,50
9	Inspektorat Jenderal	82,00	97,50

Sumber : Hasil Evaluasi Itjen KKP pada unit Eselon I lingkup KKP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 182/SJ.2/TU.210/I/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
7. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Hal : Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA. 2024

Tanggal : 15 Januari 2025

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menyusuli Nota Dinas kami Nomor 4603/SJ.2/TU.210/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Perpanjangan Waktu Pengisian Manual dan Realisasi Indikator Kinerja Perencanaan Program dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2024 bahwa Pengisian manual IKSS dan IKP tersebut dilakukan melalui Aplikasi SAKTI modul penganggaran yang sebelumnya dilakukan sampai dengan 20 Desember 2024 menjadi 15 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA 2024 sebagai berikut:

1. Capaian nilai Indikator Kinerja NKPA KKP (level 0) Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan Aplikasi Monev Kemenkeu tanggal 15 Januari 2025 sebesar **87,18** dari target 82,00, untuk capaian nilai Indikator Kinerja NKPA Unit Eselon I (level I) sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,00, sedangkan untuk capaian nilai Indikator Kinerja NKPA Satuan Kerja (level II) sebagian besar Satker telah mencapai target, tetapi terdapat beberapa Satker yang belum mencapai target sebesar 71,00.

2. Capaian nilai Indikator Kinerja NKPA per level tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai Indikator Kinerja NKPA pada Triwulan IV tahun 2024 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Setyawati

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
36	200201	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	90,00	100,00	100,00	33,35
38	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KAWADANG	90,00	100,00	100,00	33,35
39	310008	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	90,00	100,00	100,00	33,35
41	330006	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	90,00	100,00	100,00	33,35
42	340130	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	90,00	100,00	100,00	33,35
43	427055	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA SELATAN	90,00	100,00	100,00	33,35
44	427061	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	90,00	100,00	100,00	33,35
45	427070	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	90,00	100,00	100,00	33,35
46	427081	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	90,00	100,00	100,00	33,35
47	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	90,00	100,00	100,00	33,35
48	531008	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	90,00	100,00	100,00	33,35
50	537005	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	90,00	100,00	100,00	33,35
51	560303	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN BATU	90,00	100,00	100,00	33,35
52	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	90,00	100,00	100,00	33,35
55	623003	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAMARAN	90,00	100,00	100,00	33,35
56	623330	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	90,00	100,00	100,00	33,35
57	633003	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	90,00	100,00	100,00	33,35
26	230130	SALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	89,28	100,00	100,00	28,55
53	623001	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	86,58	95,44	100,00	33,35
25	230146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KABANGANTU	84,05	92,06	100,00	33,35
23	330720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	83,77	100,00	75,00	6,45
37	300170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	82,50	90,00	100,00	33,35
29	330321	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TAJALUNG PANDAN	81,98	93,75	66,67	33,35
19	190137	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	81,76	89,01	100,00	33,35
5	000130	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	75,00	100,00	0,00	0,00



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	130	032	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Nilai	100.00	89.81	96.86	100.00	100.00	99.78	100.00	97.82	100%	0.00	97.82
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.47	19.37	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	94.91		99.16				100.00				

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 196/SJ.2/RC.610/I/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
6. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024

Tanggal : 15 Januari 2025

Menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 40/SJ.1/RC.610/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester II tahun 2024 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 20.20 (sesuai Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor S-738/PB.2/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Ketentuan Pelaporan Data Capaian Output dan Penilaian IKPA Belanja K/L Tahun 2024).
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester II tahun 2024 sebesar 93,84 dari target nilai 93,76.
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester II tahun 2024 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup Unit Kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart**, **Akuntabel**, **Integritas**, **Loyalitas**, dan **Sinergi** (SAILS).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Setyawati

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Inspektur Lingkup Inspektorat Jenderal
4. Ketua Tim Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan dan BMN

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

35	050	032	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	Nilai	100.00	89.31	98.92	100.00	100.00	97.68	100.00	97.95	100%	0.00	97.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.40	19.78	10.00	10.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	94.66		99.15				100.00				
36	012	032	649636	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	Nilai	100.00	91.33	96.55	100.00	100.00	99.40	100.00	97.95	100%	0.00	97.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.70	19.31	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	95.67		98.99				100.00				
37	038	032	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	Nilai	100.00	89.92	97.57	100.00	100.00	99.12	100.00	97.91	100%	0.00	97.91
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.49	19.51	10.00	10.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	94.96		99.17				100.00				
38	062	032	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	Nilai	100.00	92.08	95.54	100.00	99.61	100.00	100.00	97.88	100%	0.00	97.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.81	19.11	10.00	9.96	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.04		98.79				100.00				
39	130	032	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Nilai	100.00	89.81	96.86	100.00	100.00	99.78	100.00	97.82	100%	0.00	97.82
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.47	19.37	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	94.91		99.16				100.00				
40	049	032	567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	Nilai	100.00	91.81	96.50	100.00	100.00	96.83	100.00	97.75	100%	0.00	97.75
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.77	19.30	10.00	10.00	9.68	25.00				
					Nilai Aspek	95.91		98.33				100.00				



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

Nomor : B.5702/DJPT.1/RC.610/XI/2024 29 November 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap Tahun 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Rekonsiliasi Kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap pada tanggal 21 November 2024 yang diikuti oleh seluruh unit kerja Pusat dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, rekonsiliasi Kinerja merupakan salah satu metode evaluasi implementasi SAKIP untuk penilaian cepat terhadap pengelolaan kinerja sebuah unit kerja.
3. Rekonsiliasi Kinerja dilakukan terhadap seluruh unit kerja level II lingkup Ditjen Perikanan Tangkap menggunakan kertas kerja yang dinilai berdasarkan 4 (empat) aspek sebagai berikut:

Aspek	Bobot	Nilai Maksimal
Kepatuhan (dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja)	25%	25
Kesesuaian (dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan)	25%	25
Ketercapaian (dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi Kinerjaku KKP))	30%	30
Ketepatan (dinilai dari ketepatan waktu pelaporan atas LKJ ke atasan, dan pelaporan dokumen ke aplikasi e-SakipReviu KemenpanRB)	20%	20

4. Hasil rekonsiliasi kinerja pada 5 unit kerja Pusat dan 23 unit kerja UPT Pusat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Satker	Nilai
PUSAT		
1	Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI)	98,36
2	Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI)	97,30

No.	Satker	Nilai
3	Direktorat Kepelabuhan Perikanan (KP)	97,80
4	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (PDK)	96,57
5	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	96,20
UPT Pusat DJPT		
1	BBPI Semarang	98,92
2	PPS Nizam Zachman	99,01
3	PPS Cilacap	99,04
4	PPS Belawan	97,31
5	PPS Bitung	98,81
6	PPS Bungus	98,78
7	PPS Kendari	98,92
8	PPN Karangantu	98,31
9	PPN Palabuhanratu	98,71
10	PPN Kejawan	98,54
11	PPN Brondong	98,92
12	PPN Prigi	98,63
13	PPN Ambon	89,79
14	PPN Kwandang	98,02
15	PPN Pekalongan	97,91
16	PPN Pemangkat	97,81
17	PPN Pengambengan	98,88
18	PPN Sibolga	99,17
19	PPN Sungailiat	97,28
20	PPN Tanjungpandan	97,11
21	PPN Ternate	98,60
22	PPN Tual	88,14
23	PPP Telukbatang	97,62

Rincian hasil rekonsiliasi kinerja seluruh unit kerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap sebagaimana **terlampir**.

- Hasil rekonsiliasi kinerja pada angka 4 di atas, agar dapat dijadikan pedoman dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada unit kerja masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Trian Yunanda

Tembusan:

- Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
- Kepala Biro Perencanaan

Lampiran 1.

Nomor : B.5702/DJPT.1/RC.610/XI/2024

Tanggal : 29 November 2024

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
2. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
3. Direktur Kepelabuhanan Perikanan
4. Direktur Perizinan dan Kenelayanan
5. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang
6. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
7. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
8. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
9. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
10. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
11. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
12. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
13. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
14. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu
15. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
16. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
17. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
18. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
19. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
20. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
21. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
22. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
23. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
24. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
25. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
26. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
27. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Trian Yunanda

BERITA ACARA
REKONSILIASI KINERJA PUSAT DAN UPT TRIWULAN III TAHUN 2024
LINGKUP DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Pada hari ini, Kamis 21 November 2024 telah dilakukan Rekonsiliasi Kinerja dan Reviu Mandiri Laporan Kinerja satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun aspek penilaian Rekonsiliasi Kinerja mencakup:

- Aspek Kepatuhan : 25%
- Aspek Kesesuaian : 25%
- Aspek Ketercapaian : 30%
- Aspek Ketepatan : 30%

Sedangkan aspek reviu Laporan Kinerja mencakup format LKj, mekanismen penyusunan LKj, substansi LKj, dan usulan koreksi LKj.

Masing-masing perwakilan satker menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan dalam Rekonsiliasi Kinerja sudah sesuai dengan kondisi dan data yang sebenarnya, dengan nilai dan catatan rekonsiliasi sebagaimana terlampir.

Sekretariat DJPT



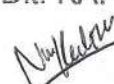
(Q.M. Royhan)

Dit. PSDI



(Aris Bagoes M.)

Dit. KAPI



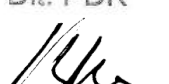
(Nur Halizah)

Dit. KP



(Miswandi)

Dit. PDK



(Irmawati)

BBPI Semarang



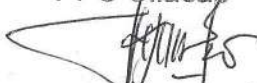
(Fitria Ayu)

PPS Nizam Zachman



(Utari Kusumaningrum)

PPS Cilacap



(Yan Luby)

PPS Belawan



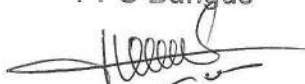
(Roland Afrianto G.)

PPS Bitung



(Fera Nur Idawati)

PPS Bungus



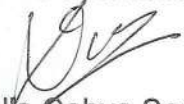
(Tedi Agustian)

PPS Kendari

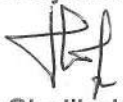


(Nurul Hikmah)

PPN Palabuhanratu


(Della Cahya Sari)

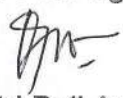
PPN Kejawanan


(Ana Sholihah N.)

PPN Brondong


(Yonanda Ade Ayu S.)

PPN Prigi


(Ratri Puji Astuti)

PPN Ambon


(Sudrajat Abdul Kholiq)

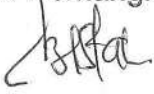
PPN Kwandang


(Girmawan)

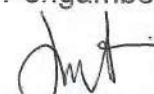
PPN Pekalongan


(Dewi Rahmadani)

PPN Remangkat


(Sendy Bastian)

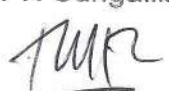
PPN Pengambangan


(Nurul Lady C.)

PPN Sibolga


(Ariska F. Simatupang)

PPN Sungailiat


(Nizar Ahmad F.)

PPN Tanjung Pandan


(Erpan Ependi)

PPN Ternate


(Sandi Setiadi)

PPN Tual


(Kaswandi)

PPP Teluk Batang


(Maulana)

PPN Karangantu


(Firly Rizky A.)

Perwakilan DJPT


(Hadian Idhar Y.)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	Dit KAPI
USER KINERJAKU	0303000000
TANGGAL REKON	Thursday, 21 November 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
	Tw I	Tw II	Tw III					
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skor	100,00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skor	100,00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	112,33	114,03	113,92
Skor	113,43		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100,00	100,00
Skor	100,00	
Catatan	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100,00	100,00	113,43	100,00
Skor dikali Bobot	25,00	25,00	28,36	20,00
Total Skor	98,36			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

- Pada tahun 2024, Satker Dit. KAPI terdapat 19 Indikator Kinerja, terdiri dari 12 Indikator Tahunan, 1 Indikator Semesteran, dan 6 Indikator Triwulanan
- Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98,36

Pembahas

(Q Muhammad Royhan)

Unit yang di Sampling

(Nur Halizah)

(Anjar Hajiono)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	Dit PSDI
USER KINERJAKU	0302000000
TANGGAL REKON	Thursday, 21 November 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw I	Tw II	Tw III	Tw I	Tw II
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skor	100,00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skor	100,00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	110,72	107,78	109,06
Skor	109,19		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100,00	100,00
Skor	100,00	
Catatan	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100,00	100,00	109,19	100,00
Skor dikali Bobot	25,00	25,00	27,30	20,00
Total Skor	97,30			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

- Pada tahun 2024, Satker Dit. PSDI terdapat 19 Indikator Kinerja, terdiri dari 12 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 5 Indikator Triwulanan
- Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 97,30

Pembahas

(Q Muhammad Royhan)

Unit yang di Sampling

(Cahyanto Dani Komaro)

(Aris Bagoes Maladhi)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	Dit KP
USER KINERJAKU	0304000000
TANGGAL REKON	Thursday, 21 November 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw I	Tw II	Tw III	Tw I	Tw II
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skor	100,00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skor	100,00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	106,14	107,42	120,00
Skor	111,19		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100,00	100,00
Skor	100,00	
Catatan	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100,00	100,00	111,19	100,00
Skor dikali Bobot	25,00	25,00	27,80	20,00
Total Skor	97,80			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:	1. Pada tahun 2024, Satker Dit KP terdapat 22 Indikator Kinerja, terdiri dari 18 Indikator Tahunan, 1 Indikator Semesteran, dan 3 Indikator Triwulanan 2. Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 97,80
-----------------	--

Pembahas

(Q Muhammad Royhan)

Unit yang di Sampling

(Miswandi)

(Gandha Budi Pradana)

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	Dit PDK
USER KINERJAKU	xxxx
TANGGAL REKON	Thursday, 21 November 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
	Tw I	Tw II	Tw III					
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skor	100,00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92
Skor	98,96							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	99,42	112,35	110,14
Skor	107,30		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100,00	100,00
Skor	100,00	
Catatan	-	-

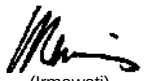
SKOR	ASPEK PENILAIAN				
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN	
	Bobot	25%	25%	30%	20%
	Skor per aspek	100,00	98,96	107,30	100,00
	Skor dikali Bobot	25,00	24,74	26,83	20,00
	Total Skor	96,57			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:	1. Pada tahun 2024, Satker Dit PDK terdapat 21 Indikator Kinerja, terdiri dari 7 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 12 Indikator Triwulanan
	2. Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 96,57

Pembahas

(Q Muhammad Royhan)

Unit yang di Sampling

(Irmawati)

(Slamet Sutarno)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
USER KINERJAKU	0301000000
TANGGAL REKON	Thursday, 21 November 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skor	100,00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skor	100,00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	104,11	102,04	108,29
Skor	104,81		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100,00	100,00
Skor	100,00	
Catatan	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100,00	100,00	104,81	100,00
Skor dikali Bobot	25,00	25,00	26,20	20,00
Total Skor	96,20			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

- Pada tahun 2024, Satker xx terdapat xx Indikator Kinerja, terdiri dari 11 Indikator Tahunan, 3 Indikator Semesteran, dan 5 Indikator Triwulanan
- Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 96,20

Pembahas

(Hadian Idhar Yasaditama)

Unit yang di Sampling

(Q Muhammad Royhan)

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	BBPI Semarang
USER KINERJAKU	0306100000
TANGGAL REKON	Thursday, 21 November 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ
					Tw I	Tw II	Tw III	Tw III*
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skor	100,00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerja	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerja	LKJ/LCK Tw III - Kinerja	LKJ/LCK Tw III - Kinerja
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skor	100,00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	116,83	113,89	116,30
Skor	115,67		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100,00	100,00
Skor	100,00	
Catatan	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100,00	100,00	115,67	100,00
Skor dikali Bobot	25,00	25,00	28,92	20,00
Total Skor	98,92			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:	1. Pada tahun 2024, Satker BBPI Semarang terdapat 19 Indikator Kinerja, terdiri dari 11 Indikator Tahunan, 4 Indikator Semesteran, dan 4 Indikator Triwulanan
	2. Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98,92

Pembahas

(Q Muhammad Royhan)

Unit yang di Sampling

(Fitria Ayu)

(Novita Rachma B)

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPS NIZAM ZACHMAN
USER KINERJAKU	307000000
TANGGAL REKON	Thursday, 21 November 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	113.77	116.43	117.90
Skor	116.03		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100.00	100.00
Skor	100.00	
Catatan	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
	25%	25%	30%	20%
	100.00	100.00	116.03	100.00
	25.00	25.00	29.01	20.00
Total Skor	99.01			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

1. Pada tahun 2024, Satker PPS Nizam Zachman terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
2. Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 99.01

Pembahas


(Alfira Ayu Saharani)

Unit yang di Sampling


(Utari Kusumaningrum)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPS Cilacap
USER KINERJAKU	0309000000
TANGGAL REKON	Thursday, November 21, 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ
					Tw I	Tw II	Tw III	Tw III*
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerja	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerja	LKJ/LCK Tw III - Kinerja	LKJ/LCK Tw III - Kinerja
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	115.59	115.76	117.14
Skor	116.16		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100.00	100.00
Skor	100.00	
Catatan	-	-

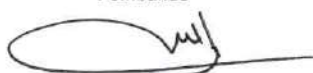
SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100.00	100.00	116.16	100.00
Skor dikali Bobot	25.00	25.00	29.04	20.00
Total Skor	99.04			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

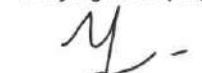
1. Pada tahun 2024, Satker PPS Cilacap terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
2. Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 99.04

Pembahas


(Nasriyah)

(.....)

Unit yang di Sampling


(Yan Luby Widriyanti)

(PPS Cilacap)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPS BELAWAN
USER KINERJAKU	311000000
TANGGAL REKON	Thursday, 21 November 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	99.62	113.58	114.55
Skor	109.25		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100.00	100.00
Skor	100.00	
Catatan	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
	25%	25%	30%	20%
	100.00	100.00	109.25	100.00
	25.00	25.00	27.31	20.00
	97.31			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

- Pada tahun 2024, Satker PPN Belawan terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
- Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 97.31

Pembahas


(Alfira Ayu Saharani)

Unit yang di Sampling


(Roland Afrianto G.)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPS Bitung
USER KINERJAKU	0311100000
TANGGAL REKON	Thursday, November 21, 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ
					Tw I	Tw II	Tw III	Tw III*
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerja	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerja	LKJ/LCK Tw III - Kinerja	LKJ/LCK Tw III - Kinerja
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	113.43	115.99	116.35
Skor	115.26		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampalan LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atas
	100.00	100.00
Skor	100.00	
Catatan	-	-

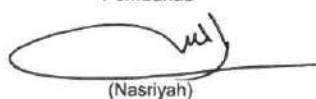
SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
	25%	25%	30%	20%
Bobot	100.00	100.00	115.26	100.00
Skor dikali Bobot	25.00	25.00	28.81	20.00
Total Skor	98.81			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

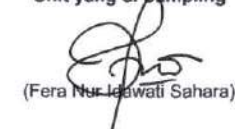
1. Pada tahun 2024, Satker PPS Bitung terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
2. Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98.81

Pembahas


(Nasriyah)

(.....)

Unit yang di Sampling


(Fera Nur Irawati Sahara)

(.....)

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPS BUNGUS
USER KINERJAKU	310000000
TANGGAL REKON	Thursday, 21 November 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	114.12	115.12	116.14
Skor	115.13		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100.00	100.00
Skor	100.00	
Catatan	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
	25%	25%	30%	20%
	100.00	100.00	115.13	100.00
	25.00	25.00	28.78	20.00
Total Skor	98.78			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

1. Pada tahun 2024, Satker PPN Bungus terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
2. Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98.78

Pembahas


(Alfira Ayu Saharani)

Unit yang di Sampling


(Tedi Agustian)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPS Kendari
USER KINERJAKU	0308000000
TANGGAL REKON	Thursday, 21 November 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw I	Tw II	Tw III	Tw I	Tw II
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skor	100,00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skor	100,00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	114,45	115,33	117,22
Skor	115,67		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100,00	100,00
Skor	100,00	
Catatan	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100,00	100,00	115,67	100,00
Skor dikali Bobot	25,00	25,00	28,92	20,00
Total Skor	98,92			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:	1. Pada tahun 2024, Satker PPS Kendari terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan 2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98,92
-----------------	---

Pembahas

(Q Muhammad Royhan)

Unit yang di Sampling

(Nurul Hikmah)

(Made Benny Wahyudi)

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPN KARANGANTU
USER KINERJAKU	312140000
TANGGAL REKON	Thursday, 21 November 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	111.29	113.80	114.67
Skor	113.25		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100.00	100.00
Skor	100.00	
Catatan	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
	25%	25%	30%	20%
	100.00	100.00	113.25	100.00
	25.00	25.00	28.31	20.00
Total Skor	98.31			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

1. Pada tahun 2024, Satker PPN Karangantu terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
2. Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98.31

Pembahas


(Alfira Ayu Saharani)

Unit yang di Sampling


(Firly Rizky A.)

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPN PALABUHANRATU
USER KINERJAKU	312020000
TANGGAL REKON	Thursday, 21 November 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	112.75	116.61	115.19
Skor	114.85		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100.00	100.00
Skor	100.00	
Catatan	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
	25%	25%	30%	20%
	100.00	100.00	114.85	100.00
	25.00	25.00	28.71	20.00
Total Skor	98.71			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

- Pada tahun 2024, Satker PPN Palabuhanratu terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
- Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98.71

Pembahas


(Alfira Ayu Saharani)

Unit yang di Sampling


(Della Cahya Sari)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPN Kejawanan
USER KINERJAKU	0312080000
TANGGAL REKON	Thursday, November 21, 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET		REALISASI	
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	113.42	113.49	115.61
Skor	114.17		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100.00	100.00
Skor	100.00	
Catatan	-	-

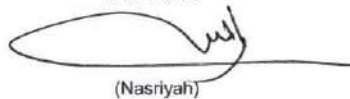
SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
	25%	25%	30%	20%
	100.00	100.00	114.17	100.00
	25.00	25.00	28.54	20.00
	98.54			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

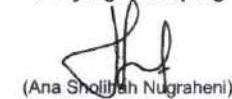
1. Pada tahun 2024, Satker PPN Kejawanan terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
2. Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98.54

Pembahas


(Nasriyah)

(.....)

Unit yang di Sampling


(Ana Sholihah Nugraheni)


(Shandra Dewi Adesanty)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPN Brondong
USER KINERJAKU	0312100000
TANGGAL REKON	Thursday, November 21, 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	113.98	114.94	118.17
Skor	115.70		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan pada Aplikasi ESR		Ke Atasan
	100.00		100.00
Skor	100.00		
Catatan	-	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100.00	100.00	115.70	100.00
Skor dikali Bobot	25.00	25.00	28.92	20.00
Total Skor	98.92			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

- Pada tahun 2024, Satker PPN Brondong terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
- Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98,92

Pembahas



(Nur Alfianto)

Unit yang di Sampling



(Yonanda Ade Ayu Swastika)

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPN PRIGI
USER KINERJAKU	312040000
TANGGAL REKON	Thursday, 21 November 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	112.13	113.89	117.52
Skor	114.51		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100.00	100.00
Skor	100.00	
Catatan	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
	25%	25%	30%	20%
	100.00	100.00	114.51	100.00
	25.00	25.00	28.63	20.00
	98.63			

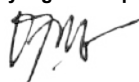
SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

1. Pada tahun 2024, Satker PPN Prigi terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98.63

Pembahas

(Alfira Ayu Saharani)

Unit yang di Sampling

(Ratri Puji Astuti)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPN Ambon
USER KINERJAKU	0312010000
TANGGAL REKON	Thursday, November 21, 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	113.11	115.91	116.43
Skor	115.15		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	10.00	100.00
Skor	55.00	
Catatan	-	-

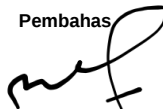
SKOR	ASPEK PENILAIAN				
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN	
	Bobot	25%	25%	30%	20%
	Skor per aspek	100.00	100.00	115.15	55.00
	Skor dikali Bobot	25.00	25.00	28.79	11.00
Total Skor	89.79				

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

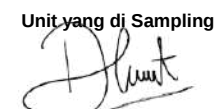
CATATAN:

- Pada tahun 2024, Satker PPN Ambon terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
- Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 89,79

Pembahas


(Nur Alfianto)

Unit yang di Sampling


(Sudrajat Abdul Kholiq)

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPN KWANDANG
USER KINERJAKU	312150000
TANGGAL REKON	Thursday, 21 November 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	113.15	111.63	111.51
Skor	112.10		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100.00	100.00
Skor	100.00	
Catatan	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
	Bobot 25%	25%	30%	20%
	Skor per aspek 100.00	100.00	112.10	100.00
	Skor dikali Bobot 25.00	25.00	28.02	20.00
Total Skor	98.02			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

1. Pada tahun 2024, Satker PPN Kwandang terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
2. Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai xxxx

Pembahas

alfira

(Alfira Ayu Saharani)

Unit yang di Sampling

(Girmawan)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPN Pekalongan
USER KINERJAKU	0312090000
TANGGAL REKON	Thursday, November 21, 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	110.19	107.20	117.54
Skor	111.64		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan pada Aplikasi ESR		Ke Atasan
	100.00		100.00
Skor	100.00		
Catatan	-	-	-

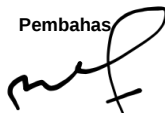
SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100.00	100.00	111.64	100.00
Skor dikali Bobot	25.00	25.00	27.91	20.00
Total Skor	97.91			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

- Pada tahun 2024, Satker PPN Pekalongan terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
- Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 97,91

Pembahas


(Nur Alfianto)

Unit yang di Sampling


(Dewi Rahmadani)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPN Pemangkat
USER KINERJAKU	0312050000
TANGGAL REKON	Thursday, November 21, 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

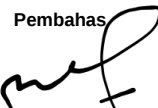
ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	109.62	112.54	111.53
Skor	111.23		
Catatan	-	-	-

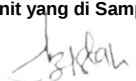
ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100.00	100.00
Skor	100.00	
Catatan	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100.00	100.00	111.23	100.00
Skor dikali Bobot	25.00	25.00	27.81	20.00
Total Skor	97.81			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:	1. Pada tahun 2024, Satker PPN Pemangakat terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan 2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 97,81
-----------------	--

Pembahas

(Nur Alfianto)

Unit yang di Sampling

(Sendy Bastian)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPN Pengembangan
USER KINERJAKU	0312130000
TANGGAL REKON	Thursday, November 21, 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	115.75	117.82	112.94
Skor	115.50		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100.00	100.00
Skor	100.00	
Catatan	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100.00	100.00	115.50	100.00
Skor dikali Bobot	25.00	25.00	28.88	20.00
Total Skor	98.88			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>60 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

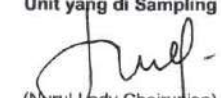
CATATAN:

- Pada tahun 2024, Satker PPN Pengembangan terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
- Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98.88

Pembahas

(Nasriyah)

(.....)

Unit yang di Sampling

(Nuzul Lady Choirunisa)

(.....)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPN Sibolga
USER KINERJAKU	0312060000
TANGGAL REKON	Thursday, November 21, 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	115.71	117.57	116.75
Skor	116.68		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan pada Aplikasi ESR		Ke Atasan
	100.00		100.00
Skor	100.00		
Catatan	-	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100.00	100.00	116.68	100.00
Skor dikali Bobot	25.00	25.00	29.17	20.00
Total Skor	99.17			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

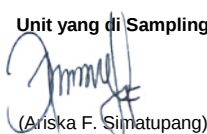
- Pada tahun 2024, Satker PPN Sibolga terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
- Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 99,17

Pembahas



(Nur Alfianto)

Unit yang di Sampling



(Ariska F. Simatupang)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPN Sungailiat
USER KINERJAKU	0312120000
TANGGAL REKON	Thursday, November 21, 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	111.96	108.89	106.51
Skor	109.12		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan pada Aplikasi ESR		Ke Atasan
	100.00		100.00
Skor	100.00		
Catatan	-	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100.00	100.00	109.12	100.00
Skor dikali Bobot	25.00	25.00	27.28	20.00
Total Skor	97.28			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

- Pada tahun 2024, Satker PPN Sungailiat terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
- Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 97,28

Pembahas


(Nur Alfianto)

Unit yang di Sampling


(Nizar Ahmad Farid)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPN Tanjung Pandan
USER KINERJAKU	0312110000
TANGGAL REKON	Thursday, November 21, 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
	1.00	1.00	1.00	1.00	Tw I	Tw II	Tw III	1.00
	100.00							
Skor								
Catatan								

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan								

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	108.43	108.27	108.67
Skor	108.46		
Catatan			

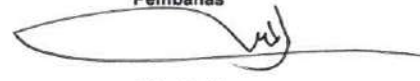
ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100.00	100.00
Skor	100.00	
Catatan		

SKOR	ASPEK PENILAIAN				
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN	
	Bobot	25%	25%	30%	20%
	Skor per aspek	100.00	100.00	108.46	100.00
	Skor dikali Bobot	25.00	25.00	27.11	20.00
	Total Skor	97.11			

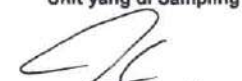
SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

- Pada tahun 2024, Satker PPN Tanjung Pandan terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
- Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 97,11

Pembahas

(Nasriyah)

(.....)

Unit yang di Sampling

(Erpan Ependi)

(.....)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPN Ternate
USER KINERJAKU	03120300000
TANGGAL REKON	Thursday, November 21, 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ
					Tw I	Tw II	Tw III	Tw III*
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerja	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerja	LKJ/LCK Tw III - Kinerja	LKJ/LCK Tw III - Kinerja
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	110.61	115.53	117.04
Skor	114.39		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampalan LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100.00	100.00
Skor	100.00	
Catatan	-	-

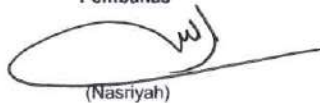
SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100.00	100.00	114.39	100.00
Skor dikali Bobot	25.00	25.00	28.60	20.00
Total Skor	98.60			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

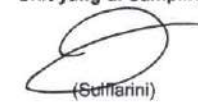
1. Pada tahun 2024, Satker PPN Ternate terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
2. Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98.60

Pembahas


(Nasriyah)

(.....)

Unit yang di Sampling


(Sulfarini)


(Sandi Setiadi)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPN Tual
USER KINERJAKU	0312070000
TANGGAL REKON	Thursday, November 21, 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ
					Tw I	Tw II	Tw III	Tw III*
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerja	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerja	LKJ/LCK Tw III - Kinerja	LKJ/LCK Tw III - Kinerja
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	103.57	112.19	109.90
Skor	108.55		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atas
	10.00	100.00
Skor	55.00	
Catatan	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100.00	100.00	108.55	55.00
Skor dikali Bobot	25.00	25.00	27.14	11.00
Total Skor	88.14			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

- Pada tahun 2024, Satker PPN Tual terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
- Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 88.14

Pembahas

(Nasriyah)

(.....)

Unit yang di Sampling

(Kaswandi)

(.....)

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2024**

NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPP Teluk Batang
USER KINERJAKU	0313010000
TANGGAL REKON	Thursday, November 21, 2024

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Skor	100.00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
	107.44	110.26	113.78
Skor	110.49		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100.00	100.00
Skor	100.00	
Catatan	-	-

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
	25%	25%	30%	20%
	100.00	100.00	110.49	100.00
	25.00	25.00	27.62	20.00
	97.62			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

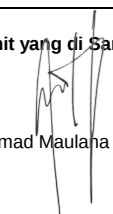
- Pada tahun 2024, Satker PPP Teluk Batang terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
- Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 97,62

Pembahas



(Nur Alfianto)

Unit yang di Sampling



(Ahmad Maulana Ibrahim)

No	Pernyataan		Checklist	Hasil Reviu
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	✓	1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB II 2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang terlampir pada BAB II 3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang terlampir pada BAB III 4. LKj telah menyajikan lampiran dokumen yang mendukung informasi berupa Perjanjian Kinerja (PK) 5. LKj sudah menyajikan upaya perbaikan ke depan pada penjelasan masing IKU dan pada bagian penutup 6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III Tahun 2024 yang terlampir pada BAB III
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓	
		3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	✓	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan pertama	✓	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓	
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu	✓	1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut 2. Informasi yang disampaikan pada LKj telah didukung dengan data yang memadai sesuai yang tercantum pada memo penyampaian capaian data dukung 3. terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III 4. Terdapat SK tim pengelola kinerja pada satker tersebut 5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang dilampirkan 6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung dengan data yang memadai	✓	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	✓	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓	
		7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari dibawahnya	-	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓	LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah selaras dengan rencana strategis satker tersebut.
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓	
		3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓	
		9. IKU dan IK telah SMART	✓	
IV	Usulan Koreksi	1.		
		2.		
		3.		
		4.		

Jakarta, 23 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja


1. Irmawati

Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI)

No		Pernyataan	Checklist	Hasil Reviu
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan pertama 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	V V V V V V	Hasil Review: 1. LKj telah menampilkan data penting (Tugas dan Fungsi, Isu Strategis, Struktur Organisasi, dan Sistematika Penyajian Instansi Pemerintah PSDI) 2. LKj telah menyajikan target kinerja tiap IKU dan tiap triwulan 3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja pada setiap triwulan 4. LKj telah menampilkan data dukung yang relevan dengan capaian kinerja 5. LKj telah menampilkan upaya tindak lanjut dan rekomendasi tindak lanjut kinerja 6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran dengan triwulan III Tahun 2024.
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari dibawahnya	V V V V V V -	1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker sesuai dengan struktur organisasi 2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum pada aplikasi Kinerjaaku 3. Terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III 4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut 5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang belum dilampirkan 6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja dan terdapat penjelasan grafik
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 9. IKU dan IK telah SMART	V V V V V - V V V	LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah selaras dengan rencana strategis satker tersebut. LKj telah sesuai dengan PK, telah sesuai IKU, dan manual IKU Capaian data kinerja belum dibandingkan dengan data kinerja tahun lalu dan standar nasional karena IKU baru tetapi terdapat analisa keberhasilan dan kegagalan IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART
IV	Usulan Koreksi	1. Melengkapi struktur organisasi 2. Melengkapi LKj dengan nomor halaman dan keseragaman font tulisan pada LKj.		

Jakarta, 22 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja



Miswandi

No	Pernyataan		Checklist	Hasil Reviu
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	v	1. LKj telah menampilkan data penting instansi pemerintah yang tercantum pada BAB I
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	v	2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang tercantum pada BAB II
		3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	v	3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari setiap IKU Triwulan III yang tercantum pada BAB III
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan pertama	-	4. LKj belum menyajikan data pendukung (perjanjian kinerja) yang tercantum pada BAB awal
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	v	5. LKj sudah menyajikan upaya perbaikan ke depan yang tercantum pada BAB IV namun belum disajikan pada setiap IKU
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	v	6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III Tahun 2024 yang tercantum pada BAB III
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu	v	1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut 2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum pada data dukung dan aplikasi Kinerjaku 3. Terdapat memo penyampaian data dukung capaian LKj triwulan III 4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut 5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang dilampirkan 6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung dengan data yang memadai	v	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	v	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	v	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	v	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	v	
		7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari dibawahnya	-	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	v	- LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah selaras dengan rencana strategis satker tersebut. - Capaian data kinerja telah membandingkan dengan data kinerja tahun sebelumnya serta perbandingan dengan renstra - IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	v	
		3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	v	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	v	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	v	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	v	
		9. IKU dan IK telah SMART	v	
IV	Usulan Koreksi	1. Melengkapi upaya perbaikan ke depan pada masing-masing IKU		
		2. Melengkapi Perjanjian Kinerja pada lampiran		
		3.		
		4.		

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1. Q Muhammad Royhan

Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Direktorat Perizinan dan Kelelayanan

No	Pernyataan		Checklist	Hasil Reviu
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	✓	1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I 2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang terlampir pada BAB II 3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang terlampir pada BAB III 4. LKj sudah menyajikan lampiran memorandum capaian triwulan III 5. LKj sudah menyajikan upaya perbaikan ke depan pada bagian saran di Bab Penutup 6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III Tahun 2023 yang terlampir pada BAB III
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓	
		3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	✓	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan pertama	✓	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓	
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu	✓	1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut 2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum pada aplikasi Kinerjaku 3. Sudah terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III 4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut 5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang dilampirkan 6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung dengan data yang memadai	✓	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	✓	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓	
		7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari dibawahnya	-	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓	LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah selaras dengan rencana strategis satker tersebut. Capaian data kinerja telah dibandingkan dengan data kinerja 5 tahun sebelumnya IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓	
		3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓	
		9. IKU dan IK telah SMART	✓	
IV	Usulan Koreksi	1. Melengkapi lampiran Perjanjian Kinerja pada Laporan Kinerja		

Jakarta, 22 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja



1. Nur Halizah

No	Pernyataan		Checklist	Hasil Reviu
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	v	1. Sudah terdapat data penting IP yaitu tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi serta sasaran, indikator, dan target kinerja. 2. Sudah menyajikan informasi target kinerja sesuai Indikator Kinerja. 3. Sudah terdapat capaian kinerja sesuai dengan periode pelaporannya. 4. Sudah menyajikan lampiran yang mendukung. 5. Sudah ada upaya perbaikan/tindak lanjut di dalam LKj 6. Sudah menyajikan akuntabilitas keuangan yaitu realisasi anggaran di BAB III.
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	v	
		3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	v	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan pertama	v	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	v	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	v	
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu	v	1. LKj telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas berkaitan. 2. Sudah disampaikan dengan data dukung yang sesuai dan memadai. 3. Penyusunan LKj sudah sesuai dengan mekanisme penyampaian data dari unit kerja kepada unit penyusun LKj. 4. Sudah terdapat tim pengelola kinerja. 5. Data pada LKj sudah sesuai dengan lampiran dan bukti dukung yang sesuai dan memadai. 6. Data pada LKj telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang sesuai dengan SK Tim Pengelolaan Kinerja. 7. LKj sudah mencakup gabungan dari dibawahnya.
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung dengan data yang memadai	v	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	v	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	v	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	v	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	v	
		7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari dibawahnya	v	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	v	1. LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran di dalam PK. 2. LKj selaras dengan tujuan/sasaran di dalam renstra satker. 4. LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran di dalam IK. 5. LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran di dalam IKU. 7. Sudah ada perbandingan data kinerja dengan data tahun sebelumnya. 8. IKU dan IK sudah cukup mengukur tujuan/sasaran. 9. IKU dan IK telah dilakukan analisis menggunakan metode SMART.
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	v	
		3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	v	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	v	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	v	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	v	
		9. IKU dan IK telah SMART	v	
IV	Usulan Koreksi	1. Nihil		
		2.		
		3.		
		4.		

Jakarta, 22 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

Anis Bagoes Maladhi

No	Pernyataan		Checklist	Hasil Reviu
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	✓	1. Penyusunan LKj telah menyampaikan data penting instansi pemerintah 2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama selama tahun 2024 3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU 4. LKj telah menyajikan korelasi data capaian hasil kinerja yang berhubungan dengan capaian instansi KKP 5. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III Tahun 2024
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓	
		3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	✓	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan pertama	✓	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓	
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu	✓	1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut 2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum pada aplikasi Kinerjaku 3. terdapat memo penyampaian data capaian dari unit kerja ke unit penyusunan LKj 4. memo penyampaian capaian dan LKj telah ditandatangani oleh penanggungjawab IKU 5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang dilampirkan 6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung dengan data yang memadai	✓	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	✓	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓	
		7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari dibawahnya	✓	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓	1. Tujuan/sasaran yang ada di LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja, baik dari IKU ataupun IK. 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. LKj telah menampilkan perbandingan data kinerja dari tahun sebelumnya. 4. LKj juga telah menampilkan analisis keberhasilan dan kegagalan dalam setiap penyusunan LKj. 5. IKU dan IK telah cukup mengukur kinerja yang SMART.
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓	
		3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓	
		9. IKU dan IK telah SMART	✓	
IV	Usulan Koreksi	1. Melengkapi perbandingan data kinerja dengan standar nasional pada masing-masing IKU		
		2.		
		3.		
		4.		

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

Ahmad Maulana

No	Pernyataan		Checklist	Hasil Reviu
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	✓	1. LKj telah menampilkan data penting terlampir pada BAB I 2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang terlampir pada BAB II 3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang terlampir pada BAB III 4. LKj menyajikan korelasi data capaian hasil kinerja yang berhubungan dengan capaian instansi KKP 5. LKj menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III Tahun 2023 yang terlampir pada BAB III
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓	
		3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	✓	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan pertama	✓	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓	
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu	✓	1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut 2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum pada aplikasi Kinerjaaku 3. Belum terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III 4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut 5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang dilampirkan 6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja 7. LKj hanya memuat data capaian unit kerja
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung dengan data yang memadai	✓	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	✓	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓	
		7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari dibawahnya		
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓	LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah selaras dengan rencana strategis satker tersebut. Namun capaian data kinerja belum dibandingkan dengan data kinerja tahun lalu dan standar nasional IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓	
		3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓	
		9. IKU dan IK telah SMART	✓	
IV	Usulan Koreksi	1. Melengkapi informasi terkait data kinerja yang disampaikan dalam LKj telah disusun oleh unit kerja terkait dalam hal ini tim penyusun LKj		
		2.		
		3.		
		4.		

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1. Khairul B Arippudin

2. Roland Girsang

No	Pernyataan		Checklist	Hasil Reviu
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	✓	1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I 2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang terlampir pada BAB II 3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang terlampir pada BAB III 4. LKj belum menyampaikan lampiran berupa PK (Perjanjian Kinerja) PPS Cilacap Tahun 2024 5. LKj belum menyajikan upaya perbaikan ke depan (dapat dimasukkan pada bab IV. Penutup) 6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III Tahun 2024 yang terlampir pada BAB III
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓	
		3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	✓	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan pertama	-	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	-	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓	
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu	✓	1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut 2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum pada aplikasi Kinerjaku 3. Telah terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III 4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut 5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang dilampirkan 6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja 7. LKj hanya memuat data capaian unit kerja PPN Cilacap saja
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung dengan data yang memadai	✓	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	✓	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓	
		7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari dibawahnya	✓	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓	LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah selaras dengan rencana strategis satker tersebut. Capaian data kinerja telah dibandingkan dengan data kinerja tahun lalu namun demikian belum dibandingkan dengan standar nasional/UPT DJPT lainnya yang setara IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓	
		3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓	
		9. IKU dan IK telah SMART	✓	
IV	Usulan Koreksi	1. Melampirkan Perjanjian Kinerja (PK) PPS Cilacap Tahun 2024 pada lampiran LKj		
		2. Agar dapat menyajikan upaya perbaikan/saran ke depan pada bab IV. Penutup		

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja



Fera Nur Idawati Sahara

Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024						
Satker PPS Belawan						
No	Pernyataan			Checklist	Hasil Reviu	
I	Format	1.	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	✓	1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I 2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang terlampir pada BAB II 3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang terlampir pada BAB III 4. LKj belum menyajikan korelasi data capaian hasil kinerja yang berhubungan dengan capaian instansi KKP 5. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. LKj belum menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III Tahun 2024 yang terlampir pada BAB III	
		2.	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓		
		3.	LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	✓		
		4.	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan pertama	-		
		5.	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓		
		6.	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	-		
II	Mekanisme Penyusunan	1.	LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu	✓	1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut 2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum pada aplikasi Kinerjaku 3. Belum terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III 4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut 5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang dilampirkan 6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja 7. LKj hanya memuat data capaian unit kerja PPS Belawan saja	
		2.	Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung dengan data yang memadai	✓		
		3.	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	-		
		4.	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓		
		5.	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓		
		6.	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓		
		7.	LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari dibawahnya	-		
III	Substansi	1.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓	LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah selaras dengan rencana strategis satker tersebut. Belum terdapat perbandingan spesifik yang membandingkan dengan data Nasional atau data Satker lain. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART	
		2.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓		
		3.	Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-		
		4.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓		
		5.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓		
		6.	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-		
		7.	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	-		
		8.	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓		
		9.	IKU dan IK telah SMART	✓		
IV	Usulan Koreksi	1.	Melengkapi surat penyampaian capaian kinerja/LKj Triwulan III Tahun 2024			
		2.	Melengkapi data lampiran yang mendukung informasi pada badan pertama			

Jakarta, 22 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1. Utari Kusumaningrum
2. M. Roys Birrul Muttaqien

